MODUL

MASA PENERIMAAN ANGGOTA BARU

MAPABA

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

CABANG CIREBON - JAWA BARAT

2020M

PMII

MODUL MAPABA
TIM KADERISASI CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CIREBON – JAWA BARAT

Penyusun:
Tim Kaderisasi PMII Cabang Cirebon
Muhammad Nurul Falah
M. Jalal Assayuty
Lutfi Adila Rizky
M. Arief Wijaksana
Oktavia Rinisia
Mahmudah dkk.

Editor, Desain Sampul, dan Layout:
Moch Mughni Labib
(Sekretaris Umum Rayon Abu Nawas)
Mohammad Jaenuri
(Biro Kaderisasi Rayon Abu Nawas)

Penerbit:
Pengurus Rayon Abu Nawas
Fakultas Tarbiyah
IAIN Syekh Nur Jati - Cirebon, Jawa Barat

Masa Khidmat 2022-2023

Percetakan :
CV. Pangger (0231) 223254
Jl. Mayor sastraatmadja No. 72 Kasepuhan Cirebon4514
E-mail: pangger@plasa.com

BIODATA PESERTA MAPABA

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Alamat Rumah :

Telpon Rumah :

Pekerjaan Orang Tua:
Alamat Kos :

Nomor Telpon :

PT/ Fak./ Jur. :
Masuk Tahun :

Pengalaman Pendidikan

1. MI/SD : Tahun......... /..........
2. MTS/SMP : Tahun......... /..........
3. MA/SMU/SMK : Tahun......... /..........
4. Pondok Pesantren : Tahun......... /..........

Pengalaman Organisasi

1. Jabatan............................ Tahun.........
2. Jabatan............................ Tahun.........
3. Jabatan............................ Tahun.........
4. Jabatan............................ Tahun.........

Pengalaman Lain

1.
2.
3.

Hobby

1.
2.
3.

KALAM

Siapa yang melihat pada cermin sejarah, membuka lembaran yang tidak sedikit dari ikhwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman serta apa saja yang terjadi pada mereka hingga pada saat kepunahannya, akan mengetahui bahwa kekayaan yang pernah mereka sandang dan kemuliaan yang pernah menjadi perhiasan mereka, tidak lain adalah karena berkat apa yang secara kukuh mereka pegang yaitu mereka bersatu dalam cita-cita, seiya sekata searah setujuan, pikiran-pikiran mereka seiring. Maka inilah faktor paling kuat yang mengangkat martabat dan kedaulatan mereka, dan benteng paling kokoh bagi menjaga kekuatan dan ajaran mereka. Musuh-musuh mereka tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, malahan menundukkan kepala, menghormati mereka karena wibawa mereka, dan mereka pun mencapai tujuan-tujuan mereka dengan gemilang.

(*Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy"ari*)

DAFTAR ISI

BAB I
BELAJAR DAN MEMAHAMI KE-PMII-AN

SEJARAH
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Wacana sejarah diyakini sebagian ahli sejarah sebagai sebuah konstruksi pemikiran yang merekam hampir seluruh peristiwa yang pernah dialami manusia. Pasang surut perjalanan manusia, bangsa, tokoh, mulai dari kejayaan sampai tenggelamnya, semua tercover oleh waktu ini. Apa? Dan mengapa mesti ada sejarah? Signifikan apa yang bisa dipetik dari sejarah?

Pendekatan ini yang selayaknya dikedepankan. Karena seseorang tak akan pernah tertarik belajar sejarah jika tak mengetahui makna penting apa yang terkandung dalam sejarah. Dengan mengetahui kerangka inilah seseorang akan bergerak hatinya untuk mengetahui sejarah. Sejarah, walaupun pada dasarnya sekedar cerita mempunyai dinamika yang sangat dasyat. Setidaknya, inilah yang mengilhami ratusan ahli sejarah mencurahkan tenaga, pikiran, daya dan dana untuk mengetahui misteri apa yang terkandung dibalik sejarah.

Mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln menulis "*We cannot escape history*" (kita takkan pernah bisa melepaskan diri dari sejarah). Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang tak pernah dihindari dari perjalanan hidup seseorang, organisasi, negara dalam menentukan bermakna atau tidaknya sejarah perjalanan hidupnya. Berkait itu pula para ahli sejarah eropa menulis "*orang yang buta dengan apa yang terjadi sebelum ia dilahirkan, maka selamanya akan hidup menjadi bayi*". Seperti halnya membaca novel yang langsung pada akhir cerita. Tidak mengetahui perjalanan awal, konflik yang terjadi, masalah yang menyelimuti perjalanan yang dihadapi, strategi yang mana ibarat apa yng bisa diambil dan prediksi masa depan yang bagaimana, semua tertutup karena melewatkan kejadian yang dilalui.

Begitu juga kita membicarakan PMII, membicarakan masalah yang dihadapi masa kini saja tidak cukup, jika kita ingin memaknai dinamika dan perjalanan PMII di masa depan. Apalagi mengukur sejarah emas PMII untuk generasi penerus kita. Tentunya keterlibatan dari berbagai elemen dan sub sistem yang ada menjdi keharusan. Merancang warna apa PMII ke depan itu tergantung

bagaimana kita mampu mensyiasati kekayaan sejarah masa lalu, kini dan yang akan terjadi dan yang dimungkinkan bisa terjadi.

Perjalanan PMII dalam lintasan sejarahnya, tidak bisa dilepaskan begitu saja dari keterkaitan organisasi induk yang memberikannya. Dalam hal ini, NU mempunyai peranan besar dalam mencetuskan ide, semangat dan kerangka organisasi yang terbentuk. *Include* di dalamnya asas dan sifat keorganisasian.

Deskripsi hubungan NU-PMII yang sudah berjalan kurang lebih 36 tahun dapat dibahasakan secara sederhana: Masa *Underbow* (Dependen, 1960-1973), Masa (Independen, 1973-1991), dan Masa Interdependensi (1991-sekarang). Itulah hubungan formal PMII-NU.

A. KRONOLOGI BERDIRINYA PMII

Hasrat untuk mendirikan Organisasi Mahasiswa di kalangan NU sebenarnya sudah lama menjadi impian. Hal ini, terbukti dengan terbentuknya IMANU (Ikatan Mahasiswa NU) yang dibentuk pada Desember 1955 di Jakarta. Namun, organisasi ini tak mampu bertahan lama. Berdirinya organisasi ini ditentang oleh Pimpinan Pusat IPNU dengan berbagai pertimbangan:

1. IPNU baru dibentuk pada 24 Februari 1954,
2. Para penggerak IPNU banyak mahasiswanya, dikhawatirkan mereka meninggalkan IPNU dan aktif di IMANU,
3. IPNU baru saja berhasil menggalang persatuan dan perpaduan pelajar-pelajar dari Sekolah Umum, Madrasah, Pesantren, dan Mahasiswa dalam satu organisasi. Merupakan hal penting dalam pembinaan umat, yang mana sejak dulu merupakan kekuatan terpisah dan saling menjauh. Bangunan yang baru saja dibangun ini dikhawatirkan akan hancur lagi,
4. Jumlah mahsiswa NU masih sedikit belum saatnya mendirikan organisasi khusus mahasiswa,
5. Ketua PB NU sendiri menolak berdirinya IMANU. Sejak saat itulah IMANU tak terdengar lagi dibicarakan.

Namun, hasrat untuk mendirikan sebuah organisasi bagi mahasiswa NU ini, masih merupakan api dalam sekam. Dalam Muktamar ke- II IPNU 1-5 Januari 1957 di Pekalongan, perlu tidaknya didirikan suatu organisasi kemahasiswaan tetap dibicarakan.

Atas pertimbangan yang logis dan obyektif, desakan dari mahasiswa NU yang duduk di PT, Univesitas, dan Akademi akan organisasi khusus bagi mahasiswa, maka, pada Muktamar ke III IPNU 27-31 Desember 1958 di Cirebon, dibentuklah Departemen Perguruan Tinggi sebagai alat bagi pengurus yang duduk di Perguruan Tinggi.

Dalam perkembangan berikutnya, karena praktis departemen yang baru dibentuk tak dapat menjadi alat yang kongkret bagi mahasiswa NU yang memang alam dan kepentingan sudah berbeda dengan pelajar, tanggung jawab berbeda, maka dalam Konferensi Besar IPNU I 14-17 Maret 1960 di Kaliurang Yogyakarta, dibentuk 13 orang panitia sponsor yang akan ditunjuk menyiapkan Musyawarah NU se-Indonesia. Ketiga belas orang itu adalah:

1. Mewakili Jakarta; A. Khalid Mawardi, M. Said Budari, M.Shobic Ubaid,
2. Mewakili Bandung; M. Makmun Sukri BA, Hilman,
3. Mewakili Yogyakarta; H. Ismail Makki, Munsif Nachrawi,
4. Mewakili Semarang; A. Wahab Jaelani,
5. Mewakili Surabaya; Hisbullah Huda,
6. Mewakili Malang; M. Khalid Marbukha,
7. Mewakili Makasar; Ahmad Husein.

Atas keuletan mereka inilah, berhasil mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) Mahasiswa NU 14-16 April 1960 di Surabaya, yang dihadiri oleh wakil-wakil Sekolah Muslimat NU Wonokromo, Jakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Senat-senat Mahasiswa dan Perguruan Tinggi NU. Atas dasar pertimbangan; pentingnya organisasi bagi mahasiswa untuk kepentingan mahasiswa, dan perjuangan politik, beridirilah PMII sebagai *follow up* Departemen Perguruan Tinggi IPNU. Pada musyawarah itu disusun pula

peraturan PMII, program kerja, dan menunjuk **H. Mahbub Junaedi (tak hadir) sebagai Ketua Umum, A. Khalid Mawardi (Ketua I), Said Budairi (Sekertaris Umum),** dan orang-orang inilah yang menyusun kepengurusan selengkapnya.

Berlakunya peraturan dasar dimulai pada 17 April 1960 pada resepsi diproklamirkannya Hari Lahir PMII di Balai Pemida Surabaya. Acara dan momen ini mendapat perhatian besar dari masa mahasiswa, senat mahasiswa, organisasi ekstra, dan intra universitas serta wakil-wakil golongan politik.

B. KETEGANGAN POLITIK (MASA DEPENDEN PMII)

Pada awalnya memang banyak delegasi yang mengusulkan nama-nama sebagai pertimbangan, seperti dari Yogyakarta mengusulkan HMA (Himpunan Mahasiswa Ahlussunnah), Jakarta mengusulkan IMANU (Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama), kemudian Bandung, Surabaya dan Surakarta mengusulkan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Dan nama yang terakhir inilah yang akhirnya menjadi kesepakatan. Alasan dipilihnya nama PMII, dianggap mewakili;

1. Pola mahasiswa yang diliputi pemikiran inisiatif bebas,
2. Memanifestasikan nasionalisme sebagai semangat kebangsaan.

PMII lahir atas dasar tuntutan sejarah, pekembangan pelajar dan mahasiswa NU. Bedirinya PMII karena dipandang waktunya telah tiba dan kepentingan sangat mendesak untuk berdiri sebagai organisasi sendiri, berdirinya PMII bukan untuk menyaingi organisasi Islam yang lainnya.

Sudah alamiah bila kelahirann sesuatu yang baru itu melahirkan sikap pro dan kontra. Begitu juga kelahiran PMII, yang suka dia yang bijak dan mengerti posisi dan peranan yang harus diambil umat Islam dalam menyelesaikan revolusi nasional berdasarkan Pancasila. Sementara yang tak suka mereka yang mulut membela umat tapi dalam perbuatan mereka mereaksi umat. Macam-macam *intimidasi* (penyudutan) dan pertanyaan dilemparkan kemuka Pergerakan ini waktu itu.

Semisal, untuk apa PMII didirikan? Apa itu bukan pekerjaan *separatis*? Memecah belah persatuan mahasiswa Islam? Apa itu bukan suatu pekerjaan yang dibakar emosional tetapi tak realistis? Bukan mahasiswa itu cerdas dan bijaksana? Itu sebaiknya menjadi milik umat Islam saja, bukan tak perlu menjadi milik partai politik! Begitulah pertanyaan-pertanyaan waktu itu.

Menanggapi intimidasi seperti itu, PMII menjawab dengan cerdas dan tegas. Bahwa PMII berkata kepada mereka semua yang menentang berdirinya, yang mentololkan mahasiswa berpolitik dan berpartai merasa diganggu asyik mansyuknya memimpin umat. Bahwa anggapan dan pendirian mereka berbeda dengan PMII. Berdirinya PMII bukan untuk memecah belah umat Islam, akan tetapi adalah tuntutan sejarah dan melalui proses perkembangan sejarah NU. Organisasi yang mampu meresponi aspirasi dan kepentingan warga yang selama ini tak terpenuhi di organisasi lain yang ada.

PMII pun berpendirian bahwa mahasiswa harus lebih berpolitik dari siapapun, harus jelas dimana tempat tegaknya, harus berpartisipasi kongkret dengan kegiatan politik. Oleh karena itu politik menentukan hitam-putihnya perjalanan suatu bangsa. Baik dalam sikap maupun dalam kehidupan. Bisakah PMII lepas dari setting politik? Mungkin bias, tetapi serasa ada sesuatu yang hilang. Karena organisasi dan politik bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda tetapi keduanya saling melengkapi. Mahasiswa harus mempunyai sikap yang tegas, mahasiswa bukan juri dan bukan mandor dalam revolusi ini. Melainkan eksponen yang positif untuk Tuhan, Bangsa, dan Revolusi. Dengan berdiri di barisan NU di atas landasan Islam *Ahlu Sunnah Wal Jama"ah* berjalan terus berkembang dan memperkokoh diri. Lantas bagaimana peran politik PMII pasca Muktamar NU Situbodo 1984? Bagaimana politik mahasiswa kini?

1. **Independensi: *Free Stage Adventure***

Setelah PMII menjalani perhelakan akbar kurang lebih 12 tahun, menapaki perjuangannya PMII ditantang untuk mengambil sikap berani menentukan kebijakan,

urusan dan aturan rumah tangga sendiri, lepas dari keterkaitan NU sebagai induknya. Puncaknya pada Deklarasi Munarjati 1972 di Ciloto dikumandangkan *manifest independensi* PMII. Adapun ikhwal motivasi indepedensi ini:

a) Merupakan proses rekayasa PMII dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bertujuan agar eksistensi PMII diakui dalam skala nasional. Satu bukti usaha ini, lahirnya KNPI bersama kelompok Cipayung (KAMI, HMI, PMKRI, GMNI).

b) Mahasiswa sebagai insan akademis harus menentukan sikap. Ukurannya adalah objektifitas dalam menentukan ilmu, cinta kebenaran dan keadilan.
c) PMII merasa canggung jika melihat masalah nasional karena harus selalu melihat dan memperhatikan induknya.
d) Secara politis ada *bargaining* antara tokoh PMII (Said Budairi, M. Zamroni, Abdul Padare) dengan pemerintah (Ali Murtopo).
e) Untuk mengembangkan ideologi. Tahap baru memperjuangkan urusan sendiri. Sebab AD/ART (Asas Islam Aswaja) yang tidak lagi dibatasi secara formal oleh madzhab empat. Dengan demikian PMII bias berkembang di PT Umum/PT Agama.
f) Untuk mengembangkan sikap kreatif, keterbukaan dalam sikap dan dinamika Pergerakan.

2. Masa Interdependensi: Sebuah Pijakan Baru

Inilah keputusan ketetapan Kongres PMII ke-10 tahun 1991 di Jakarta yang mengembalikan PMII dari petualangan panjang. Kembali bergalut di haribaan. Dengan sikap independensi yang sudah berkibar sejak 1973 ternyata belum mampu membawa dan mengantarkan kemandirian PMII secara total. Dalam membangun memang tak pernah bisa lepas dari tiga aspek asas; 1. *Material Investment;* 2. *Human Skill Investment;* 3. *Moral*

Human Investment. Dan sementara ini semua selalu terikat dengan NU, maka keputusan inilah yang menjadikan lahirnya keputusan interdependensi. Interdependensi yang dimaksud adalah tetap menjadi organisasi di luar NU tapi memperjuangkan nilai-nilai dan tujuan NU.

C. MAKNA FILOSOFI PMII

Dari namanya PMII disusun dari 4 kata yaitu "Pergerakan", "Mahasiswa", "Islam", dan "Indonesia".

Makna **"Pergerakan"** yang terkandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan kontribusi positif pada alam sekitarnya. **"Pergerakan"** dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekholifahannya.

Pengertian **"Mahasiswa"** adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggungjawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggungjawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara.

"Islam" yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan atau paradigma *Ahlu Sunnah wal Jama"ah* yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara Iman, Islam dan Ihsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integrative. Islam terbuka, progresif dan transformative demikian *plat-form PMII*, yaitu **Islam yang terbuka, menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan**. Keberbedaan adalah suatu rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab *(civilized).*

Sedangkan pengertian **"Indonesia"** adalah Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi bangsa (Pancasila) serta UUD "45.

D. TUJUAN DIDIRIKANNYA PMII

Secara totalitas PMII sebagai suatu organisasi merupakan suatu gerakan yang bertujuan merubah kondisi sosial di Indonesia yang dinilai tidak adil, terutama dalam tatanan kehidupan sosial. Selain itu juga melestarikan perbedaan sebagai ajang dialog dan aktualisasi diri, menjunjung tinggi pluralitas, dan menghormati kedaulatan masing-masing kelompok dan individu.

Dalam lingkup yang lebih kecil PMII mencoba menciptakan kader yang memiliki pandangan yang luas dalam menghadapi realita sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Memiliki pemahaman yang komprehensif tentang berbagai macam paham pemikiran yang digunakan dalam menganalisa realitas yang ada, sehingga diharapkan seorang kader akan mampu memposisikan diri secara kritis dan tidak terhegemoni oleh suatu paham atau ideologi yang dogmatis.

E. LANDASAN TEOLOGIS DAN FILOSOFIS PMII

Landasan filosofis dan teologis PMII sebenarnya tergali dalam rumusan NDP (Nilai Dasar Pergerakan) dan turunannya ke bawah. Artinya bahwa NDP dibangun atas dasar dua sublimasi besar yaitu ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an.

Sublimasi ke-Islam-an berpijak dari kerangka paradigmatic bahwa Islam memiliki kerangka besar yang universal, transendental, trans-historis dan bahkan trans-personal. Universalisme atau fariasi-fariasi identitas Islam lainnya yang dimaksud bermuara pada satu gagasan besar, bagaimana membangun masyarakat yang berkeadilan.

Namun, harus disadari bahwa sungguhpun Islam memiliki universalisme atau yang lainnya, ia pun juga menampakkan diri sebagai entitas dengan identitas sangat cultural, antropologis, historis, sosiologis, dan bahkan politis.

Dua gambaran tentang Islam yang paradoks – atau minimal kontra produktif dan bahkan saling *berbinary opposition* – menghadapkan *believer* pada tingkat minimal untuk melakukan *human exercise* bagaimana Islam dalam identitas besar, *Rahmatan Lil Alamain.*

Dari sini, mengharuskan PMII untuk mengambil inisiatif dengan menempatkan Islam sebagai suatu sublimasi identitas kelembagaan. Ini berarti, PMII menempatkan Islam sebagai landasan teologis untuk dengan tetap meyakini universalitas, trans-historis, dan bahkan trans-personalnya. Lebih dari itu, keyakinan teologis tersebut tidak semata-mata ditempatkan sebagai landasan normatifnya, melainkan disertai upaya bagaimana Islam teologis itu mampu menunjukkan dirinya dalam dunia riil. Ini berarti, PMII akan selalu menempatkan Islam sebagai landasan normative yang akan selalu hadir dalam setiap gerakan-gerakan sosial dan keagamaan yang dimilikinya. Selain itu PMII sebagai konstruksi besar juga begitu menyadari bahwa ia tidaklah hadir dalam ruang hampa, kosong, berada di awang-awang, dan jauh dari latar sosial bahkan politik. Tetapi, ia justru hadir dan berdiam diri dalam satu ruang identitas besar, Indonesia dengan berbagai kemajemukan watak kulturalnya, sosiologis, dan hingga antropologis. Oleh karena itu, identitas diri yang tak terpisahkan dengan identitas besar Indonesia mengharuskan PMII selalu menempatkan identitas besar itu menjadi salah satu sublimasi selain ke-Islam-an.

Penempatan itu berarti menempatkan PMII sebagai institusi besar yang harus melakukan pembacaan terhadap lingkungan besarnya, “Indonesia”. Hal ini dalam rangka membangun aksi-aksi social, kemasyarakatan, dan kebangsaan yang selalu relevan, realistik, dan transformatik.

Dua penjelasan kaitannya dengan landasan sublimatik PMII di atas, dapat ditarik ke dalam konstruksi besar bahwa PMII dalam setiap gerakan dan institusionalnya tetap menghadirkan identitas teologisnya, identitas Islam. Tetapi, lebih dari itu, landasan teologis Islam justru dihadirkan bukan hanya sebatas dalam bentuk pengaminan secara verbal dan

normative, melainkan bagaimana landasan teologis ini menjadi *transformable* dalam setiap gerakan dan aksi-aksi institusionalnya. Dengan begitu, mau tidak mau PMII harus mempertimbangkan tempat dimana ia lahir, berkembang, dan melakukan eksistensi diri, tepatnya ruang ke-Indonesia-an. Yang berarti, secara kelembagaan PMII harus selalu mempertimbangkan gambaran utuh konstruksi besar Indonesia dalam membangun setiap aksi-aksi kelembagaannya.

Endingnya, proses yang rumit transformasi landasan teologis Islam dan konstruksi besar ke-Indonesia-an sebagai medium pembacaan objektifnya, maka akan muncul citra diri kader atau citra diri institusi yang ulil albab. Citra diri yang tidak hanya semata-mata menampilkan diri secara personal sebagai manusia yang beriman yang normative dan verbal, melainkan juga sebagai *believer* kreatif dan membumi kontekstual. Citra diri personal ini secara langsung akan mewujudkan PMII secara kelembagaan sebagai entitas besar yang juga ulil albab.

F. IDENTITAS DAN CITRA DIRI PMII

Pada hakikatnya identitas ini ditujukan bagi individu yang telah memenuhi kualitas-kualitas tertentu. Seperti apakah mereka? Jawabannya dapat kita simak dalam Tujuan PMII. Tujuan PMII menegaskan bahwa PMII didirikan untuk membentuk sebuah *pribadi* yang dengan segala kapasitas pribadinya yang terasah, kemudian mengarahkan semua kualitas pribadinya bagi kepentingan *masyarakat* dan *bangsa*. Seperti tertuang dalam BAB IV AD PMII, bahwa identitas PMII adalah:

1. Bertaqwa kepada Allah SWT,
2. Berbud Luhur,
3. Berilmu,
4. Cakap,
5. Bertanggung jawab mengamalkan ilmunya, dan
6. Komitmen memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan Indonesia

PMII memproyeksikan pengkaderannya untuk meraih 6 (enam) kualitas di atas. Lalu apa nama pendek bagi 6 (enam) kualitas di atas? Atau, apa nama pendek bagi *"pribadi Muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia"*? Nama pendek itu adalah ***Kader Ulul Albab***. Dengan kata lain, ketika kita menyebut *Kader Ulul Albab*, pada saat yang sama kita tengah meresapi 6 (enam) kualitas kader PMII di atas. Itulah yang disebut sebagai citra diri atau PROFIL/IDENTITAS KADER PMII.

Namun nama itu memiliki kandungan yang lebih dalam dan luas dari 6 (enam) kualitas di atas. Kedalaman itu dapat difahami dan direnungkan di ayat-ayat darimana sumber nama itu berasal. Maka untuk mencapai kualitas di atas, setiap individu Anggota PMII wajib memahami dan merenungkan 15 rangkaian Ayat Suci Al-Qur"an yang menjelaskan dan mengilustrasikan bagaimanakah *Kader Ulul Albab* itu.

Ayat-Ayat yang mengandung nama *Ulul Albab* adalah sebagai berikut:

Q.S.Al-Baqarah (2: 197)	Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Dan bertaqwalah kepada-Ku wahai **Ulul Albab**!
Q.S.Al-Baqarah (2: 269)	Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia Kehendaki. Barang siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh-sungguh ia telah dilimpahi karunia yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali **Ulul Albab**.
Q.S. Ali-Imran (3: 190, 191)	Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi **Ulul** mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan

	mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari adzab neraka".
Q.S. Al-Mai'dah (5: 99, 100)	Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan (amanat Allah), dan Allah Mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Katakanlah (Muhammad), "Tidaklah sama (antara) yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertaqwalah kepada Allah wahai **Ulul Albab**."
Q.S. Al-Ra'du (13: 19, 20)	Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang Diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya **Ulul Albab** saja yang dapat mengambil pelajaran, (yaitu) orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
Q.S. Ibrahim (14: 52)	(Al Qur"an) ini adalah penjelasan (yang sempurna) bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar **Ulul Albab** mengambil pelajaran.
Q.S. Shaad (38: 29)	Kitab (Al Qur"an) yang Kami Turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar **Ulul Albab** mendapat pelajaran.
Q.S. Shaad (38: 43)	Dan Kami Anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan Kami Lipatgandakan jumlah mereka, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi **Ulul Albab**.

Q.S. Az-Zumar (39: 9)	(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sebenarnya hanya **Ulul Albab** yang dapat menerima pelajaran.
Q.S. Az-Zumar (39: 21)	Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkan-Nya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian Dijadikan-Nya hancur berderai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi **Ulul Albab**.
Q.S. Al-Mu'min (40: 53, 54, 55)	Dan sungguh, Kami telah Memberikan petunjuk kepada Musa; dan Mewariskan Kitab (Taurat) kepada Bani Israil, untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi **Ulul Albab**. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhan-mu pada waktu petang dan pagi.

Dari ayat-ayat di atas dapat ditangkap beberapa gambaran tentang manusia *Ulul Albab* sebagai berikut:

1. Manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT

Manusia yang bertaqwa kepada Allah tidak memiliki rasa takut kepada selain-Nya. Maka dalam pikiran, perasaan dan tindakan, manusia yang bertaqwa sesungguhnya merdeka dari rasa takut. Satu-satunya yang ia takuti hanya Allah. Rasa

takut muncul karena khawatir melanggar Kehendak-Nya (*Q.S. Al-Baqarah:179, 197, Al-Maidah:99-100, At-Talaq:8, 9, 10, 11)*.

2. *Manusia yang beriman*

Manusia yang beriman tidak memiliki keraguan dan memelihara kebingungan dalam berproses dan hidup sehari-hari. Keyakinannya terhadap Allah SWT mengatasi keraguan yang membiaskan pandangannya dari kenyataan dan tantangan duniawi. Maka dalam pikiran, perasaan dan tindakan, manusia yang beriman sesungguhnya merdeka dari rasa ragu. Satu-satunya keraguan adalah keraguan apakah pikiran, perasaan dan tindakannya telah melanggar Keyakinannya kepada Allah SWT. *(Q.S. At-Talaq:8, 9, 10, 11).*

3. *Manusia yang selalu mengingat Allah SWT di setiap saat* Yakni manusia yang menjadikan dzikir sebagai nafas sehari-harinya. Mengingat Allah SWT adalah mengakui dan mengikatkan diri pada Keabadian, kepada Yang Maha Kuasa, dan kepada Yang Maha Menciptakan. Keterikatan hati manusia semacam itu adalah hanya kepadaNya. Bukan kepada apa yang ia duduki dan yang ia inginkan. Maka tidak ada rasa kehilangan apabila perubahan memaksanya untuk bergeser, dan tidak ada rasa ragu apabila perubahan memintanya untuk bertindak. (*Q.S. Ali-Imran:190, 191).*

4. *Manusia yang setia dengan Janji Allah SWT dan tidak melanggar perjanjian dengan-Nya*

Manusia yang setia dengan Janji Allah SWT dan tidak melanggar perjanjian denganNya adalah manusia yang hanya berharap dan meminta kepadaNya. Sementara dia melakukan secara total apa yang dia harus lakukan sebagai manusia, sebagai hamba *(„abdullah)* sekaligus sebagai khalifah *(khalifatullah)*, ia melepaskan harapan dan ketergantungan dari apa yang dia lakukan. Semua kembali diserahkan kepadaNya. Maka manusia yang setia tidak merasa kecewa atas urusan duniawi dan senantiasa menatap kenyataan dengan optimis. *(Q.S. Al-Ra"du:19 – 20).*

5. *Manusia yang mengambil pelajaran dari sejarah umat manusia, perjalanan alam semesta dan dari ayat-ayatNya*

Manusia yang mengambil pelajaran ialah manusia yang menatap kenyataan secara kompleks, secara keseluruhan, secara komprehensif. Ia membaca bagaimana bangsa-bangsa terdahulu tumbang dan berdiri dan mengambil pelajaran dari itu. Ia juga mengamati bagaimana semesta berjalan, menjalankan hukum-hukumNya yang berlaku pula bagi manusia dan mengambil hikmah dari semua itu. Manusia semacam itu peka dan tidak berhenti dalam memahami apa yang disampaikanNya dalam Kitab Suci dan pada alam semesta. Manusia yang mengambil pelajaran senantiasa hati-hati dan awas terhadap kenyataan, sebagai panduan mereka untuk menjalani kehidupan. (Q*.S. al-Baqarah:269, Ali-Imran:7-8, Al-Ra"du:19-20, Ibrahim:52, Shaad:29, Shaad:43, Az-Zumar:9, Az-Zumar:21, Al-Mu"min:53-55).*

Dari ayat-ayat di atas dan penjabarannya dalam lima butir tersebut tergambar bahwa *Kader Ulul Albab* bukanlah sosok pasif yang menyerah pada keadaan. Ia juga bukan sosok yang akan berpikir dan bertindak dengan sembarangan. Iman-Taqwa dan pengetahuan mutlak dimiliki *Kader Ulul Albab*. Dari keduanya, *Kader Ulul Albab* dituntut untuk menguasai kemampuan khusus, cakap dan terampil, sehingga dia mampu menjalankan peran dan tugasnya sebagai manusia di tengah kenyataan bangsanya.

G. SEPUTAR IDEOLOGI PMII

Pada paruh kedua abad kemarin dan gaungnya hingga hari ini digarahi oleh kelompok intelektual „*kiri*" Eropa yang mendasari *New-Left Movement* yang terkenal itu, sebut saja; kelompok Madzhab Frankturt, TW Adorno, Jugen Habermas bahwa perdebatan mengenai ideologi masih mempunyai ruang, terlebih ideology menuai kritik dan evaluasi terhadapnya. Kritik itu seputar perannya, sebagai „wadah" atau „tempat" kebenaran atau bahkan sebagai „sumber" kebenaran itu sendiri, yang di satu sisi dinilai sebagai pencerah umat tetapi di sisi lain sebagai alat *hegemoni* umat.

Ideologi memang dianggap sebagai landasan kebenaran yang paling *fundamental* (mendasar) maka dari itu tidak terlalu

salah bila disebut sumber kebenaran sebagai ruh dari operasi praksis kehidupan. Tetapi dalam prosesnya kemudian ideology „ada‟ tidak bebas dari kepentingan-prinsip pengadaan; sesuatu materi diciptakan/diadakan pasti punya dari maksud dan tujuan, ironisnya kepentingan yang ada awalnya untuk kebaikan sesama tanpa ada pengistimewaan/pengklasifikasian kemudian berubah menjadi milik segolongan tertentu. Hasilnya ideologi menjadi tameng kebenaran umat tertentu, digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak selayaknya, tujuan „hanya kekuasaan‟ misalnya. Maka dalam konteks ini ideologi mendapat serangan habis-habisan. Tanpa bermaksud memutus perdebatan sosiologi pengetahuan seperti di atas. Ideologi akan tetap memiliki umat, ideologi masih memiliki pengikut tatkala ia masih rasional masih kontekstual tidak pilih kasih (diskrimatif) tidak menindas sehingga layak dijadikan sumber kebenaran, ketika peran itu masih melekat niscaya ideologi masih diperlukan.

Dibawa dalam ranah PMII, ideologi PMII digali dari sumbernya yang ada pada pembicaraan sebelumnya disebut sebagai identitas PMII yaitu ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an. Sublimasi atau perpaduan antara dua unsur di atas menjadi rumusan materi yang terkandung dalam NDP (Nilai Dasar Pergerakan) PMII, semacam qonum azasi di PMII atau itu tadi yang disebut Ideologi. NDP berisi rumusan ketauhidan, penyakinan, kita terhadap Tuhan. Bentuk pengyakinan itu terletak dari pola relasi/hubungan antar komponen di alam ini, pola antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara Tuhan dan Manusia, antar Manusia dan antara Manusia dengan sekelilingnya.

H. ARTI LAMBANG DAN BENDERA PMII

1. Lambang PMII

Pencipta lambang PMII : H. Said Budairi

a. Makna lambang PMII

1) Bentuk

a) *Perisai* berarti ketahanan dan keampuhan mahasiswa Islam

terhadap berbagai tantangan dan pengaruh dari luar.

b) *Bintang* adalah perlambang ketinggian dan semangat cita-cita yang selalu memancar.

c) *Lima bintang* sebelah atas melambangkan Rosulullah SAW dengan empat Sahabat yang terkemuka (Khulafa Al-Rasyidin).

d) Empat bintang sebelah bawah menggambarkan empat madzhab yang berhaluan *Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jama"ah.*

e) *Sembilan bintang secara keseluruhan* bisa berarti :

- Rosullullah SAW dengan empat orang sahabatnya serta empat orang imam madzhab itu laksana bintang yang selalu bersinar cemerlang, memiliki kedudukan yang tinggi dan penerang umat manusia.
- Sembilan bintang juga menggambarkan Sembilan orang pemuka penyebar Agam Islam di Indonesia yang disebut dengan *Wali Sanga*.

2) Warna

a) *Biru*, sebagaimana tulisan PMII, berarti kedalaman Ilmu Pengetahuan yang harus dimiliki dan harus digali oleh warga Pergerakan, Biru juga menggambarkan lautan Indonesia dan merupakan kesatuan Wawasan Nusantara.

b) *Biru Muda*, sebagaimana dasar perisai sebelah bawah berarti ketinggian Ilmu Pengetahuan, budi pekerti dan taqwa.

c) *Kuning*, sebagaimana perisai sebelah atas berarti identitas mahasiswa yang menjadi sifat dasar Pergerakan, lambang kebesaran dan semangat yang selalu menyala serta penuh harapan menyongsong masa depan.

b. Penggunaan

1) Lambang PMII digunakan pada papan nama, bendera, kop surat, stempel, badge, jaket, kartu anggota, dan benda atau tempat lain yang tujuannya untuk menunjukkan identitas organisasi.
2) Ukuran lambang PMII disesuaikan dengan wadah penggunaannya.

2. Bendera PMII

a. Pencipta bendera PMII adalah **Shaimory**
b. Ukuran bendera PMII: panjang dan lebar (4X3)
c. Warna dasar bendera PMII adalah kuning
d. Isi bendera PMII adalah antara lain:
   1) Lambang PMII yang terletak di bagian tengah
   2) Tulisan PMII yang terletak di sebelah kiri lambang membujur ke bawah.
e. Bendera PMII biasa digunakan pada upacara-upcara resmi organisasi baik intern maupun ekstern dan upacara nasional.

I. POSISI STRATEGIS PMII

Menurut Abdurrohman Wahid (Gus Dur) ada delapan kelompok strategis yang mampu mempengaruhi proses perjalanan bangsa, yaitu: ABRI (sekarang TNI dan Polri), Birokrasi, Orpol, Ormas, LSM, Pengusaha, Pers, dan Intelektual Kampus. Post-post itulah yang harus dicermati dan berani mengambil keputusan *"outsward looking"* (tak sekedar memikirkan persoalan intern organisasi). Dari arah sinilah nantinya kader PMII tak terjebak dalam ekslusivisme, tetapi lebih mampu bersikap inklusif dan mau bertempat dimana saja yang bisa memberikan kemungkinan tumbuh dengan baik. Disinilah pentingnya post-post itu, sehingga kader-kader PMII diorientasikan ke arah sana. Pada akhirnya kader tak terjebak pada masalah ke-Ormas-an saja.

Beberapa gambaran Aktifis PMII dalam konstalasi politik dapat dilihat sebagai beriktut:

1. Mahbub junaidi, Mantan Ketua PMII periode pertama, karirnya pernah menjadi ketua umum PWI, Pimpinan Harian Duta Masyarakat, Anggota DPR/MPR 1971-1982, Anggota DPR-GR 1967-1971, Sekjen DPP PPP, PBNU dan lain-lain.
2. Zamroni, Mantan Ketua periode 1967-1970. Pernah menjadi Anggota DPR-GR 1967-1971, DPR-RI 1971-1987, Ketua I DPP PPP, Wakil Sekjen PBNU dll.
3. Abduh Padare, Mantan Ketua PMII, pernah menjadi Anggota MPR 1977-1982, DPR-PR 1983-1987, Wakil Sekjen DPP PPP dll.
4. Tokoh-tokoh yang merintis karir konglomerat antara lain: Muhyidin Arubusman, Surya Darma Ali, Ahmad Bagja, dll.
5. Tokoh-tokoh kampus dari UI antara lain: Dr. Fahmi Syarifudin, M.Ph; Rosyid Munir, Sc, M. Sc (Ahli Demografi), Bakhrawi Sanusi SE (Pengamat Minyak); Dr. Tubagus Roni Nitibaskara (Pakar Santet). Dari UGM antara lain: Dr, Miftah Toha (Pakar Politik), Fajrul Falah, SH, MH (Pakar Hukum). Dari UNHAS antara lain : Dr. Sinansari Ecip (Pakar Pers) Ketua Pemred Republika. Dari UNPAD antra lain: Prof. Dr. Cecep Syarifudin (Pakar Politik Luar Negeri). Dari UNAIR antara lain: Dr. Abu Amar (Pakar Kesehatan Laut), Kacun Marijan (Pakar Politik Muda).
6. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), antara lain: MM, Billah, Masdar Farid, Masudi, Nasihan, Hasan, Said Budairi, Arif Mudasir, Enceng Sobirin, dll.
7. Di legislatif kader PMII tak diragukan lagi, antara lain: di FKP : Dr. Saihul Hadi Permono, Dr. Bisri Afandi, dan Drs. Slamet Efendi Yusuf. Di PKB, PDI P muncul dan PPP tak terhitung jumlahnya. Sebut saja Matori Abdul Jalil, Hamzah Haz, Sulaiman Fadli, Muhaimin Iskandar, Nadli; Muhammad, MA dan Dr. Muchsin, SH .
8. Adapula nama-nama Dokter hewan : Ikbal Asegaf, Ali Maksur, dan Sida Rohman.

9. Saat ini di Pemerintahannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdapat nama-nama kader PMII sebut saja: Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), Marwan Ja"far (Menteri PDT dan Transmigrasi), M. Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Prof. M. Natsir (Menteri Ristek dan Dikti), dan H. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama).

Itu sekilas gambaran tokoh-tokoh yang berhasil menempati posisi-posisi strategis. Hal ini bisa lebih jika PMII ingin memperjuangkannya. Hanya saja, kita juga harus sabar menunggu kemunculan mereka yang lain ke permukaan karena belum ada kesempatan mengingat usia PMII masih 54 tahun. Masih cukup muda untuk ukuran mencetak kader runtutan kader yang superior. Persoalan sekarang, apakah kader PMII sanggup bersaing memegang peran dalam 9 pos strategis dimasa-masa yang akan datang? jawabannya, meyakinkan "bisa". Persoalan tergantung mulai hari ini, **sanggupkah kita berbuat banyak?.**

ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

ANGGARAN DASAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
MUKADDIMAH

Insyaf dan sadar bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan idiologi negara dan falsafah bangsa Indonesia. Sadar dan yakin bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat sekalian alam. Suatu keharusan bagi umatnya mengejawantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan masyarakat dunia.

Bahwa keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia dan atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorang maupun bersama – sama.

Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertangungjawab mengemban komitmen keislaman dan keindonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spritual maupun material dalam segala bentuk.

Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunah Wal Jama"ah dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disingkat PMII.

2. PMII didirikan di Surabaya pada tanggal 21 Syawal 1379 Hijriyah, bertepatan dengan 17 April 1960 dengan jangka waktu yang tidak yang tidak terbatas.
3. PMII berpusat di Ibukota Republik Indonesia.

BAB II
ASAS
Pasal 2

PMII Berasaskan Pancasila

BAB III
SIFAT
Pasal 3

PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independen dan professional.

BAB IV
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 4
Tujuan

Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pasal 5
Usaha

1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam Indonesia sesuai dengan sifat dan tujuan PMII serta peraturan perundang-undangan dan paradigma PMII yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta mewujudkan pribadi insan ulul albab.

BAB V
ANGGOTA DAN KADER
Pasal 6

1. Anggota PMII

2. Kader PMII

BAB VI
SISTEM KADERISASI
Pasal 7

Kaderisasi PMII terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Kaderisasi Formal;
2. Kaderisasi Non Formal; dan
3. Kaderisasi Informal
4. Keterangan lebih lanjut terkait ayat 1, 2 dan 3 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 8
SKEMA PENGEMBANGAN KADERISASI Skema Pengembangan kaderisasi disesuaikan dengan kebutuhan, tuntutan dan perkembangan zaman.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9

Struktur Organisasi PMII terdiri dari:

1. Pengurus Besar (PB)
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC)
3. Pengurus Cabang (PC)
4. Pengurus Komisariat (PK)
5. Pengurus Rayon (PR)

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 10

Permusyawaratan dalam Organisasi ini terdiri dari:

1. Kongres
2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
4. Rapat Pleno Lengkap
5. Rapat Pleno BPH PB PMII
6. Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab)
7. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)

8. Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
9. Rapat Pleno BPH PKC PMII
10. Konferensi Cabang (Konfercab)
11. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)
12. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
13. Rapat Pleno BPH PC PMII
14. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
15. Rapat Pleno BPH PK PMII
16. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
17. Rapat Pleno BPH PR PMII
18. Kongres Luar Biasa (KLB)
19. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkorcab-LB)
20. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB)
21. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB)
22. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB)

BAB IX
PENGEMBANGAN PMII PUTERI
Pasal 11

1. Pengembangan PMII Puteri diwujudkan dengan pembentukan wadah perempuan yaitu Korps PMII Puteri yang selanjutnya disingkat KOPRI
2. KOPRI adalah wadah perempuan yang didirikan oleh kader puteri PMII melalui kelompok kerja sebagai keputusan Kongres PMII XIV
3. KOPRI didirikan pada tanggal 25 november 1967
4. KOPRI berstatus badan semi otonom pada setiap level kepengurusan PMII
5. Kopri wajib mengikuti Kaderisasi Formal yang ada di PMII, selain kaderisasi formal yang ada di KOPRI
6. Kopri wajib mengikuti forum permusyawaratan yang ada di PMII
7. Pengaturan lebih lanjut tentang KOPRI diatur dalam Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI

BAB X
PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 12

Anggaran dasar ini dapat dirubah oleh Kongres dengan dukungan sekurang – kurangnya 2/3 suara yang hadir.

Pasal 13

1. Apabila PMII terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan kongres atau referendum yang khususnya diadakan untuk itu, maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi yang lain yang asas dan tujuannya tidak bertentangan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan – peraturan organisasi lainnya.

Wallahul Muwafieq Ila Aqwamith Thorieq

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 22 Mei 2017

PIMPINAN SIDANG KONGRES XIX PALU

Hidayat Syahputra
Ketua

Sehan Hanubun
Wakil Ketua

Ali Akbar
Sekretaris

PENJELASAN ANGGARAN DASAR

A. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai hukum dasar organisasi. Anggaran Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan organisasi.

B. Pokok pikiran dalam pembukaan

Organisasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia mengakui adanya ideologi dan falsafah hidup bangsa yang terumuskan dalam Pancasila.

Sebagai organisasi yang menganut nilai keislaman, yang senantiasa menjadikan Islam sebagai panduan dan sekaligus menyebarkan dan mengejawantahkan kedalam pribadi masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa nilai keindonesiaan dan keislaman merupakan panduan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, maka kewajiban bagi setiap orang adalah mempertahankannya dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara pribadi maupun bersama-sama.

Sebagai organisasi yang mengemban misi perubahan dan intelektual, Mahasiswa Islam wajib bertanggungjawab membebaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan keterpurukan kepada kemajuan, kemakmuran dan keadilan.

Kewajiban dan tanggungjawab keislaman, keindonesiaan dan intelektual menginspirasikan terbentuknya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai organisasi Mahasiswa Islam yang berhaluan Ahlusunnah Wal Jama"ah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

1. Keislaman adalah nilai-nilai Islam Ahlusunnah Wal Jama"ah.

2. Kemahasiswaan adalah sifat yang dimiliki mahasiswa, yaitu idealisme, perubahan, komitmen, kepedulian sosial dan kecintaan pada hal yang bersifat positif.
3. Kebangsaan adalah nilai-nilai yang bersumber dari kultur, filosofi, sosiologi dan yuridis bangsa Indonesia.
4. Kemasyarakatan adalah bersifat include dan menyatu dengan masyarakat bergerak dari dan untuk masyarakat.
5. Independen adalah berdiri secara mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, baik secara perorangan maupun kelompok.
6. Profesional adalah distribusi tugas dan wewenang sesuai dengan bakat, minat kemampuan dan keilmuan masing-masing.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

(2) Pribadi ulul albab adalah seseorang yang selalu haus akan ilmu, dengan senantiasa berdzikir kepada Allah SWT, berkesadaran historis primodial atas relasi Tuhan-manusia-alam, berjiwa optimis transendental sebagai kemampuan untuk mengatasi masalah kehidupan, berpikir dialektis, bersikap kritis dan bertindak transformatif.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan badan semi otonom adalah badan tersendiri yang dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan PMII yang menangani persoalan perempuan di PMII dan issu perempuan secara umum serta bertanggung jawab kepada Forum Tertinggi pada setiap level kepengurusan.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
ATRIBUT
Pasal 1

1. Lambang PMII, bendera, mars dan hymne
2. Untuk lebih jelas mengenai atribut diatur dalam peraturan organisasi

BAB II
Usaha
Pasal 2

1. Melakukan dan meningkatkan amar ma‟ruf nahi munkar.
2. Mempertinggi mutu ilmu pengetahuan Islam dan IPTEK.
3. Meningkatkan kwalitas kehidupan umat manusia dan umat Islam melalui kontekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.
4. Meningkatkan usaha-usaha dan kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia, umat Islam dan mahasiswa serta usaha sosial kemasyarakatan.
5. Mempererat hubungan dengan ulama dan umara demi terciptanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah insaniyah.
6. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, pengalaman dan pengamalan Pancasila secara kreatif dan bertanggung jawab.

BAB III
KEANGGOTAAN
Bagian 1
Anggota
Pasal 3

1. Anggota adalah:

a. Mahasiswa Islam yang tercatat sebagai mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dan atau yang sederajat dan telah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba).
b. Mahasiswa islam yang telah menyelesaikan program studi pada perguruan tinggi dan atau yang sederajat, dan belum melampaui jangka 3 (tiga) tahun.
c. Anggota yang dimaksud pada poin (a) dan (b) belum melampaui usia 35 tahun.

2. Kader adalah anggota yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan Follow Up nya

Bagian II
Penerimaan Anggota
Pasal 4

1. Calon anggota mengajukan permintaan secara tertulis atau mengisi formulir untuk menjadi calon anggota PMII kepada panitia pelaksana MAPABA.
2. Seseorang sah menjadi anggota PMII setelah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) dan mengucapkan Bai"at persetujuan dalam suatu acara pelantikan.
3. Apabila syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas dipenuhi, kepada anggota tersebut berhak diberikan tanda anggota oleh Pengurus Cabang.
4. Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa sertifikat, kartu anggota atau label sebagai kader mu"taqid.

Pasal 5

Jenjang Pengkaderan dilakukan dengan cara:

1. Calon kader mengajukan permintaan tertulis atau mengisi formulir kepada pengurus cabang dan atau panitia pelaksana PKD.
2. Seseorang telah sah menjadi kader apabila dinyatakan Lulus mengikuti PKD dan diikuti pernyataan bai"at.

Bagian III
Masa Keanggotaan
Pasal 6

1. Anggota berakhir masa keanggotaan:
   a. Meninggal dunia
   b. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang.
   c. Diberhentikan sebagai anggota, baik secara terhormat maupun secara tidak terhormat.
   d. Telah selesai masa keanggotaannya sebagai anggota sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) ART ini.
2. Bentuk dan tata cara pemberhentian anggota, diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).
3. Anggota yang telah selesai masa keanggotaannya pada saat masih menjabat sebagai pengurus diperpanjang masa keanggotaannya hingga berakhirnya masa kepengurusan.
4. Anggota yang telah selesai masa keanggotaannya disebut alumni PMII.
5. Hubungan anggota dengan alumni PMII adalah hubungan historis, kekeluargaan dan kesetaraan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 7

Hak Anggota:
Anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat perlindungan dan pembelaan serta pengampunan. Kewajiban Anggota:

1. Membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Cabang.
2. Mematuhi AD/ART, NDP, paradigma pergerakan serta produk hukum organisasi lainnya.
3. Menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik Islam, negara dan organisasi.

Pasal 8

Hak Kader:

1. Berhak memilih dan dipilih.
2. Berhak mendapat pendidikan dan kebebasan

berpendapat, perlindungan dan pembelaan serta pengampunan.

Kewajiban Kader:

1. Melakukan dinamisasi organisasi dan masyarakat melalui gerakan pemikiran dan rekayasa sosial secara sehat dan mulia.

Perangkapan Keanggotaan dan Kepengurusan Pasal 9

1. Anggota dan kader tidak dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi mahasiswa lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan PMII.
2. Pengurus PMII tidak dapat merangkap sebagai pengurus pada partai politik, calon Anggota Legislatif, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Calon presiden/Wakil Presiden, calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Bupati /Wakil Bupati dan atau Calon Walikota/Wakil Walikota.

Penghargaan dan Sanksi Organisasi Pasal 10

Penghargaan

1. Penghargaan organisasi dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan atau mengangkat citra dan mengharumkan nama organisasi.
2. Bentuk dan tata cara penganugrahan dan penghargaan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 11

Sanksi Organisasi

1. Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota karena: Melanggar ketentuan AD/ART serta peraturan-peraturan PMII dan mencemarkan nama baik organisasi.
2. Sanksi yang diberikan pada anggota berbentuk scorsing atau pemberhentian keanggotaan.
3. Anggota yang diberi sanksi organisasi dapat mengajukan banding atau pembelaan dalam suatu mekanisme organisasi yang ditentukan.
4. Tata cara dan mekanisme banding diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V
POLA KADERISASI

Bagian I
Kaderisasi Formal
Pasal 12

1. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang wajib dilaksanakan oleh setiap struktur kepengurusan.
2. Tahapan Kaderisasi Formal:
   a. MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru)
   b. PKD (Pelatihan Kader Dasar)
   c. PKL (Pelatihan Kader Lanjut)
   d. PKN (Pelatihan Kader Nasional)
3. MAPABA adalah kaderisasi formal tahap pertama yang diselenggarakan oleh Pengurus Rayon dan/ Pengurus Komisariat
4. PKD adalah kaderisasi formal tahap kedua yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat dan/ Pengurus Rayon
5. PKL adalah kaderisasi formal tahap ketiga yang diselenggarakan oleh Pengurus Koordinator Cabang dan atau Pengurus Cabang
6. PKN adalah kaderisasi formal tahap akhir yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar
7. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi formal ini diatur dalam PO, Tap Pleno dan atau Peraturan PMII Lainnya.

Bagian II
Kaderisasi Non-formal
Pasal 13

1. Kaderisasi Non-formal adalah kaderisasi yang dilakukan sebagai kelanjutan kaderisasi formal guna mendorong mengembangkan potensi kader berbasis soft-skill.
2. Kaderisasi Non-Formal dapat dilakukan oleh:
   a. Pengurus Rayon
   b. Pengurus Komisariat
   c. Pengurus Cabang
   d. Pengurus Koordinator Cabang; dan
   e. Pengurus Besar

3. Ketentuan Lebih lanjut terkait kaderisasi Non-Formal ini, dikatur dalam PO, Tap Pleno dan atau Peraturan PMII Lainnya.

Bagian III
Kaderisasi Informal
Pasal 14

1. Kaderisasi Informal adalah kaderisasi yang dilakukan sebagai kelanjutan kaderisasi formal, bisa beriringan dengan kaderisasi nonformal bisa juga terpisah.
2. Kaderisasi Informal bersifat khusus, berbasis hobby, minat bakat dan profesi
3. Kaderisasi Informal dapat dilakukan oleh:
   a. Pengurus Rayon
   b. Pengurus Komisariat
   c. Pengurus Cabang
   d. Pengurus Koordinator Cabang; dan
   e. Pengurus Besar
4. Ketentuan Lebih lanjut terkait kaderisasi Informal ini, diatur dalam PO, Tap Pleno dan atau Peraturan PMII Lainnya.

BAB IV
Jenjang Kaderisasi Formal
Pasal 15

Jenjang Kaderisasi Formal, yaitu:

1. MAPABA
   a. Alumni Mapaba bersertifikat berhak mengikuti follow up Mapaba sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh rayon atau Komisariat
   b. Hanya alumni Mapaba yang telah mengikuti follow up yang berhak mengikuti PKD
2. PKD
   a. Alumni PKD bersertifikat berhak mengikuti follow up Mapaba sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta

kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh Rayon, Komisariat dan atau Cabang.
   b. Hanya alumni PKD yang telah mengikuti follow up yang berhak mengikuti PKL.
3. PKL
   a. Alumni PKL bersertifikat berhak mengikuti follow up Mapaba sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh Cabang atau Koorcab.

   b. Hanya alumni PKL yang telah mengikuti follow up yang berhak mengikuti PKN.
4. PKN
   a. Alumni PKN bersertifikat berhak mengikuti follow up Mapaba sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh PB PMII
   b. Hanya alumni PKN yang telah mengikuti follow up dan di sertifikasi sebagai instruktur di PKL yang berhak mengikuti agenda-agenda strategis dan tertutup yang dilaksanakan oleh PB
5. Ketentuan Lebih lanjut terkait kaderisasi NonFormal ini, dikatur dalam PO, Tap Pleno dan atau Peraturan PMII Lainnya.

Bagian V
Skema Pengembangan Kaderisasi
Pasal 16

1. Skema Pengembangan kaderisasi berorientasi pada pengembangan PMII di kampus – kampus, fakultas – fakultas dan jurusan – jurusan yang minim PMII nya
2. Kaderisasi lebih lanjut terkait pengembangan kaderisasi ini diatur dalam PO, Tap pleno dan atau Peraturan PMII lainnya.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
SUSUNAN PENGURUS, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian I

Struktur Organisasi
Pasal 17

Struktur Organisasi PMII adalah:
1. Pengurus Besar (PB)
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC)
3. Pengurus Cabang (PC)
4. Pengurus Komisariat (PK)
5. Pengurus Rayon (PR)

Bagian II
Susunan, Tugas, Wewenang dan Persyaratan Pengurus
Pasal 18
Pengurus Besar

1. Pengurus Besar adalah pimpinan tertinggi PMII pengemban amanat kongres.
2. Masa Jabatan Pengurus Besar adalah 2 (dua) tahun.
3. Pengurus Besar terdiri dari:
   a. Ketua Umum
   b. Ketua-ketua sebanyak 10 (sepuluh) orang
   c. Sekretaris Jenderal
   d. Sekretaris-sekretaris sebanyak 10 (sepuluh) orang
   e. Bendahara umum
   f. Bendahara-bendahara sebanyak 3 (Tiga) orang
   g. Biro-biro
   h. Badan semi otonom yaitu KOPRI
   i. Lembaga semi otonom seperti LBH, Koperasi, Jurnal, Cyber, dll.
4. Ketua-ketua seperti yang dimaksudkan ayat (3) point (b) membidang:
   a. Kaderisasi Nasional
   b. Penataan aparatur organisasi
   c. Pengembangan pemikiran, Ilmu Pengetahuan, Tekhnologi.
   d. Keagamaan dan hubungan antar umat beragama
   e. Hubungan luar negeri dan jaringan internasional
   f. Pengembangan ekonomi dan pemberdayaan kelompok professional
   g. Komunikasi organ gerakan, kepemudaan, LSM dan Ormas

h. Kajian Hukum dan Advokasi kebijakan public
i. Pengembangan jaringan kampus dan profesi akademik
j. Kajian dan pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

5. Jumlah Bidang seperti dimaksud pada pasal 13 point (4) diatas, dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Ketua Umum PB dipilih oleh Kongres.
7. Ketua Umum PB tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.
8. Pengurus Besar memiliki tugas dan wewenang:
   a. Ketua umum memilih sekretaris jenderal dan menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu 9 (Sembilan) orang formatur yang dipilih kongres selambat-lambatnya 14 x 24 jam.
   b. Formatur PB PMII sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) point (a) di atas dipilih oleh peserta kongres dengan memperhatikan keterwakilan region.
   c. Pengurus Besar berkewajiban mengesahkan susunan Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang.
9. Persyaratan Pengurus Besar adalah:
   a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKN bagi Ketua Umum dan BPH PB PMII dan PKL bagi Non BPH PB PMII.
   b. Pernah aktif menjadi pengurus di tingkat PC, PKC atau PB PMII minimal satu periode.
   c. Mendapat rekomendasi dari PKC dan atau Pengurus Cabang asal.
   d. Membuat pernyataan bersedia aktif di PB PMII secara tertulis.

Pasal 19
Pengurus Koordinator Cabang

1. PKC merupakan perwakilan PC di wilayah koordinasinya.
2. Wilayah Koordinasi PKC adalah satu Propinsi dan atau gabungan propinsi terdekat yang belum ada PKC nya.
3. PKC dapat dibentuk manakala terdapat 3 (Tiga) cabang definitif atau lebih dalam wilayah koordinasinya. Tatacara pembentukan PKC diatur dalam Peraturan Organisasi.

4. Jika terdapat PKC yang sudah 3 (tiga) Cabang, maka akan di marger/digabung dengan PKC terdekat.
5. Dalam kondisi tertentu, PKC dapat dibentuk berdasarkan wilayah efektif kerja kaderisasi, koordinasi dan konsolidasi organisasi dengan gabungan cabang-cabang lintas wilayah PKC
6. PKC berkedudukan di Ibukota Provinsi.
7. Masa Jabatan PKC adalah 2 (dua) tahun.
8. PKC terdiri dari kader terbaik dari PC dalam wilayah kordinasi.
9. PKC terdiri dari:
   a. Ketua
   b. Wakil ketua sebanyak 3 orang
   c. Sekretaris
   d. Wakil sekretaris sebanyak 3 orang
   e. Bendahara
   f. Wakil bendahara
   g. Biro-biro;
   h. Badan semi otonom yaitu KOPRI;
   i. Lembaga semi otonom
10. Tiga orang ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) point (b) membidangi:
    a. bidang internal;
    b. bidang eksternal;
    c. bidang keagamaan.
11. Ketua PKC dipilih oleh Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab).
12. Ketua memilih sekretaris dan menyusun PKC selengkapnya, dibantu 6 (enam) orang formatur yang dipilih oleh Konkorcab dalam waktu selambatnya **7 x 24 jam**.
13. Jumlah formatur disesuaikan dengan jumlah cabang dan wilayah koordinasi PKC
    a. PKC melaksanakan dan pengembangan kebijakan tentang berbagai masalah organisasi di lingkungan koordinasinya.
    b. PKC berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan kongres, keputusan muspimnas, keputusan konkoorcab, peraturan-peraturan organisasi dan memperhatikan nasehat serta saran-saran majelis Pembina daerah (mabinda).

c. PKC berkewajiban menyampaikan laporan kepada PB PMII 6 (enam) bulan sekali dalam rapat koordinasi lengkap nasinal dan muspimnas.

d. Pelaporan yang disampaikan pkc meliputi, perkembangan cabang, komisariat dan kampus aktivitas internal dan eksternal.

e. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

14. Pengurus Koordinator Cabang memiliki tugas dan wewenang:
    a. Menjalankan keputusan AD/ART, Kongres, keputusan konkorcab danemperhatikan nasehat, pertimbangan dan saran majelis Pembina.
    b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PB PMII secara periodicenam bulan sekali
    c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PB PMII meliputi; perkembangan jumlah anggota cabang serta aktivitas internal dan eksternal.
    d. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan

Pasal 20
Pengurus Cabang

1. Pengurus cabang dapat dibentuk di kabupaten/ kota yang ada perguruan tingginya.
2. Cabang dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) komisariat
3. Dalam keadaan dimana ayat (2) di atas tidak dapat dilaksanakan, PC dapat dibentuk apabila telah mencapai 50 (lima puluh) kader.
4. Poin (1) dan (2) harus dengan usulan dan rekomendasi dari PKC dan atau cabang terdekat, untuk selanjutnya PB menunjuk caretaker.
5. Selanjutnya tata cara pembentukan PC diatur dalam peraturan organisasi.
6. Masa jabatan PC adalah setahun.
7. Cabang dapat diturunkan statusnya menjadi persiapan dan/atau pengguguran cabang apabila tidak dapat memenuhi klasifikasi

dan kriteria yang ditetapkan oleh PB yang menyangkut standar program minimum.

8. Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu setahun tidak menyelenggarakan kaderisasi formal, mapaba dan follow up nya, serta kaderisasi informal.
9. Dan atau sekurang-kurangnya dalam masa kepengurusan tidak menyelenggarakan konferensi cabang maka akan diturunkan statusnya menjadi cabang persiapan.
10. Jika dalam jangka waktu 6 bulan pasca diturunkan statusnya, jika tidak melaksanakan konferensi cabang maka akan dilakukan pengguguran cabang.
11. Cabang dan pengurus cabang dapat dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PB melalui rekomendasi PKC dan apabila terdapat cabang di daerah propinsi yang belum terbentuk pkc maka dapat meminta langsung dari PB.
12. PC terdiri dari:
    a. Ketua
    b. Wakil ketua sebanyak 3 (tiga) orang
    c. Sekretaris
    d. Wakil sekretaris sebanyak 3 (tiga) orang
    e. Bendahara
    f. Wakil bendahara
    g. Biro-biro
    h. Badan semi otonom yaitu KOPRI
    i. Lembaga-lembaga semi otonom
13. Tiga orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) poin (b) meliputi:
    a. Bidang internal
    b. Bidang eksternal c.
    Bidang keagamaan
14. Bidang internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) point (a) membawahi:
    a. Biro kaderisasi dan pengembangan sumber daya anggota;
    b. Biro pendayagunaan potensi dan kelembagaan organisasi;
    c. Biro kajian pengembangan intelektual dan eksplorasi teknologi; dan
    d. Biro pemberdayaan ekonomi dan kelompok 16eriodic16nal.

15. Bidang ekstenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) point (b) membawahi:

a. Biro hubungan dan komunikasi pemerintah dan kebijakan 16eriod;
b. Biro hubungan dan komunikasi organ gerakan, kepemudaan dan perguruan tinggi;
c. Biro pengambangan media dan informasi;
d. Biro hubungan dan kerjasama LSM;
e. Biro advokasi, HAM dan lingkungan hidup.

16. Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) point (b) membawahi:

a. Biro dakwah dan kajian Islam;
b. Biro komunikasi dan hubungan pesantren; dan
c. Biro hubungan dan komunikasi lintas agama.

17. Lembaga semi otonom dapat dibentuk berdasarkan azas lokalitas kebutuhan seperti Bulletin, Koperasi, LBH, Teater, Grup Musik dan lain-lain.

18. Ketua diplih oleh konferensi cabang.

19. Ketua memilih sekretaris dan menyusun PC selengkap-lengkapnya dibantu 6 (enam) orang formatur yang dipilih konfercab dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam.

20. Ketua PC tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode. 21.Pengurus Cabang memiliki tugas dan wewenang:

a. Menjalankan keputusan AD/ART Kongres, keputusan Muspimnas, keputusan Konfercab, dan memperhatikan nasehat, pertimbangan dan saran Majelis Pembina Cabang (Mabincab).
b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PKC serta kepada PB secara periodic empat bulan sekali.
c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PKC meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal.
d. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

22. Persyaratan Pengurus Cabang:

a. Ketua Cabang dan BPH Cabang Pendidikan formal kaderiisasi minimal telah mengikuti

PKL

b. Pengurus Cabang non BPH Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKD
c. Pernah aktif di kepengurusan Pengurus Komisariat (PK) atau Pengurus Rayon (PR) minimal satu periode.
d. Mendapat rekomendasi dari PK atau PR asal
e. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus cabang secara tertulis.

Pasal 21
Pengurus Komisariat

1. Komisariat dapat dibentuk di setiap perguruan tinggi
2. Komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) Pengurus Rayon.
3. Dalam keadaan dimana ayat 2 diatas tidak dapat dilaksanakan PK dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya 25 orang.
4. Komisariat dapat dianggap sah setelah mendapatkan pengesahan dari PC.
5. Masa jabatan Pengurus Komisariat (PK) adalah setahun.
6. PK merupakan perwakilan PR di wilayah koordinasinya.
7. PK terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Wakil ketua sebanyak 3 orang;
   c. Sekretaris
   d. Wakil sekretaris sebanyak 3 orang
   e. Bendahara
   f. Wakil Bendahara
   g. Biro-biro
   h. Lembaga semi otonom
8. Tiga orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) point (b) meliputi:
   a. Bidang internal yang membawahi:
      1) Biro kaderisasi dan pembinaan sumber daya anggota
      2) Biro pendayagunaan aparatur dan potensi organisasi
      3) Biro Keagamaan.
   b. Bidang eksternal yang membawahi:
      1) Biro hubungan komunikasi instansi kampus di wilayahnya;

2) Biro hubungan dan komunikasi organ gerakan dalam kampus.

c. Bidang Keagamaan yang membawahi Biro dakwah dan kajian Islam.

9. Konsentrasi penuh PK semata-mata adalah melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada PR di bawah kordinasinya.
10. Ketua PK dipilih oleh Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
11. Ketua memilih sekretaris, dan menyusun PK selengkapnya dibantu 3 (tiga) orang formatur yang dipilih oleh RTK dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam.
12. Ketua PK tidak dapat dipilih kembali lebih dari satu periode.
13. Persyaratan Pengurus Komisariat:
    a. Ketua dan BPH Komisariat Pendidikan formal kaderisasi minimal teolah mengikuti PKD
    b. Pengurus Komisariat non BPH Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti Mapaba.
    c. Pernah aktif di kepengurusan PR minimal satu periode.
    d. Mendapat rekomendasi dari PR asal, membuat pernyataan secara tertulis bersedia aktif di pengurus komisariat.
    e. Ketua PK tidak dapat dipilij kembali lebih dari satu periode
    f. Ketua memilih sekretaris dan menyusun PK selengkapnya dibantu 3 (tiga) orang formatur yang dipilih oleh RTK dalam waktu selambat-lambatnay 3x24 jam.

Pasal 22

Pengurus Rayon

1. Pengurus Rayon dapat dibentuk di setiap fakultas, prodi atau setingkatnya.
2. Pengurus Rayon sudah dapat dibentuk di tempat yang dianggap perlu oleh PK apabila telah memiliki sekurang-kurangnya 10 anggota.
3. Pengurus Rayon dianggap sah apabila telah mendapat pengesahaan dari PC.
4. Masa Jabatan PR adalah setahun.
5. Ketua Rayon dipilih oleh Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR).
6. PR teridiri dari:

a. Ketua;

b. Wakil ketua;
c. Sekretaris;
d. Wakil sekretaris;
e. Bendahara;
f. Wakil bendahara;
g. Biro-biro yang disesuaikan dengan studi minat, hobby, profesi, kesejahteraan, bakti kemasyarakatan dan keagamaan.

7. PR memiliki tugas dan wewenang:
   a. PR berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan Kongres dan RTAR;
   b. PR berkewajiban menyampaikan laporan kepada PK dengan tembusan kepada PC secara periodik;
   c. Pelaporan yang disampaikan PR kepada PK meliputi: perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal;
   d. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.
8. Persyaratan Pengurus rayon:
   a. Ketua rayon minimal telah mengikuti pendidikan formal kaderisasi yaitu PKD
   b. Pengurus Rayon minimal telah mengikuti pendidikan formal kaderisasi yaitu Mapaba

BAB VII
LEMBAGA SEMI OTONOM
Pasal 23

1. Lembaga semi otonom adalah Lembaga yang dibentuk oleh ketua umum di setiap tingkat kepengurusan beradasarkan azas lokalitas kebutuhan.
2. Pengurus lembaga semi otonom bertanggung jawab kepada pleno badan pengurus harian pada tingkat kepengurusan masing-masing.
3. Lembaga-lembaga semi otonom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat berupa:
   a. LBH;
   b. Koperasi;

c. Group music;
d. Teater;
e. Dan/atau lainnya.

4. Pemimpin lembaga semi otonom yang selanjutnya bisa disebut direktur atau ketua ditunjuk oleh ketua umum dengan meminta pertimbangan pleno dan di-SK-kan oleh ketua umum PMII pada tingkatan masing-masing.
5. Kepengurusan lembaga semi otonom sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
6. Lembaga semi otonom tidak punya struktur hierarkhi ke bawah.
7. Pedoman dan tata kerja lembaga disusun oleh lembaga masing-masing.
8. Kebijakan tentang tata kerja, pola koordinasi dan mekanisme organisasi lembaga semi otonom akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.**BAB VIII**

PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 24

1. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung di bawahnya.
2. Apabila ketua umum PB, PKC, PC, PK, PR berhenti atau mengundurkan diri dari jabatan digantikan oleh:
   a. Apabila ketua umum PB, jabatan digantikan ketua bidang pengkaderan.
   b. Apabila ketua umum PKC, jabatan digantikan ketua bidang internal.
   c. Apabila ketua umum PC, jabatan digantikan ketua bidang Internal.
   d. Apabila ketua PK digantikan wakil ketua bidang internal.
   e. Apabila ketua PR digantikan wakil ketua.
3. Dalam kondisi dimana tidak dapat dilakukan pengisian lowongan jabatan antar waktu maka lowongan jabatan akan diisi oleh anggota pengurus lainnya berdasarkan keputusan rapat badan pengurus harian yang khusus diadakan untuk itu.

BAB IX
KUOTA KEPENGURUSAN
Pasal 25

1. Kepengurusan di setiap tingkat harus menempatkan anggota perempuan dari 1/3 keseluruhan anggota pengurus.
2. Setiap kegiatan PMII harus dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan perempuan 1/3 dari keseluruhan anggota.

BAB X
KORPS PMII PUTERI
Pasal 26

1. Korps PMII Puteri selanjutnya disingkat KOPRI
2. KOPRI diwujudkan dalam Badan Semi Otonom yang secara khusus menangani pengembangan kader puteri PMII berpersfektif keadilan dan kesetaraan gender.
3. Selanjutnya pengertian semi otonom dijelaskan dalam Bab penjelasan.

Pasal 27

1. Pengurus KOPRI terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan sejumlah biro-biro sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengurus KOPRI disahkan dengan SK Ketua Umum di setiap level/jenjang kepengurusan.
   a. Pengurus KOPRI PB PMII, disahkan oleh SK Ketua Umum PB PMII
   b. Pengurus KOPRI PKC PMII, disahkan oleh SK Ketua PKC PMII
   c. Pengurus KOPRI PC PMII, disahkan oleh SK Ketua PC PMII
   d. Pengurus KOPRI PK PMII, disahkan oleh SK Ketua PK PMII
   e. Pengurus KOPRI PR PMII, disahkan oleh SK Ketua PR PMII
3. Ketua KOPRI PB dipilih oleh Forum tertinggi yang dilakukan oleh seorang utusan KOPRI yang sah
4. Ketua KOPRI memilih sekretaris jenderal dan menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu 9 (Sembilan) orang formatur yang dipilih kongres selambat- lambatnya 14 x 24 jam.

5. Formatur KOPRI sebagaimana dimaksud dalam ayata (4) dipilih oleh peserta kongres dengan memperhatikan keterwakilan region
6. Syarat menjadi Ketua dan BPH KOPRI diberbagai level kepengurusan disesuaikan dengan jenjang kaderisasi yang ada di PMII dan KOPRI.
7. Dengan rincian sebagai berikut:
   a. Telah mengikuti SKKN Ketua bagi BPH KOPRI PB
   b. Telah mengikuti SKK bagi ketua dan BPH KOPRI PKC dan KOPRI PC
   c. Telah mengikuti SIG bagi ketua dan BPH KOPRI PK dan KOPRI PC

Pasal 28

1. Ketua, sekretaris dan bendahara KOPRI masuk dalam anggota Pleno Badan Pengurus Harian PMII disetiap level kepengurusan.
2. KOPRI bertanggungjawab kepada forum tertinggi di masing-masing level kepengurusan.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem administrasi, Rektuitmen Kepemimpinan dan Kaderisasi diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI PMII
4. Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan ditetapkan melalui PO, TAP Pleno dan Peraturan PMII lainnya.

BAB XI
MAJELIS PEMBINA

Pasal 29

Majelis pembina adalah badan yang terdapat di tingkat organisasi PB, PKC dan PC.

1. Majelis pembina di tingkat PB disebut Majelis Pembina Nasional (Mabinas) dan berjumlah maksimal 30 orang.
2. Majelis Pembina di tingkat PKC disebut Majelis Pembina Daerah (Mabinda) dan berjumlah maksimal 20 orang
3. Majelis pembina di tingkat PC disebut Majelis Pembina Cabang (Mabincab) dan berjumlah maksimal 15 orang

4. Majelis Pembina di Tingkat Komisariat disebut Majelis Pembinan Komisariat (Mabinkom) dan berjumlah maksimal 10 orang.

Pasal 30

1. Tugas dan fungsi Majelis Pembina:
   a. Memberikan nasehat, gagasan pengembangan dan saran kepada pengurus PMII baik diminta maupun tidak.
   b. Membina dan mengembangkan secara informal kader PMII dibidang Intelektual dan profesi.
2. Susunan majelis pembina terdiri dari:
   a. Satu orang ketua merangkap anggota.
   b. Satu orang sekretaris merangkap anggota
   c. Sesuai kebutuhan
3. Keanggotaan Majelis Pembina dipilih dan ditetapkan pengurus ditingkat masing-masing.

BAB X
PERMUSYAWARATAN

Pasal 31

Permusyawaratan dalam Organisasi PMII terdiri dari:

1. Kongres
2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
4. Rapat Pleno Lengkap
5. Rapat Pleno BPH PB PMII
6. Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab)
7. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)
8. Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
9. Rapat Pleno BPH PKC PMII
10. Konferensi Cabang (Konfercab)
11. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)
12. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
13. Rapat Pleno BPH PC PMII
14. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
15. Rapat Pleno BPH PK PMII
16. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
17. Rapat Pleno BPH PR PMII

18. Kongres Luar Biasa (KLB)
19. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkorcab-LB)
20. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB)
21. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB)
22. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB)

Pasal 32
Kongres

1. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam organisasi.
2. Kongres dihadiri oleh PC, PKC dan peninjau.
3. Kongres diadakan tiap 2 (dua) tahun sekali.
4. Kongres sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya separuh lebih satu dari jumlah peserta kongres.
5. Kongres memiliki kewenangan:
   a. Menetapkan/merubah AD/ART PMII
   b. Menetapkan/merubah NDP PMII.
   c. Menetapkan/merubah paradigma pergerakan PMII.
   d. Menetapkan/merubah strategi pengembangan PMII.
   e. Menetapkan/merubah kebijakan umum dan GBHO
   f. Menetapkan/ merubah sistem pengkaderan PMII
   g. Menetapkan ketua umum PB PMII, Ketua KOPRI PB PMII dan tim formatur.
   h. Menetapkan dan menilai LPJ PB PMII

Pasal 33
Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)

1. Muspimnas adalah forum tertinggi setelah Kongres.
2. Muspimnas dihadiri oleh Pengurus Besar, PKC dan PC
3. Muspimnas diadakan paling sedikit satu kali dalam satu periode kepengurusan PB PMII.
4. Muspimnas memiliki kewenangan:
   a. Menghasilkan ketetapan organisasi dan Peraturan Organisasi (PO).
   b. Membahas dinamika organisasi dan situasi nasional baik yang bersifat internal maupun eksternal
   c. Menerima laporan perkembangan kaderisasi dan perkembangan keorganisasian dari PKC dan PC.
   d. Muspimnas membentuk Badan Pekerja Kongres.

Pasal 34
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

1. Rakernas dilaksanakan oleh PB PMII.
2. Rakernas dilaksanakan setidaknya satu kali atau lebih selama satu periode.
3. Peserta Rakernas adalah Pengurus Harian PB PMII, biro-biro, badan semi otonom dan lembaga-lembaga semi otonom.
4. Rakernas memiliki kewenangan membuat dan menetapkan action planning berdasarkan program kerja yang diputuskan di Kongres.

Pasal 35
Rapat Pleno Lengkap

1. Rapat Pleno Lengkap adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PB PMII dan Ketua PKC yang berfungsi untuk, mengkoordinasikan seluruh aktivitas PKC dan melaporkan perkembangan Cabang masing-masing.
2. Rapat pleno lengkap dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

Pasal 36
Rapat Pleno BPH PB PMII

1. Rapat Pleno BPH PB PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PB PMII yang berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PB PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 37
Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab)

1. Dihadiri oleh utusan PC.
2. Dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah PC yang sah.
3. Diadakan setiap 2 tahun sekali.
4. Konkorcab memiliki wewenang:
   a. Menyusun program kerja PKC dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII.
   b. Menilai laporan pertanggung jawaban PKC.
   c. Memilih Ketua PKC, Ketua KOPRI PKC dan tim formatur

Pasal 38

Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)

1. Muspimda adalah forum tertinggi setelah Konkorcab.
2. Muspimda dihadiri PKC dan PC yang berada dalam wilayah koordinasinya.
3. Muspimda diadakan paling sedikit sekali dalam satu periode kepengurusan.
4. Muspimda memiliki kewenangan:
   a. Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang mengikat kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
   b. Evaluasi program selama satu semester baik bidang interal maupun eksternal.
   c. Mengesahkan laporan organisasi dari berbagai wilayah koordinasi

Pasal 39

Rapat Kerja Daerah (Rakerda)

1. Rakerda dilaksanakan oleh PKC paling sedikit satu kali dalam masa kepengurusan.
2. Rakerda berwenang merumuskan action plan berdasarkan program kerja yang diputuskan di Konferkorcab.

Pasal 40

Rapat Pleno BPH PKC PMII

1. Rapat Pleno BPH PKC PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PKC PMII berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

2. Rapat pleno BPH PKC PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 41

Konferensi Cabang (Konfercab)

1. Konfercab adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat PC.
2. Konfercab dihadiri oleh utusan PK dan PR.

3. Apabila PC dibentuk berdasarkan ART pasal 15 ayat 3 maka Konfercab dihadiri oleh setengah anggota yang ada ditambah satu.
4. Konfercab dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang syah.
5. Konfercab diadakan satu tahun sekali.
6. Konfercab memiliki wewenang:
   a. Menyusun program kerja cabang dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PMII.
   b. Menilai laporan pertanggungjawaban kepengurusan PC.
   c. Memilih ketua Cabang, Ketua KOPRI Cabang dan formatur.

Pasal 42

Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)

1. Muspimcab adalah forum tertinggi setelah Konfercab.
2. Muspimcab dihadiri oleh PC, PK dan PR.
3. Muspimcab diadakan paling sedikit 1 kali dalam satu periode kepengurusan.
4. Muspimcab memili kewenangan:
   a. Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
   b. Evaluasi program pengurus cabang selama catur wulan.
   c. Mengesahkan laporan organisasi dari PK dan pengurus rayon.

Pasal 43

Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

1. Menyusun dan menetapkan action planning selama satu periode berdasarkan hasil dari konfercab.
2. Rakercab dilaksanakan oleh PC.
3. Peserta Rakercab adalah seluruh jajaran pengurus harian dan badan badan dilingkungan PC.

Pasal 44

Rapat Pleno BPH PC PMII

1. Rapat Pleno BPH PC PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PC PMII berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

2. Rapat pleno BPH PC PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 45
Rapat Tahunan Komisariat (RTK)

1. RTK adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat komisariat.
2. RTK dihadiri oleh utusan utusan rayon.
3. Apabila komisariat di bentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 15 ayat 3 maka RTK dihadiri oleh anggota komisariat.
4. RTK berlangsung dan dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 rayon yang sah.
5. RTK di adakan setahun sekali.
6. RTK memiliki wewenang:
   a. Menyusun program kerja PK dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PMII.
   b. Menilai laporan pertanggung jawaban pengurus komisariat.
   c. Memilih ketua komisariat, ketua KOPRI Komisariat dan formatur.

Pasal 46
Rapat Pleno BPH PK PMII

1. Rapat Pleno BPH PK PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PK PMII berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PK PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 47
Rapat Tahun Anggota Rayon (RTAR)

1. RTAR dihadiri oleh pengurus rayon dan anggota PMII dilingkungannya.
2. Diadakan setahun sekali.
3. Dapat berlangsung dan dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota.
4. Menyusun program kerja rayon dalam rangka penjabaran program dan pelaksanaan program umum dan kebijakan

PMII.

5. Menilai laporan kegiatan pengurus rayon.
6. memilih ketua Rayon, ketua KOPRI Rayon dan formatur.
7. Setiap satu anggota mempunyai satu suara.

Pasal 48
Rapat Pleno BPH PR PMII

1. Rapat Pleno BPH PR PMII adalah Rapat yang dihadiri oleh BPH PR PMII berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PR PMII dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentative) dalam merespon dinamika dan momentum tertentu.

Pasal 49
Kongres Luar Biasa (KLB)

1. KLB merupakan forum yang setingkat dengan kongres.
2. KLB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap konstitusi (AD/ART dan/atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Besar.
3. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah tingkat tinggi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.
4. KLB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah cabang dan Korcab yang sah.
5. Sebelum diadakan KLB, setelah syarat-syarat sebagaimana disebut dalam point 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan PB diambil alih oleh Majelis Pembina Nasional (Mabinas), yang kemudian membentuk panitia KLB yang terdiri dari unsur Mabinas, PKC dan PC.

Pasal 50
Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkorcab-LB)

1. Konkorcab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konkorcab
2. Konkorcab-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan/atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Koordinator Cabang

3. Ketentuan pelanggaran konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah tingkat tinggi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.
4. Konkorcab-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah cabang yang sah.
5. Sebelum diadakan Konkorcab-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Koorcab didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Besar, yang kemudian membentuk panitia Konkorcab-LB yang terdiri dari unsur PB dan cabang-cabang.

Pasal 51

Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB)

1. Konfercab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konfercab.
2. Konfercab-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh pengurus cabang.
3. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah tingkat tinggi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.
4. Konfercab-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah komisariat yang sah.
5. Sebelum diadakan Konfercab-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Cabang didomisioner dan diambil alih oleh PB atau PB menunjuk PKC PMII sebagai pejabat sementara (Pjs), yang kemudian membentuk panitia Konfercab-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Korcab dan Komisariat-komisariat.

Pasal 52

Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB)

1. RTK-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTK.
2. RTK-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Komisariat
3. RTK-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah rayon yang sah.
4. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.

Sebelum diadakan RTK-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Komisariat didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Cabang, yang kemudian membentuk panitia RTK-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Cabang dan rayon – rayon.

Pasal 53

Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB)

1. RTAR-LB merupakan forumyang setingkat dengan RTAR.
2. RTAR-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan/atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Rayon.
3. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah tingkat tinggi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.
4. RTAR-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah anggota.
5. Sebelum diadakan RTAR-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan rayon didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus cabang, yang kemudian membentuk panitia RTK-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Komisariat dan anggota Rayon.

Pasal 54

Perhitungan Anggota

1. Setiap anggota dianggap mempunyai bobot kuota manakala telah ditetapkan oleh PB berdasarkan pelaporan organisasi yang disampaikan PKC dan PC.
2. Ketentuan pelaporan anggota akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

Pasal 55

Quorum dan Pengambilan Keputusan

1. Musyawarah, konferensi dan rapat rapat seperti tersebut dalam ART ini adalah sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

3. Keputusan mengenai pemilihan seseorang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.
4. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka pemilihan diulang kembali.
5. Manakala dalam pemilihan kedua masih terdapat suara yang sama, maka akan ditentukan dengan mekanisme undi (qur"ah) yang dipimpin pimpinan sidang dengan asas musyawarah dan kekeluargaan.

BAB XI
PERUBAHAN DAN PERALIHAN
Pasal 56
Perubahan

1. Perubahan ART ini hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan referendum yang khusus diadakan untuk itu.
2. Keputusan ART baru sah apabila disetujui oleh 2/3 jumlah cabang yang sah.

Pasal 57
Peralihan

1. Apabila segala badan-badan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ART ini belum terbentuk, maka ketentuan lama akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ART ini.
2. Untuk melaksanakan perubahan organisasi harus dibentuk panitia pembubaran, guna menyelesaikan segala sesuatu di seluruh jajaran organisasi.
3. Kekayaan PMII setelah pembubaran diserahkan kepada Organisasi yang seasas dan setujuan.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 58

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan oleh PB dalam Peraturan Organisasi.
2. ART ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ila Aqwamith Thorieq

Ditetapkan di	: Palu
Pada Tanggal	: 22 Mei 2017
Pukul	: 16.25 WITA

PIMPINAN SIDANG KONGRES XIX PALU

Hidayat Syahputra	**Sehan Hanubun**	**Ali Akbar**
Ketua	**Wakil Ketua**	**Sekretaris**

NILAI DASAR PERGERAKAN (NDP)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Pembukaan

Senantiasa memohon kepada Allah SWT sebagai Sumber Segala Kebenaran dan Tujuan Hidup, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berusaha menggali nilai-nilai moral dari nash agama dan pengalaman sejarah insan pergerakan kedalam bentuk rumusan yang diberi nama Nilai Dasar Pergerakan (NDP).

Rumusan ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti, serta motivasi gerakan sekaligus memberikan legitimasi dan memperjelas apa yang harus dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan sesuai dengan maksud didirikannya organisasi ini.

NDP adalah tali pengikat *(kalimatun sawa")* yang mempertemukan warga pergerakan dalam satu cita-cita perjuangan sesuai tujuan organisasi. Nilai Dasar Pergerakan menjadi sandaran organisasi dalam menegakkan Tauhid di kehidupan sehari-hari, sebagai panduan nilai dalam berhubungan dengan Allah, dalam berhubungan dengan sesama manusia dan dalam berhubungan dengan alam. Oleh sebab itu seluruh warga PMII harus memahami dan menginternalisasikan Nilai Dasar Pergerakan, baik secara personal maupun secara bersama-sama.

BAB I
ARTI, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

A. Arti

NDP adalah rumusan nilai-nilai yang diturunkan secara langsung dari ajaran Islam serta kenyataan masyarakat dan negeri Indonesia, dengan kerangka pendekatan *Ahlussunnah wal-Jama"ah*. NDP harus senantiasa menjiwai seluruh aturan organisasi, memberi arah dan mendorong gerak organisasi, serta menjadi penggerak setiap kegiatan organisasi dan kegiatan masing-masing anggota. Sebagai ajaran yang sempurna, Islam harus dihayati dan diamalkan secara *kaffah* atau menyeluruh oleh seluruh anggota dengan mencapai dan mengamalkan *iman* (aspek *aqidah*), *Islam* (aspek *syari"ah*) dan *Ihsan* (aspek *etika, akhlak* dan

tasawuf) untuk memohon Ridlo-Nya serta memohon keselamatan hidup di dunia dan akhirat *(sa"adah ad-darain)*.

Sebagai tempat hidup dan mati, negeri maritim Indonesia merupakan rumah dan medan gerakan organisasi. Di Indonesia organisasi hidup, demi bangsa Indonesia organisasi berjuang. Sebagai tempat semai dan tumbuh negeri Indonesia telah memberi banyak kepada organisasi, oleh sebab itu organisasi dan setiap anggotanya wajib memegang teguh komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. NDP adalah penegasan nilai atas watak keindonesiaan organisasi.

Organisasi menggunakan *Ahlussunnah wal-Jama"ah* sebagai pendekatan berpikir *(manhaj al-fikr)* untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Memilih *Ahlussunnah wal-Jama"ah* sebagai pendekatan berpikir dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam merupakan keniscayaan di tengah kenyataan masyarakat Indonesia yang serba majemuk. Dengan *Ahlussunnah wal-Jama"ah* yang mengenal nilai kemerdekaan *(al-hurriyah)*, persamaan *(al-musawah)*, keadilan *(al-"adalah)*, toleransi *(tasamuh)*, dan nilai perdamaian *(al-shulh),* maka kemajemukan etnis, budaya dan agama menjadi potensi penting bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan.

B. Fungsi

NDP berfungsi sebagai:

1. Kerangka Refleksi

Sebagai kerangka refleksi, NDP merupakan ruang untuk melihat dan merenungkan kembali secara jernih setiap gerakan dan tindakan organisasi. Di dalam refleksi, gerakan dan tindakan organisasi dihadapkan untuk berdialog dengan rumusan-rumusan Nilai Dasar Pergerakan. Dialog ini sejatinya harus berlangsung terus-menerus, sehingga butiran-butiran Nilai Dasar Pergerakan menjadi hidup dan menjiwai setiap gerak dan kegiatan organisasi. Merupakan kewajiban setiap anggota untuk senantiasa melakukan perenungan dan refleksi apakah tindakan dan kegiatannya telah mendekati Nilai Dasar Pergerakan.

2. **Kerangka Aksi**

Sebagai kerangka aksi, NDP merupakan landasan etos gerak organisasi dan setiap anggota. Sebagai kerangka aksi, etos akan muncul dari proses aksi – refleksi yang dilakukan secara terus-menerus. Tahap memahami Nilai Dasar harus segera diikuti dengan ikhtiar untuk mewujudkan Nilai itu dalam gerak dan tindakan, kemudian setelah bergerak dan bertindak harus pula segera ditinjau apakah tindakan dan gerakan itu telah memenuhi atau mendekati Nilai Dasar.

3. **Kerangka Ideologis**

a. Menjadi peneguh tekad dan keyakinan anggota untuk bergerak dan berjuang mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi.
b. Menjadi landasan berpikir dan etos gerak anggota untuk mencapai tujuan organisasi melalui cara dan jalan yang sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing.

C. Kedudukan

1. NDP menjadi rujukan utama setiap produk hukum dan kegiatan organisasi
2. NDP menjadi sumber kekuatan ideal setiap kegiatan organisasi
3. NDP menjadi pijakan argumentasi dan pengikat kebebasan berfikir, berbicara dan bertindak setiap anggota.

BAB II
RUMUSAN NILAI-NILAI DASAR PERGERAKAN

1. Tauhid

Mengesakan Allah SWT merupakan nilai paling asasi dalam sejarah agama samawi. Di dalamnya telah terkandung sejak awal tentang keberadaan manusia, (Q.S. *Al-Ikhlas, Al-Mukmin:25, Al-Baqarah:130-131).*

PERTAMA, Allah adalah Esa dalam segala totalitas, dzat, sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya. Allah adalah dzat yang fungsional. Allah Menciptakan, Memberi Petunjuk, Memerintah

dan Memelihara alam semesta. Allah juga Menanamkan Pengetahuan, Membimbing dan Menolong manusia. Allah Maha Mengetahui, Maha Menolong, Maha Bijaksana, Hakim Maha Adil, Maha Tunggal, Maha Mendahului dan Maha Menerima segala bentuk Pujaan dan Penghambaan, *(Q.S. Al-Hasyr:22-24).*

KEDUA, keyakinan seperti itu merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari alam semesta, serta merupakan manifestasi kesadaran dan keyakinan kepada hal yang ghaib, *(Q.S. Al-Baqoroh:3, Muhammad:14-15, Al-Alaq:4, Al-Isro":7).*

KETIGA, oleh kerena itu tauhid merupakan titik puncak, melandasi, memandu dan menjadi sasaran keimanan yang mencakup keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan dan perwujudan lewat perbuatan. Maka, konsekuensinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia harus mampu melarutkan dan menetaskan nilai-nilai tauhid dalam berbagai kehidupan serta tersosialisasikan hingga merambah sekelilingnya, *(Q.S. Al-Baqoroh:30, Al-A"raf:129, An-Nahl:62, Fathir:39).* Hal ini dibuktikan dengan pemisahan yang tegas antara hal-hal yang profan dan yang sakral. Selain atas Allah sebagai Dzat Yang Maha Kuasa, boleh dilakukan dekonstruksi dan desakralisasi atas segalah hal. Sehingga tidak terjadi penghambaan pada hal-hal yang sifatnya profan, seperti jabatan, institusi, teks, orang dan seterusnya.

KEEMPAT, PMII memilih pendekatan berpikir *Ahlussunnah wal-Jama"ah* untuk memahami dan menghayati keyakinan Tauhid.

2. Hubungan Manusia Dengan Allah

Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan manusia sebaik-baik kejadian dan menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia di hadapan ciptaanNya yang lain, *(Q.S. Al-Dzariat:56, Al-A"raf:179, Al-Qashash:27).*

Kedudukan seperti itu ditandai dengan pemberian daya pikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral. Potensi itulah yang memungkinkan manusia memerankan fungsinya sebagai *khalifah* dan memenuhi posisinya sebagai Hamba Allah. Dalam kehidupan sebagai khalifah, manusia mengemban amanat berat yang oleh Allah ditawarkan kepada makhlukNya. Sebagai hamba

Allah *(Q.S. Shad:82-83, Al-Hujurat:4),* manusia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan-Nya. Untuk itu manusia dilengkapi dengan kesadaran moral yang selalu harus dirawat jika manusia tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang rendah, *(Q.S. Al-Imron:153, Hud:88).*

Dengan demikian, dalam kedudukan manusia sebagai ciptaan Allah, terdapat dua pola hubungan manusia dengan Allah, yaitu pola yang didasarkan pada kedudukan manusia sebagai Khalifah Allah dan sebagai Hamba Allah *(Q.S. Al-An"am:165, Yunus:14).* Kedua pola ini dijalani secara seimbang, lurus dan teguh dengan yang lain, *(Q.S. Shad:72, Al-Hajr:29, Al-Ankabut:29).*

Memilih salah satu pola akan membawa kepada kedudukan dan fungsi manusia yang tidak sempurna. Sebagai akibatnya manusia tidak akan dapat mengejawantahkan prinsip tauhid secara maksimal. Pola hubungan dengan Allah juga harus dijalani dengan ikhlas, *(Q.S. Al-Ra"d:11).*

Artinya pola itu dijalani hanya untuk mengharapkan Keridlaan dari Allah. Sehingga pusat perhatian dengan menjalani dua pola ini adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh. Sedangkan hasil optimal sepenuhnya kehendak Allah, *(Q.S. Al-Hadid:22).*

Dengan demikian berarti diberikan penekanan kepada proses menjadi insan yang mengembangkan dua pola hubungan dengan Allah. Dengan menyadari arti niat dan ikhtiar, akan muncul manusia-manusia yang mempunyai kesadaran tinggi, kreatif, dan dinamis dalam hubungan dengan Allah. Sekaligus didukung dengan ketakwaan dan tidak pernah pongah kepada Allah, *(Q.S. Al-Imron:159***)**.

Dengan karunia akal, manusia berfikir, merenungkan tentang kemahakuasaan-Nya, yakni kemahaan yang tidak tertandingi oleh siapapun, akan tetapi manusia yang dilengkapi dengan potensi-potensi positif memungkinkan dirinya untuk menirukan fungsi ke mahakuasaan-Nya itu. Sebab dalam diri manusia terdapat fitrah uluhiyah, yakni fitran suci yang selalu memproyeksikan tentang kebaikan dari keindahan, sehingga tidak mustahil ketika manusia melakukan sujud dan dzikir kepada-Nya, berarti manusia tengah menjalani fungsi al-Quddus.

Ketika manusia berbelah kasih dan bebuat baik kepada tetangga dan sesamanya, maka berarti ia telah memerankan fungsi ar-Rahman dan ar-Rahim. Ketika manusia bekerja dengan kesungguhan dan ketabahan untuk mendapatkan rizki, maka manusia telah menjalankan fungsi al-Ghoniyya. Dengan demikian pula,dengan peran ke-maha-an Allah yang lain, as-Salam, al-Mun"im dan sebagainya, *(Q.S. Al-Baqoroh:213).*

Di dalam melakukan pekerjaannya manusia diberi kemerdekaan untuk memilih dan menentukan dengan cara yang paling disukai, *(Q.S. Al-A"raf:54, Hud:7, Ibrahim:32, An-Nahl:3, Bani Isroil:44, Al-Ankabut:44, Luqman:10, Al-Zumar:5, Qaf:38, Al-Furqan:59, Al-Hadid:4).* Dari semua tingkah lakunya manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang telah diupayakan. Karenanya manusia dituntut untuk selalu memfungsikan secara maksimal kemerdekaan yang dimilikinya, baik secara perorangan mnaupun secara bersama-sama di tengah-tengah kehidupan alam dan kerumunan masyarakat, *(Q.S. Al-Ra"d:8, Al-Hijr:21, Al-An"am:96, Yasin:38, Al-Sajadah:12, Al-Furqan:2, Al-Qomr:49).*

Sekalipun di dalam diri manusia dikaruniai kemerdekaan sebagai esensi kemanusiaan untuk menentukan dirinya, namun kemerdekaan itu selalu dipagari oleh keterbatasan-keterbatasan, sebab perputaran itu semata-mata tetap Dikendalikan Oleh Kepastian-Kepastian Yang Maha Adil dan Bijaksana. Semua alam semesta selalu tunduk pada sunnah-Nya, pada keharusan universal atau taqdir, *(Q.S. Al-Baqoroh:164, Al-Imron:164, Yunus:5, An-Nahl:12, Al-Rum:22, Al-Jatsiyah:3).*

Jadi manusia bebas berbuat dan berusaha untuk menentukan nasibnya sendiri, apakah dia menjadi mukmin atau kafir, pandai atau bodoh. Manusia harus berlomba-lomba mencari kebaikan, tidak terlalu cepat puas dengan hasil jerih payah dan karyanya.

3. Hubungan Manusia Dengan Manusia

Kenyataan bahwa Allah meniupkan ruhNya kepada materi dasar manusia, menunjukan bahwa manusia berkedudukan mulia diantara ciptaan Allah yang lain. Kesadaran moral dan keberaniannya untuk memikul tanggung jawab dan amanat dari

Allah yang disertai dengan mawas diri menunjukkan posisi dan kedudukannya, *(Q.S. Al-Mu"minun:115).*

Mamahami ketinggian eksistensi dan potensi yang dimiliki oleh manusia, manusia mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan lainnya. Sebagai warga dunia, manusia harus berjuang dan menunjukkan peran yang dicita-citakan. Tidak ada yang lebih tinggi antara yang satu dengan lainnya, kecuali ketaqwaannya, *(Q.S. Al-Hujurat:13)*.

Setiap manusia memiliki kekurangan *(Q.S. At-Takatsur; Al-Humazah; Al-Ma"un; Az-Zumar:49, Al-Hajj:66)* dan kelebihan, ada yang menonjol pada diri seseorang tentang potensi kebaikannya *(Q.S. Al-Mu"minun:57-61)* tetapi ada pula yang terlalu menonjolkan potensi kelemahannya. Karena kesadaran ini, manusia harus saling menolong, saling menghormati, bekerjasama, menasehati dan saling mengajak kepada kebenaran demi kebaikan bersama, *(Q.S. Ali Imran:103, An-Nisa":36-39).*

Manusia telah dan harus selalu mengembangkan tanggapannya terhadap kehidupan. Tangagapan tersebut pada umumnya merupakan usaha mengembangkan kehidupan berupa hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Dengan demikian, maka hasil itu merupakan budaya manusia yang sebagian dapat dirubah. Pelestarian dan perubahan selalu mewarnai kehidupan manusia, inipun dilakukan dengan selalu memuat nilai-nilai sehingga budaya yang bersesuaian bahkan yang merupakan perwujudan dan nilai-nilai tersebut dilestarikan, sedangkan budaya yang tidak bersesuaian dapat diperbarui.

Kerangka bersikap tersebut mengisyaratkan adanya upaya bergerak secara dinamis, kreatif dan kritis dalam kehidupan manusia. Manusia dituntut memanfaatkan potensinya yang telah dianugerahkan oleh Allah melalui pemanfaatan potensi diri tersebut sehingga manusia menyadari asal mulanya kejadian dan makna kehadirannya di dunia.

Dengan demikian pengembangan berbagai aspek budaya dan tradisi dalam kehidupan manusia dilaksanakan sesuai dengan nilai dari semangat yang dijiwai oleh sikap memahami yang senantiasa berada dalam religiusitas. Manusia dan alam selaras dengan perkembangan kehidupan dan mengingat

perkembangan suasana. Memang manusia harus menegakkan iman, taqwa dan amal sholeh guna mewujudkan kehidupan yang baik dan penuh rahmat di dunia. Di dalam kehidupan dunia itu, sesama manusia saling menghormati harkat dan martabat masing-masing, bersederajat, berlaku adil dan mengusahakan kebahagiaan bersama. Untuk itu diperlukan usaha bersama yang harus didahului dengan sikap keterbukaan, komunikasi dan dialog yang egaliter dan setara antar sesama. Semua usaha dan perjuangan ini harus terus menerus dilakukan sepanjang sejarah.

Melalui pandangan seperti ini pula kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikembangkan. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan kerelaan dan kesepakatan untuk bekerjasama serta berdampingan setara dan saling pengertian. Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita bersama yakni, hidup dalam kemajuan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Tolak ukur bernegara adalah keadialan, persamaan hukum serta adanya permusyawaratan.

Sedangkan hubungan antar muslim dan non muslim dilakukan guna membina kehidupan manusia dengan tanpa mengorbankan keyakinan terhadap universalitas dan kebenaran Islam sebagai ajaran kehidupan yang paripurna. Dengan tetap berpegang pada keyakinan ini. Dibina hubungan dan kerja sama secara damai dalam mencapai cita-cita bersama umat manusia, *(Q.S. Al-Kaafirun).*

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam hubungan antar manusia tercakup dalam persaudaraan antar insan pergerakan, persaudaraan sesama umat Islam *(al-Hujuraat, 9-10),* persaudaraan sesama warga negara dan persaudaraan sesama umat manusia. Perilaku persaudaraan ini harus menempatkan insan pergerakan pada posisi yang dapat memberikan manfaat maksimal untuk diri dan lingkungannya.

4. Hubungan Manusia Dengan Alam

Alam semesta adalah ciptaan Allah, *(Q.S. Hud:61, Al-Qoshash:77).* Dia menentukan ukuran dan hukum-hukumnya, *(Q.S. An-Nahl: 122, Al-Baqoroh:130, Al-Ankabut:38).*

Alam juga menunjukan tanda-tanda keberadaan, sifat dan perbuatan Allah, *(Q.S. Al-Ankabut:64, Al-jaatsiyah:3-5).* Nilai tauhid melingkupi nilai hubungan manusia dengan alam. Sebagai ciptaan Allah, alam bekedudukan sederajat dengan manusia. Namun Allah menundukan alam bagi manusia *(Q.S. Al-Syura:20, Yusuf:109, Al-Anam:32, Al-Baqoroh:29)* dan bukan sebaliknya. Jika sebaliknya yang terjadi maka manusia akan terjebak dalam penghambaan terhadap alam. Bukan penghambaan kapada Allah. Allah mendudukkan manusia sebagai khalifah *(Q.S. Al-Baqoroh:30).*

Sudah seharusnya manusia menjadikan bumi maupun alam sebagai wahana dalam bertauhid dan menegaskan keberadaan dirinya *(Q.S. Al-Jaatsiyah:12-13, Al-Ghaasyiyah:17-26),* bukan menjadikannya sebagai obyek eksploitasi *(Q.S. Ar-Rum:41).*

Perlakuan baik manusia terhadap alam dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan di dunia dan diarahkan untuk kebaikan akhirat. Di sini berlaku upaya berkelanjutan untuk mentransendensikan segala aspek kehidupan manusia benar-benar fungsional dan beramal shaleh, *(Q.S. Al-Baqarah:62, Al-A"ashr).*

Kearah semua itulah hubungan manusia dengan alam ditujukan. Dengan sendirinya cara-cara memanfaatkan alam, memakmurkan bumi dan menyelenggarakan kehidupan pada umumnya juga harus bersesuaian dengan tujuan yang terdapat dalam hubungan antara manusia dengan alam tersebut. Cara-cara itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan dasar dalam kehidupan bersama. Melalui pandangan ini haruslah dijamin kebutuhan manusia terhadap perkerjaan, nafkah dan masa depan, maka jelaslah pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama. *(Q.S. Al-Mu"minun:17-22, Al-Hajj:65).*

Hidup bersama antar manusia berarti hidup antar kerjasama. Tolong menolong dan tenggang rasa *(Q.S. Abasa:17-32, An-Naazi"aat:27-33).* Salah satu dari hasil penting dari cipta, rasa, dan karsa manusia yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia menciptakan teknologi untuk memudahkan, dalam rangka memanfaatkan alam dan kemakmuran bumi atau memudahkan hubungan antar manusia. Dalam memanfaatkan

alam diperlukan Iptek, karena alam memiliki ukuran, aturan, dan hukum tersendiri. Alam perlu didayagunakan dengan tidak mengesampingkan sumber pengetahuan adalah Allah. Penguasaan dan pengembangannya disandarkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat Nya. Ayat-ayat berupa wahyu dan seluruh ciptaan Nya. Untuk mengetahui dan mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah itulah manusia mengerahkan kesadaran moral, potensi kreatif berupa akal dan aktifitas intelektualnya.

Di sini lalu diperlukan penalaran yang tinggi dan ijtihad yang utuh dan sistematis terhadap ayat-ayat Allah. Pengembangan pemahaman tersebut secara tersistematis dalam ilmu pengetahuan yang menghasilkan iptek juga menunjuk pada kebaharuan manusia yang terus berubah pencitaan pengembangan dan pengusahaan terhadap Iptek merupakan keniscayaan yang sulit dihindari, jika manusia menginginkan kemudahan hidup untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama, usaha untuk memanfaatkan Iptek tersebut menuntut keadilan, kebenaran, kemanusiaan dan kedamaian. Semua hal tersebut dilaksanakan sepanjang hayat, seiring perjalanan usia dan keluasan Iptek, sehingga berbarengan dengan iman dan tauhid manusia dapat mengembangkan diri pada derajat yang tinggi.

BAB III
PENUTUP

Nilai Dasar Pergerakan dipergunakan sebagai landasan teologis, normatif dan etis dalam pola pikir dan perilaku organisasi dan masing-masing anggota. Dengan ini dasar-dasar tersebut ditujukan untuk mewujudkan pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah, berbudi luhur, berilmu cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya serta komitmen terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia.

PARADIGMA PERGERAKAN

Bukanlah pengecut orang yang tiarap menghindarkan peluru mendesing; namun bodohlah orang yang menantang peluru hanya untuk jatuh dan tidak kuasa bangkit kembali
(Jose Rizal, Sastrawan Filipina dalam Jangan Sentuh Aku)

Dalam melihat realitas sosial, cara pandang setiap individu dengan individu yang lain terhadap persoalan yang sama akan berbeda, tergantung paradigma yang digunakan oleh individu tersebut. Karena demikian vital dalam menyikapi realitas yang ada kemudian timbul pertanyaan ***apa paradigma itu*** ? Pergeseran paradigma terjadi sebagaimana perkembangan ilmu-ilmu sosial, kebanyakan sulit untuk didefinisikan, dan merupakan suatu cita-cita konseptual yang memberi inspirasi atau mengilhami suatu pemikiran dari masyarakat tertentu , mengarahkan perhatian-perhatianya dan menentukan kesadaran yang kuat akan bentuk obyektivitas dari realitas dalam masyarakat, tetapi banyak dari kalangan pemikir-pemikir ilmu sosial memberikan gambaran tentang definisi paradigma.

Inti dari ***pengertian paradigma yaitu*** merupakan titik pijak untuk menentukan cara pandang, menyusun sebuah teori, pertanyaan dan membuat rumusan mengenai suatu masalah. Lewat paradigma ini pemikiran seseorang dapat dikenali dalam melihat dan melakukan analisa atas suatu masalah. Perbedaan paradigma yang digunakan oleh seseorang dalam memandang suatu masalah akan berakibat pada timbulnya perbedaan menyusun teori, membuat konstruk pemikiran cara pandang sampai pada aksi dan solusi yang diambil.

Menurut ***william perdue*** dalam ilmu sosial dikenal adanya tiga klasifikasi utama dari paradigma yaitu: paradigma keteraturan *(order paradigm)*, paradigma keberagaman *(pluralis paradigm)* dan *paradigma konflik (conflic paradigm)* . Untuk memahami perbedaan dari masing-masing paradigma diatas akan dipaparkan pengertian sebagai berikut:

Paradigma keteraturan *(order paradigm)*

Paradigma keteraturan mempuyai asumsi dasar mengenai sifat dasar manusia *(human nature)* , asumsinya adalah sebagai berikut, pertama , imajinasi mengenai sifat dasar manusia yaitu; berakal, memiliki kepentingan pribadi, adanya ketidakseimbangan personal dan berpotensi memunculkan disintegrasi sosial (tipe ideal berdasarkan asumsi ini adalah pandangan hobes mengenai konsep dasar negara), kedua,imajinasi tentang masyarakat yaitu kohesif, terintegrasi, memiliki daya kekang diri dan adanya ketidakseimbangan (tipe ideal berdasarkan asumsi ini adalah negara republik menurut pandangan plato), ketiga,imajinasi mengenai ilmu pengetahuan yaitu sistematik,positivistik, empirik, kuantitatifdan prediktif (tipe ideal berdasarkan asumsi ini fungsionalisme keilmuan pandangan august comte).

Dari paparan diatas menunjukkan bahwa paradigma keteraturan merupakan suatu pandangan berpikir yang mengasumsikan bahwa manusia adalah mahluk yang memiliki potensi untuk berpecah akibat dorongan interes pribadi, namun dapat di cegah berkat kemampuan rasio sehingga timbul adanya konsensus dan integrasi yang berupa norma, nilai dan sejenisnya. Konsensus ini yang memiliki kekuatan untuk menekan potensi disintegrasi manusia . Konsekwensi dari pola pikir yang demikian paradigma keteraturan melihat teori adalah sesuatu yang positivistik, empirik, kuantitatif dan prediktif.

Paradigma keberagaman (pluralis paradigm)

Paradigma menggunakan filsafat idealisme yang meyakini adanya keterkaitan antara obyek dan akal, keterkaitan logika dan harus terdiri dari pemikiran yang subyektif. Bahwa tindakan manusia memiliki kekuatan yang tidak dapat dapat diprediksi, adanya sebuah kesadaran yang dimiliki oleh setiap manusia. Teori ini melakukan penelitian secara meyeluruh atas gagasan yang ada dalam kesadaran kita kita mengenai bagaimana aktor sosial menafsirkan dan membuat dunia empirik mengenai mereka.Dalam paradigma ini lebih mengedepankan aspek kualitatif dibandingkan aspek kuantitatif. Asumsi yang digunakan adalah; *Pertama,* pandangan dasar manusia yaitu disengaja aktif, suka rela dan

rasional (tipe ideal konsep kesadaran diri dari Imanuel kant) , *kedua,* pandangan dasar mengenai masyarakat yaitu kerja sama antagonisme pernyataan pemikiran, pertukaran makna, dan dibentuk karena adanya faktor dari dalam(pandangan Rousseu tentang masyarakat). *Ketiga,* pandangan mengenai ilmu pengetahuan yaitu filsafat idealisme, tindakan manusia tidak dapat diprediksi terbentuknya karakter dari dalam dan bersifat kualitatf.

Paradigma konflik (conflic paradigm)

Paradigma ini memandang manusia sebagai mahluk yang oyektif yang hidup dalam realitas sosial , maka filsafat materialisme merupakan dasar dari ilmu pengetahuan manusia. Meletakkan pikiran, kehendak dan munculnya perasaan secara sederhana, meskipun hanya dapat menjelaskan dalam istilah realitas sosial yang material dan kemudian disebut dengan istilah realitas sosial ganda serta bahan-bahan teori (termasuk konsep utama dan urutan logika) harus merujuk pada *imperativ oyektif*. Realitas yang kontradiksi dan fenomena fakta sosial yang sering muncul dalam sebab akibat akan direfleksikan oleh teori konflik melalui logika dialektik dan endingnya adalah terciptanya dunia lebih baik. Asumsinya adalah: *Pertama,* image tentang sifat dasar manusia yaitu pencipta, cooperativ, rasional dan sempurna. *Kedua,* image tentang masyarakat yaitu *interdependent*, struktural, menyeluruh, dan dinamis. *Ketiga,* tentang masa lalu dan masa kini yaitu timpang penuh tekanan dan pertarungan. *Keempat,* pandangan tentang masa depan yaitu utopia dan egaliter. *Kelima,* image tentang ilmu pengetahuan yaitu filsafat materialisme, historis, holistik (menyeluruh), dialektik dan terapan.

Konsep pengkaderan yang baik selalu berangkat dari kenyataan real sebuah zaman dan selalu mengarah pada tujuan organisasi. Sehingga kader yang telah dididik oleh organisasi mampu memahami keadaan zamannya, mampu mengambil pelajaran dan mampu mengambil posisi gerak sesuai tujuan organisasi.

Selain itu sebuah konsep pengkaderan yang baik juga senantiasa berorientasi untuk meningkatkan tiga aspek utama, yakni

Keimanan, pengetahuan dan ketrampilan. Keimanan mendorong kader untuk berani dan tidak mau tunduk di hadapan segala bentuk kemapanan serta ancaman duniawi. Pengetahuan membekali kader atas keadaan zaman dimana dia bergerak, dan ketrampilan merupakan bekal bagi kader agar mampu *survive* sekaligus bergerak di zamannya.

Di setiap zaman terdapat penanda-penanda yang membedakan satu zaman dengan zaman lainnya. Penanda itu terdapat dalam kenyataan dan harus dibaca oleh organisasi yang menginginkan kesambungan antara gerakan dengan zaman. Karena hanya dengan mengerti kenyataan zamannya, cita-cita gerakan melakukan perbaikan terhadap perikehidupan manusia dan masyarakat sesuai *garis Ilahiah* mungkin diwujudkan. Tanpa mengenali zaman sebagai medan geraknya maka organisasi akan ditampik oleh zaman. Bahkan tanpa membubarkan diripun, organisasi semacam itu akan lumpuh dengan sendirinya.

A. Refleksi Paradigma Pergerakan

Nalar gerak PMII secara teoritik mulai terbangun secara sistematis pada masa kepengurusan Sahabat Muhaimin Iskandar (Ketum) dan Rusdin M. Noor (Sekjend). Untuk pertama kalinya istilah Paradigma yang populer dalam bidang sosiologi digunakan untuk menyatakan apa yang oleh PMII disebut *prinsip-prinsip dasar yang akan dijadikan acuan dalam segenap pluraltas strategi sesuai lokalitas masalah dan medan juang*. Dimuat dalam buku berjudul Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran (November 1997), Paradigma Pergerakan disambut massif oleh seluruh anggota dan kader PMII di seluruh Indonesia. Paradigma Pergerakan, demikian „judulnya", dirasa mampu menjawab kegelisahan anggota pergerakan yang gerah dengan situasi sosial-politik nasional.

Dikemukakan dalam buku tersebut, salah satu latar belakang Paradigma Pergerakan (atau populer dengan nama Arus Balik) adalah kondisi sosio-politik bangsa yang ditandai oleh: 1) munculnya negara sebagai aktor atau agen otonom yang peranannya "mengatasi" masyarakat yang merupakan asal-usul eksistensinya, 2) menonjolnya peran dan fungsi birokrasi dan

teknokrasi dalam proses rekayasa sosial, ekonomi dan politik, 3) semakin terpinggirkannya sektor-sektor "populer" dalam masyarakat – termasuk intelektual, 4) diterapkannya model politik eksklusioner melalui jaringan korporatis untuk menangani berbagai kepentingan politik, dan 5) penggunaan secara efektif hegemoni ideologi untuk memperkokoh dan melestarikan legitimasi sistem politik yang ada. Lima ciri-ciri tersebut tidak jauh berbeda dengan negara-negara kapitalis pinggiran (*peripherial capitalist state*) (1997; hal. 3).

Medan politik orde baru merupakan arena subur bagi sikap perlawanan PMII terhadap negara. Sikap perlawanan tersebut didorong pula oleh konstruksi teologi *antoposentrisme-transendental* yang menekankan posisi *khalifatullah fil-ardh* sebagai perwujudan penghambaan kepada Allah („*abdullah*). Selain oleh teologi *antroposentrisme-transendetal*, sikap perlawanan itu juga didorong dua tema pokok, *pertama* tidak menyetujui adanya otoritas penuh yang melingkupi otoritas masyarakat dan *kedua* menentang ekspansi dan hegemoni negara terhadap keinginan bebas individu dan masyarakat. (1997; hal. 17). Berikut ini ialah skema (Althusserian) yang lazim digunakan untuk menjelaskan struktur penindasan negara.
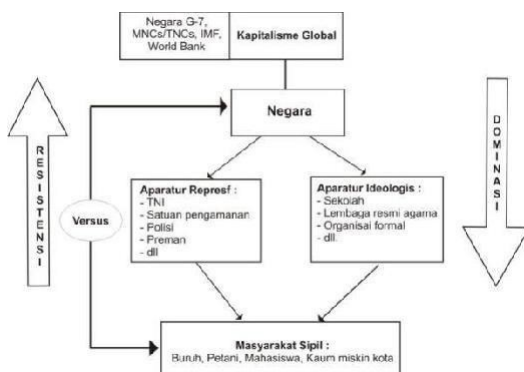
Bagian penting lain dalam paradigma tersebut adalah mengenai proses rekayasa sosial yang akan ditempuh PMII. Rekayasa sosial oleh PMII diarahkan menjadi dua pola yaitu *pasar bebas ide* (*free market of ideas* – FMI) dan *Advokasi*. FMI *mengasumsikan* adanya transaksi gagasan yang terjadi secara sehat yang dilakukan oleh individu-individu yang bebas dan kreatif sebagai hasil dari proses liberasi dan independensi. Dalam FMI, individu *diasumsikan* telah „sampai" pada penemuan

dan kesadaran individualitasnya sebagai subyek yang memiliki otoritas penuh di muka bumi – terlepas dari faktor di luar manusia (heteronom) yang membelenggu individu.

Rekayasa sosial melalui *advokasi* dilakukan untuk segala korban perubahan. Bentuk gerakannya ada tiga yakni sosialisasi wacana, penyadaran dan pemberdayaan serta pendampingan. Cita-cita besar dari *advokasi* tidak lain adalah sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat untuk mencapai angan-angan terwujudnya *civil society* (1997; hal. 30). Kedua jalan rekayasa tersebut memberikan energi yang luar biasa bagi PMII. Dikuatkan oleh bacaan tentang kondisi sosio-politik, dasar teologis dan filosofis, PMII berada di garis terdepan organisasi perlawanan terhadap negara. Lebih dari itu, di antara organisasi mahasiswa Islam, PMII menjadi organisasi paling progresif dan radikal dalam melakukan dekonstruksi teks-teks agama.

Pada periode sahabat Syaiful Bahri Anshari, diperkenalkan Paradigma Kritis Transformatif. Pada hakikatnya prinsip-prinsip dasar paradigma ini tidak jauh berbeda dengan Paradigma Pergerakan. Titik bedanya terletak pada pendalaman teoritik paradigma serta pengambilan eksemplar-eksemplar teori kritis madzhab Frankfurt (*Frankfurt School*) serta dari kritisisme wacana intelektual Muslim seperti Hassan Hanafi, Muhammad Arkoun, Ali Ashghar Engiiner dll. Sementara di lapangan terdapat pola yang sama dengan PMII periode sebelumnya; gerakan PMII terkonsentrasi pada aktivitas jalanan dan wacana-wacana kritis. Semangat perlawanan-oposisi (perang terbuka), baik dengan negara maupun dengan kapitalisme global masih sangat mewarnai gerakan PMII.

Kedua paradigma di atas mendapat ujian berat ketika KH Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI pada november 1999. Para aktifis PMII (dan aktifis civil society umumnya) mengalami kebingungan saat Gus Dur yang menjadi tokoh dan simbol perjuangan civil society di Indonesia naik ke tampuk kekuasan. Aktivis pro demokrasi mengalami dilema antara mendampingi Gus Dur dari jalur ekstraparlemen, atau bersikap sama sebagaimana terhadap presiden-presiden sebelumnya. Mendampingi atau mendukung didasari pada

kenyataan bahwa masih banyak unsur orba baik di legislatif maupun eksekutif yang memusuhi presiden ke-4 tersebut. Namun pilihan tersebut akan memunculkan pandangan bahwa aktivis prodemokrasi (termasuk PMII) menanggalkan semangat perlawanannya. Meski demikian, secara nasional sikap PB PMII di masa kepengurusan Sahabat Nusron Wahid secara tegas-terbuka mengambil tempat sebagai pendukung demokrasi dan program reformasi yang secara konsisten dijalankan oleh presidan Gus Dur, sejalan dengan berbagai organisasi pro-dem yang lain.

Hanya titik persoalannya terletak pada paradigma gerakan PMII itu sendiri. Secara massif, paradigma gerakan PMII masih kental dengan nuansa perlawanan frontal baik terhadap negara maupun terhadap kekuatan di atas negara (kapitalis internasional). Inilah yang ditemukan di tingkat aktivis-aktivis PMII. Sehingga ruang taktis-strategis dalam kerangka cita-cita gerakan yang berorientasi jangka panjang justru tidak memperoleh tempat. Aktifis-aktifis PMII masih mudah terjebak-larut dalam persoalan temporal-spasial, sehingga gerak perkembangan internasional yang sangat berpengaruh terhadap arah perkembangan Indonesia sendiri luput dibaca. Dalam kalimat lain, dengan energi yang belum seberapa, aktivis PMII sering larut pada impian “membendung dominasi negara dan ekspansi neoliberal saat ini juga”. Efek besarnya, upaya taktis-strategis untuk mengakumulasikan kekuatan justru masih sedikit dilakukan.

Inilah mengapa kemudian dalam buku Membangun Sentrum Gerakan di Era Neo Liberal yang diterbitkan pada era sahabat A. Malik Haramain (2004), dikatakan bahwa dua paradigma di atas telah patah (2004: hal. 30). Kedua paradigma di atas melanjutkan kagagapan PMII dalam bersinggungan dengan kekuasan. Setidak-tidaknya ada tiga alasan untuk menjelaskan patahnya kedua paradigma ini.

Pertama, keduanya didesain hanya untuk melakukan resistensi terhadap otoritarianisme tanpa membaca kompleksitas aktor di level nasional yang selalu terkait dengan perubahan di tingkat global dan siklus politik-ekonomi yang

terjadi. Sebagai contoh maraknya LSM pro demokrasi dan gencarnya isu anti militerisme pada dekade 1990-an adalah akibat dari runtuhnya Uni Soviet sebagai rival USA dalam kompetisi hegemoni dunia.

Kedua, dua paradigma di atas hanya menjadi bunyi-bunyian yang tidak pernah secara real menjadi *habitus* atau *laku* di PMII. Akibatnya bentuk resistensi yang muncul adalah resisten tanpa tujuan, yang penting melawan. Sehingga ketika perlawanan itu berhasil menjatuhkan Soeharto terlepas ada aktor utama yang bermain, PMII dan organ-organ pro demokrasi lainnya tidak tahu harus berbuat apa.

Ketiga, pilihan dua paradigma di atas tidak didorong oleh setrategi sehingga paradigma dianggap sebagai suatu yang baku. Mestinya ketika medan pertempuran telah berganti, maka strategipun harus berbeda. Sayangnya yang terjadi pada PMII, ketika medan pertempuran melawan otoritarianisme orde baru telah dilewati, PMII masih berpikir normatif dengan mempertahankan nalar paradigma lama.

Nalar penyusunan gerakan di Indonesia setelah Tan Malaka lebih bersifat teoritik-akademik (*logos*), yakni diawali dengan berbagai konsep ideal tentang masyarakat atau negara yang berasal dari barat. Celakanya, konsep-konsep yang dipakai di kalangan akademis kita hampir seluruhnya beraroma liberalisme. Sehingga di tingkat intelektual pun tidak ada kemungkinan untuk meloloskan diri dari arus liberalisme, yang di level politik dan ekonomi *maujud* dalam neoliberalisme. Dengan kata lain, dalam upaya melawan neoliberalisme, banyak gerakan terperangkap di langkah pertama yakni tersedot oleh konsep-konsep liberalisme. Demokrasi, HAM, civil society, sipil vs militer, federalisme dll. difahami sebagai agenda substansial. Padahal dalam lapangan politik dan ekonomi, kesemuanya tadi nyaris menjadi mainan negara-negara neoliberal. Maka boleh dikata, semenjak dari pikiran gerakan semacam itu memang tidak akan pernah berhasil.

Dengan kata lain persoalan sulitnya membangun paradigma berbasis kenyataan di PMII itu pararel dengan kesulitan membuat agenda nasional yang berangkat dari

kenyataan Indonesia. Konsekuensi yang harus diambil dari penyusunan paradigma semacam itu adalah, untuk sementara waktu organisasi akan tersisih dari pergaulan gerakan mainstream. Gerakan harus mampu berkayuh di antara gelombang panjang dan gelombang pendek, agar gelombang panjang tetap terkejar dan gelombang pendek tidak cukup kuat untuk menghancurkan biduk kita yang rapuh. Bagaimanapun untuk membangun gerakan kita harus mendahulukan *realitas* ketimbang *logos*.

B. Indonesia Warga Habitat Global

Semenjak zaman Nusantara hingga zaman Negara-Bangsa, perjalanan sejarah Indonesia selalu terkait dengan perkembangan di belahan dunia lain. Hubungan dagang antara penduduk kerajaan-kerajaan di Nusantara telah terjalin sejak abad ke-8 M dengan bangsa Tionghoa, India, Mesir, Persia. Lalu mulai tahun 1511 hubungan dagang tersebut terjalin dengan bangsa Eropa melalui armada Portugis yang dipimpin oleh Alfonso d"Albuquerque. Secara kasat mata pula, itulah hubungan perdagangan asimetris pertama yang terjalin antara kerajaan-kerajaan Nusantara dengan bangsa asing.

Bila ditelisik satu per satu, hampir tidak ada satupun kerajaan Nusantara yang tidak terkait dengan perkembangan bangsa/kerajaan lain di luar Nusantara. Sebagai misal, perjalanan sejarah Samudera Pasai berhubungan dengan konflik politik-ekonomi-teologi antara Dinasti Fatimiah di Mesir yang Syi"ah dan Shalahuddin Al-Ayyubi (Sunni/Syafi"i). Melalui Samudera Pasai, Dinasti Fatimiah menguasai perdagangan lada. Menurut catatan sejarah, hasil yang didapat dari perdagangan lada ketika itu mampu mengalirkan keuntungan yang berlipat bagi dinasti tersebut.

Hingga saat Dinasti Fatimiah berhasil dikalahkan oleh tentara Shalahuddin pada tahun 1168, hubungan Samudera Pasai dengan Mesir terputus. Baru lebih dari satu abad kemudian (1285) Syi"ah di Samudera Pasai berhasil digeser oleh kaum Sunni madzhab Syafi"i yang saat itu berpusat di Mesir. Bahkan Sultan Malikul Saleh (Marah Silu) dilantik sebagai raja

oleh Syaikh Ismail, utusan Dinasti Mamluk, dan menjadi raja Samudera Pasai pertama dari aliran Sunni. Keuntungan perdagangan lada dan berbagai jenis rempah-rempah pun mengalir kembali ke Mesir.

Kerajaan lain seperti Sriwijaya, Malaka dan Majapahit juga memiliki kecenderungan serupa. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai salah satu pusat agama Buddha dan selalu dikunjungi oleh para pendeta yang berziarah ke India. Untuk melindungi diri dari serangan kerajaan Siam, tahun 1403 raja Parameswara (Malaka) meminta pengakuan kedaulatan dari Kaisar Yung-Lo (Tiongkok/Dinasti Ming). Demikian pula Majapahit. Menjelang keruntuhannya, raja Majapahit terakhir Prabu Girindrawardhana (1468-1527) bahkan berupaya untuk mencari dukungan Portugis dalam melawan Demak.

Sejarah pembentukan negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia bahkan lebih jelas lagi dalam menunjukkan pengaruh gejolak di belahan dunia lain terhadap Indonesia. Kedatangan Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris ke bagian-bagian Nusantara merupakan buah dari persaingan dagang dan politik antar negeri-negeri Eropa tersebut. Salah satunya adalah persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol yang melahirkan perjanjian Tordessilas yang membelah dunia menjadi dua bagian dengan Eropa sebagai titik tengahnya. Bagian timur „dimiliki‟ oleh Portugis dan sebelah barat „diserahkan‟ kepada Spanyol.

Politik etis yang banyak melahirkan intelektual-nasionalis generasi pertama Indonesia juga merupakan gelombang kesekian dari dinamika politik dan ekonomi Belanda-Eropa. Termasuk Nasionalisme dan konsep negara-bangsa (*nation-state*), merupakan sublimasi teoritik-konseptual yang lahir dari pergulatan sosio politik dan sosio ekonomi bangsa-bangsa di Eropa. Nasionalisme dikenal pertama kali sebagai teori melalui catatan kuliah umum yang disampaikan oleh Ernest Renan di Universitas Sorbonne Paris tahun 1882. Karya itu berjudul "*Qu‟est-ce qu‟un nation?*" (*What is Nation?*) yang berakar jauh dalam sejarah sosial dan ekonomi Revolusi Perancis 1678.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 terjadi di moment anti-klimaks Perang Dunia II, tepat ketika Negara-negara Sekutu berhasil menundukkan negara-negara Axis. Dengan cerdik (dan berani) aktivis pergerakan nasional mencuri moment untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Keawasan mengamati gerak internasional, kecerdikan dan keberanian semacam itu ternyata belum muncul kembali hingga dekade pertama abad XXI ini. Padahal dalam periode-periode tersebut hingga saat ini, Indonesia tetap dipengaruhi oleh perkembangan di balahan dunia lain dan oleh kenyataan global. Siapa yang dapat menyangkal bahwa politik dan ekonomi Indonesia terpencil dari Perang Dingin sepanjang tahun 1946 s.d. 1990? Dan siapa dapat membuktikan bahwa ekonomi dan politik Indonesia terpisah dari gerak Sistem Dunia neoliberal pasca Perang Dingin?.

Potret sejarah ringkas di atas menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat dibaca tanpa mempertimbangkan dan menghitung alur gerak internasional. Bahkan dalam konteks gerakan, menghitung gerak internasional menjadi pra-syarat wajib dalam merumuskan gerakan di Indonesia. Ada pendapat bahwa pembacaan gerak internasional dirasa muluk-muluk dan terkesan tidak sambung dengan keadaan real sehari-hari orang per orang. Namun faktanya, negara-bangsa Indonesia merupakan bagian kenyataan global. Sehingga dalam konteks membangun gerakan, membaca kenyataan global dan posisi Indonesia di dalamnya mau tidak mau harus dilakukan.

C. Mempertimbangkan Mahasiswa

Apakah bacaan atas kenyataan di atas telah dapat ditangkap dalam langkah gerak mahasiswa selama ini? Melihat perjalanan sejarah gerakan mahasiswa, khususnya sejak 1966, tampaknya belum. Gerakan mahasiswa masih sering tersandung dalam jebakan issu dan heroisme yang membutakan. Dalam hal ini, idiom „demokrasi‟, „HAM‟, „anti-militerisme‟, „civil society‟ dll. lebih sering menjadi stimulan normatif yang berasal dari luar yang mengobarkan psikologi perlawanan. Idiom-idiom mulia itu seringkali hanya dipandang dari sisi normatifnya dan jarang

dibaca dalam sebuah kenyataan politik dunia. Kita akan membaca kecenderungan tersebut dalam tiga sub bab berikut ini.

a. Cermin Sejarah Gerakan Mahasiswa

Perguruan tinggi masih dipandang sebagai institusi independen sehingga banyak harapan akan adanya pemikiran-pemikiran baru tentang ke-Indonesiaan yang dihasilkan oleh institusi ini. Sebagai bagian dari civitas akademika, mahasiswa diharapkan mampu memberikan gagasan dan ide-ide ke-Indonesiaan. Namun ternyata dinamika perpolitikan negara sangat mudah mengerakkan mahasiswa sebagai kekuatan gerakan ekstra parlementer. Melalui peran ini, mahasiswa hendak mengartikulasikan aspirasi politiknya untuk mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Kesemuanya itu diniati sebagai artikulasi kepentingan rakyat, berbareng bergerak bersama rakyat, sehingga diharapkan akan menjadi satu gerakan *people power* yang masiff dan progresif.

Dalam fakta, cita-cita luhur mahasiswa Indonesia nyaris menjadi utopi. Gerakan mahasiswa Indonesia sering hanya dijadikan alat dari kelompok-kelompok kepentingan yang mengatasnamakan rakyat. Tiga fakta menunjukkan kesimpulan itu.

Pertama gerakan mahasiswa tahun 1945-1966, mahasiswa bangkit melihat kondisi negara yang sedang mengalami kegoncangan. Sistem politik nasional selalu mengalami perubahan bentuk pemerintahan, mulai dari Republik Indonesia Serikat (RIS), Demokrasi Terpimpin dan kembali lagi ke Republik. Lantas mulai dominannya partai komunis di pentas politik nasional juga membawa kekhawatiran bagi banyak kalangan di Indonesia. Tampaknya hanya sedikit yang sadar, bahwa tahun-tahun tersebut (1960-an) Indonesia menjadi panggung penting Perang Dingin.

Pada akhirnya mahasiswa memang „mampu" mengulingkan kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Namun kekuatan mahasiswa tidak muncul dengan sendirinya. ABRI mulai berinfiltrasi dalam tubuh gerakan mahasiswa

melalui Badan Kerja Sama Pemuda Militer yang terbentuk tahun 1957. Sebagai respon atas pertentangan ideologi ketika itu, ABRI melirik mahasiswa sebagai kelompok independen untuk menjadi mitra. Dengan menggulingkan Soekarno, mahasiswa telah membantu menaikkan Jenderal Soeharto untuk menduduki kursi presiden. Namun kemudian mahasiswa justru harus berhadapan dengan strategi depolitisasi oleh pemerintah, yang lebih tertarik untuk berkoalisi dengan intelektual dan teknokrat murni yang selama ini tidak pernah *concern* dengan persoalan politik.

Kedua gerakan mahasiswa tahun 1974/1975. Mahasiswa sempat terprovokasi oleh isu-isu anti Jepang sehingga pada tanggal 15 Januari 1975 (Malari), terjadi pembakaran produk-produk Jepang di Indonesia. Padahal gejolak politik ekonomi waktu itu merupakan akibat dari pertarungan perebutan pasar antara AS dan Jepang. Akibat Malari pemerintah mengeluarkan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang membatasi aktivitas mahasiswa dalam kegiatan minat-bakat.

Ketiga gerakan Mahasiswa tahun 1998. Faktor signifikan yang mendorong Soeharto mundur adalah fluktuasi kurs rupiah atas dollar AS dan berhentinya pasar modal dalam negeri. Faktor tersebut muncul sebagai respon atas kekuasaan Soeharto yang hanya berorientasi membangun istana ekonomi keluarga dan kroni, sehingga menutup peluang investasi pengusaha-pengusaha asing khususnya AS dan dinilai mengancam kepentingan internasional AS.

Situasi seperti ini, ditambah kondisi yang 32 tahun dirasakan rakyat, memunculkan isu-isu populis yang kemudian terkenal dengan 6 visi reformasi (Adili Soeharto, Cabut Dwi Fungsi ABRI, Hapus KKN, Tegakkan Supremasi Hukum, Otonomi Daerah dan Amandemen UUD`1945). Momentum gerakan mahasiswa kemudian dimanfaatkan oleh elit tertentu. *"Gerakan reformasi ini telah dimanipulasi para elit politik, baik elit politik yang lama maupun yang baru, yang masih berambisi meraih kekuasaan bagi diri dan kelompoknya dengan cara saling kompromi diantaranya lewat pemilu yang dilaksanakan tahun*

1999" (*Meluruskan Arah Perjuangan Reformasi Dan Merajut kembali Merah-Putih Yang Terkoyak* : Iluni UI). Akankah kita para mahasiswa sekarang kembali akan menjadi alat dan terprovokasi dengan isu-isu populis tertentu yang ternyata hanya menguntungkan kelompok tertentu dan jauh dari kepentingan riil masyarakat ?

b. Mitos Gerakan Moral

Terlepas dari sejarah panjang perjalanan gerakan mahasiswa di Indonesia, kekuatan mahasiswa hanya mampu menjadi kelompok *preasure group* yang ternyata didorong oleh kepentingan kelompok tertentu. Pada sisi lain mahasiswa tidak mampu memberikan satu rumusan konseptual dan solusi atas berbagai problematika transisi. Berbagai kegagalan harus kita akui sebagai bentuk kelemahan kita bersama, salah satunya berasal dari keterjebakan kita dalam stigma gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral.

Sejarah panjang mengenai peran gerakan mahasiswa di Indonesia, memang telah menggoreskan sebuatan gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral. Hal ini dilatarbelakangi oleh „keberhasilan" gerakan mahasiswa menumbangkan presiden Soekarno tahun 1966, Soeharto tahun 1998 dan Gus Dur tahun 2001. Latar belakang inil mempengaruhi kemunculan stigma gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral yang akan selalu menyuarakan kepentingan rakyat banyak dengan tombak issu-issu demokrasi, HAM, supremasi sipil dan lain-lain. Rumusan sederhananya, *"dengan menurunkan presiden, mahasiswa berarti berpihak kepada rakyat".*

Meminjam pandangan Ben Anderson dalam buku Revolusi Pemuda, peran pemuda sangat besar dalam menentukan masa depan sebuah bangsa. Dalam pepatah Arab disebut "*syubhanul yaum rijaalul ghoddi (pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan)".* Hal tersebut di atas paling tidak menjadi landasan epistimologi yang semakin menguatkan stigma gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral, sebagaimana kuatnya memori kolektif masyarakat yang menyebut bahwa pemuda Indonesia pada tahun 1928 telah

mempunyai andil besar terhadap bangsa Indonesia dengan keberhasilan menggelar sumpah pemuda.

Tahun 2001, Budiman Sudjatmiko dalam tulisannya di KOMPAS berjudul *Demoralisasi Gerakan Mahasiswa* mengartikan demoralisasi gerakan mahasiswasebagai surutnya kekompakkan berbagai elemen gerakan mahasiswa dalam merespon isu-isu yang berkembang. Menarik disimak, Budiman mengartikan *de-* yang artinya „tidak" atau „mengecil" dan *moral* yang diartikan respon mahasiswa yang mengunakan idiom-idiom demokratisasi, HAM, supremasi hukum dan lain-lain.

Di lapangan, gerakan mahasiswa sesungguhnya adalah gerakan politik.

Pertama, gerakan mahasiswa dalam orientasinya yang ingin melakukan perubahan, selalu mengunakan ukuran perubahan struktur atau lebih spesifik perubahan kebijakan sebagai ukuran keberhasilannya. Fenomena tentang perubahan struktur atau perubahan kebijakan yang terjadi di Indonesia selalu dihasilkan dari proses gerakan politik bukan gerakan moral.

Kedua, stigma gerakan moral tidak lain adalah bentuk justifikasi dari kebenaran akademis yang kelahirannya dilatarbelakangi oleh mitos independensi perguruan tinggi. Implikasinya pada cara pandang bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan murni dan independen, jauh dari kepentingan pragmatis dan kepentingan politik tertentu.

Ketiga, gerakan mahasiswa yang mengklaim dirinya menyuarakan aspirasi rakyat dengan mengunakan idiom demokrasi, HAM, supremasi sipil, supremasi hukum dan yang lainnya, telah menjadikan idiom-idiom tersebut sebagai standar moral gerakan. Moral kemudian menjadi alat untuk mengukuhkan eksistensi gerakan mahasiswa dan menyerang lawan (baca : negara). Sementara pada sisi lain negara sebagai bentuk dari konsep trias politika (eksekuti, legeslatif dan yudikatif) juga mengunakan legitimasi moral dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Keempat moral dalam gerakan mahasiswa sebenarnya hanya menyetuh pada aspek psikologi, emosional dan romantisme, bukan moral yang menjadi élan gerakan. Kebangkitan gerakan mahasiswa lebih signifikan dipengaruhi faktror eksternal seperti Badan Kerja Sama Pemuda-Militer (BKSPM) yang terbentuk tahun 1957, adalah bentuk infiltrasi politik ABRI. dan gerakan mahasiswa tahun 1974/1975 yang melakukan pembakaran produk-produk Jepang di Indonesia, sebenarnya hanyalah akibat dari pertarungan antara AS dan Jepang untuk memperebutkan pasar di Indonesia.

Keberadaan moral dalam gerakan mahasiswa tidak lain adalah bentuk pelarian dari individu seorang mahasiswa yang tidak mampu membebaskan diri dari belenggu moral dalam konteks pribadi, yang kemudian membawanya dalam komunitas gerakan mahasiswa. Tidak bebasnya belenggu disini meliputi:

Pertama, belenggu moral dalam prespektif teologis yang mengikat relasi manusia dengan Tuhan dalam menjalankan hukum agama dan kewajiban sebagai seorang hamba. Individu tidak mampu keluar dari penilaian dosa-pahala dan halal-haram.

Kedua, belenggu dalam perspektif norma yang mengikat hubungan antar individu dan masyarakat. Individu tidak mampu keluar dari penilaian masyarakat terhadap perilaku, bermoral atau amoral.

Dari penjelasan di atas, maka moral sebenarnya adalah system nilai yang berlaku universal bagi individu bukan komunitas (baca gerakan) dan menjadi alat mekanisme kontrol atas perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Sejarah PMII & Mahasiswa Kontemporer

Saat didirikan, PMII merupakan bagian integral dari organisasi (Partai) NU. PMII dilahirkan sebagai sayap mahasiswa NU disamping GP Ansor di sayap pemuda, Muslimat di sayap ibu-ibu, Fatayat di sayap remaja putri dan IPNU/IPPNU di sayap pelajar, SARBUMUSI di sayap buruh dan LESBUMI di sayap seni. Maka keterlibatan PMII di masa-

masa awal berdirinya sebagai penyokong Partai NU adalah sebuah keharusan.

Pada tahun 1974 ketika NU dipaksa melakukan fusi bersama partai-partai Islam lain dalam PPP, Deklarasi Independensi Murnajati-Malang juga merupakan pilihan sejarah yang sangat relevan. Dengan tegas PMII menyatakan independen dari NU karena PMII memang harus menegaskan visinya sebagai organisasi yang lepas dari kepentingan partai politik. Demikian pula, deklarasi interdependensi pada dekade 1980, yang menegaskan kesaling-tergantungan PMII-NU adalah bukti bahwa PMII tidak akan dapat meninggalkan komitmennya terhadap *jama"ah* Nahdliyyin.

Perdebatan tentang pola hubungan *dependensi-independensi-interdependensi* ini mulai berhenti. Secara nasional PMII mulai fokus pada gerakan yang mencita-citakan terjadinya perubahan sistem dalam jangka panjang. Dengan mencukupkan perdebatan tersebut, PMII mulai menghindari jebakan primodialisme gerakan. Apabila perdebatan tersebut berlanjut, kemungkinan yang paling nyata adalah PMII tidak akan dapat pernah berperan sebagai agen transformasi di dalam NU, namun malah akan menjadi bagian dari kemapanan NU yang membekukan.

Dengan demikian komitmen PMII terhadap NU adalah komitmen yang mengambil bentuk *class of struggle* (kelas pejuang). Yakni menempatkan *jama"ah* Nahdliyyin sebagai bagian warga dari negara-bangsa Indonesia kemana pertaruhan perjuangan-gerakan PMII dialamatkan. Penegasan tersebut perlu dilakukan karena pusat keprihatinan PMII bukanlah nasib kelompok tertentu, melainkan semata-mata negara-bangsa Indonesia. Melalui penegasan itu, diharapkan gerakan PMII saat ini dan di kemudian hari akan lebih ekstensif baik dalam ruang maupun bentuknya dan tidak monolitik memusat dalam lingkaran Nahdlatul „Ulama.

Namun harus dicatat bahwa penegasan tersebut bukan berarti PMII menegasikan ruang-ruang gerak kader PMII yang saat ini telah tercipta. Menurut hemat kami, tidak ada yang perlu dikecam dan dipersalahkan apabila dari fakta saat ini

kader-kader PMII masih memusat di lingkaran organisasi NU. Kita masih boleh berharap, bahwa pemusatan tersebut akan bermakna strategis bagi gerakan di kemudian hari. Selain itu fakta tersebut memang tercipta secara struktural ketika sejak dalam pikiran, kita belum mampu untuk memilah antara misi-posisi-fungsi dalam gerakan. Fakta tersebut juga tercipta ketika habitat pergaulan kita, ternyata, masih dibatasi oleh sekat-sekat simbolik, bukan dijembatani oleh gagasan dan keahlian.

Bagi mahasiswa saat ini, gerakan bukan istilah familiar yang dekat dengan kenyataah sehari-hari yang mereka hadapi. „Gerakan‟ mungkin hidup dalam imajinasi mereka setelah membaca literatur sejarah nasional atau berita tentang aksi mahasiswa. Dari masukan-masukan tersebut, „gerakan‟ mendapat citra tersendiri beriringan dengan citra tentang aktivis mahasiswa. Barangkali ini tantangan pertama yang harus diterima oleh PMII.

Tantangan kedua, input kader PMII saat ini tidak lagi hanya individu yang dibesarkan dalam tradisi santri dengan kemampuan dasar agama dan semangat "tradisionalisme" yang tinggi. Meskipun unsur-unsur tersebut masih didapati, namun latar belakang kader PMII semakin beragam. Mulai banyak juga kader PMII yang bukan berasal dari kalangan santri, bukan pedesaan dan sedikit memiliki bekal pengetahuan agama.

Ketiga, input kader PMII hakikatnya memang masih membawa mentalitas agraris. Seberapapun sudah cukup „urban‟ seorang kader PMII, dalam perilaku, mentalitas agraris masih tercermin. Misal, meskipun secara verbal setiap kader PMII menginginkan „PMII profesional‟, namun dalam laku keseharian bentuk komunalisme masih menarik perhatian. Sehingga konflik yang seringkali muncul di kalangan kader, lebih banyak berpangkal pada konflik eksistensial-perasaan daripada konflik karena perbedaan visi, strategi atau pandangan.

Keempat mahasiswa sekarang adalah generasi mahasiswa yang dilahirkan tahun-tahun tengah dekade 1980 -

sebentar lagi mahasiswa kelahiran tahun 1990-an. Mereka menjadi remaja ketika situasi krisis tengah berada di titik kulminasinya. Sehingga perwatakan (permukaan) mereka, tidak mungkin disamakan dengan mahasiswa kelahiran tahun 1970-an. Ini tantangan paling dekat yang berhubungan dengan rekruitmen sekaligus pengkaderan.

Empat tantangan di atas menuntut PMII untuk banyak menata diri agar dapat diterima oleh mahasiswa saat ini sehingga regenerasi pergerakan dapat berlangsung. Ekstensifikasi taktik pendekatan di lapangan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Dalam buku Pendidikan Kritis Transformatif (PB PMII 2001) disebutkan taktik *masuk dari pintu mereka, keluar dari pintu kita* (2001: 58). Secara konseptual tampaknya taktik inilah yang paling tepat dikembangkan dalam menghadapi mahasiswa kontemporer yang makin beragam. Secara teknis, kami harus jujur mengakui, kami belum dapat merumuskan secara detail. Harapan kami, konsep tersebut dapat dikembangan di lapangan.

d. Gerakan PMII : *Multy Level Strategy*

Akhir abad XX dan awal abad XXI ini kita telah menyaksikan maraknya gerakan anti globalisasi yang telah mengharu-biru Seattle hingga Genoa dan terus menyebar ke negara-negara Dunia Ketiga. Bagaimanapun, ketahanan dan kekuatan gerakan itu masih akan diuji oleh sejarah. Namun secara logis gerakan konfrontatif semacam itu akan mengalami kegagalan dalam situasi seperti sekarang, karena nalar anti globalisasi pada dasarnya sama dengan nalar globalisasi. Di dalamnya tidak terdapat ruang strategi.

Di negara-negara maju gerakan semacam ini dimungkinkan karena ditopang oleh kesadaran setrategis yang mendalam, sementara di negara-negara pinggiran (*periphery*) seperti Indonesia gerakan ini berubah menjadi semacam gerakan konsorsium LSM anti globalisasi yang (justru) mengajukan diri untuk mendapatkan kucuran dana dari *funding agency*. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak dari *funding agency* yang juga merupakan kepanjangan tangan dari rezim modal atau negara dunia pertama.

Atau katakanlah gerakan itu benar-benar didasari oleh suatu keyakinan bahwa globalisasi telah membunuh ekonomi masyarakat kecil, namun apabila gerakan itu tidak mempertaruhkan sebuah skenario pasca perlawanan (skenario sukses) maka gerakan itu akan hanya menjadi ajang heroisme individu-individu belaka. Dalam keadaan demikian gerakan mudah dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk meraih keuntungan. Lantas apakah gerakan yang tepat adalah gerakan pro atau anti globalisasi, bila kita lihat arus akuisisi oleh *Multi National Corporation* di Indonesia?

Gerakan pro globalisasi tanpa *reserve* berarti menghanyutkan diri dalam arus globalisasi tanpa pengetahuan yang cukup bagaimana harus menepi, karena sekali tersedot arus maka sulit untuk kembali. Bentuknya yang paling kongkrit adalah menjadi agen kepentingan-kepentingan global dalam segala aras. Hanyut dalam arus neoliberalisme berati menjadikan uang sebagai tanah air dan bangsa, karena ideologi pasar bebas tidak mengenal batas-batas teritori negara-bangsa. Dalam neoliberal hanya dikenal hambatan tarif, privatisasi, liberalisasi, deregulasi, investasi. Dalam kenyataan neoliberal saat ini, semua itu merupakan pintu aliran keuntungan bagi pemodal (swasta) raksasa dan negara dunia pertama. Di antara warga bangsa ini mungkin akan ada yang menikmati keuntungan tersebut, namun yang paling mungkin keuntungan itu hanya mampu membesarkan individu atau keluarga tertentu, bukan negara-bangsa Indonesia.

Baik gerakan pro ataupun anti globalisasi akan mengalami kegagalan karena tidak mempertaruhkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar proyek politik isu tunggal yang selalu memancing heroisme. Gerakan ini tidak didesain untuk melakukan perubahan sistem dalam jangka panjang. Karena nalarnya yang mediatik (tingkat keberhasilan diukur dari liputan media terhadap aksi-aksinya) maka sangat jelas bahwa orientasinya hanya bersifat jangka pendek. Gerakan-gerakan inilah yang justru didorong oleh struktur neoliberalisme karena gampang dipatahkan dan diaborsi.

Mari kita mencoba melihat nalar masing-masing gerakan ini. Gerakan anti globalisasi (jika sungguh-sungguh) didominasi oleh nalar anti asing (*xenophobia*) yang melihat setiap orang luar yang masuk ke dalam wilayahnnya sebagai ancaman tanpa mencoba mengambil manfaat dari interaksi yang mungkin terjadi antara keduanya. Karena globalisasi berintikan pemain-pemain asing yang dilihat sebagai ancaman, maka untuk melawannya harus dengan gerakan anti globalisasi. Gerakan ini menafikan interaksi dan komunikasi, pertukaran antara *global structure* dengan *local structure*. Nalar anti asing ini bermanfaat jika secara setrategis dapat digunakan untuk membangkitkan semangat dan kreatifitas internal berhadapan dengan tantangan global tadi. Tetapi dampak yang ditimbulkan oleh nalar semacam ini adalah isolasi diri dari pergaulan dunia tanpa mencoba untuk belajar dari keberhasilan negara-negara lain, walaupun tidak harus mengikuti jalan mereka.

Jika diletakkan dalam kondisi kerapuhan dan fragmentasi struktur lokal seperti ditemukan saat ini, nalar para pendukung buta globalisasi sesungguhnya adalah nalar agen (alias *marsose*). Ibarat hubungan antara *tuan* dengan *hamba*, nalar agen berbentuk kepasrahan *hamba* untuk melakukan apapun yang dipesan/diperintahkan oleh *tuannya*. Dalam nalar agen tidak ada kesetiaan *hamba* terhadap komunitas besar darimana ia berasal, sebaliknya justru menghanyutkan diri dalam hiruk-pikuk kepentingan *sang tuan*.

Di level praksis, gerakan anti globalisasi akan dihadapkan dengan bentuk nalar agen tersebut. Jadi medan pertempuran kedua gerakan ini tetap di dalam kampung sendiri sehingga ketika pertempuran usai, yang tersisa hanya puing-puing. Sementara barang-barang berharga milik kampungnya telah dijarah oleh sang juragan.

Kedua model gerakan ini tidak memiliki rencana jangka panjang (*contingency plan*) karena memang tidak didesain untuk dapat *survive*, ini dapat terlihat dari jalur-jalur produksi-distribusi-*warring position* (perebutan posisi). Gerakan

seharusnya ditujukan untuk kemajuan komunitas besar dari mana gerakan berasal. Kemajuan dalam pengertian naik-kelas dari komunitas yang tidak dapat berbuat apa-apa menjdi bersuara dan didengar oleh orang lain. Tentu naik-kelas di sini diukur dalam level dunia, kerja-kerja gerakan adalah kerja-kerja sistem dunia (baca: peradaban) sehingga para aktivis gerakan tidak terjebak dalam kenikmatan sesaat yang ditawarkan oleh sistem yang hendak diubahnya sendiri.

Dalam situasi dan kondisi kuatnya penetrasi struktur global di atas, yang dilancarkan pada fragmentasi struktur lokal, maka strategi gerakan yang paling dimungkinkan dan memiliki tingkat *survival* yang tinggi adalah gerakan yang mampu bermain di tengah-tengah tekanan ini. Dari sini gerakan ini setidaknya melakukan perebutan (*warring position*) di tiga front sekaligus, yaitu *local front, global front* dan *internal-movement front*. Karena itu setrategi yang harus digunakan adalah *multi level setrategy*. Kita harus meninggalkan *single setrategy* yang selama ini kita gunakan dengan dalih konsistensi gerakan. Sehingga bukan lagi *anti-systemic movement* ala Wallerstein ataupun *systemic movement* yang bertujuan untuk memperkuat sistem yang berjalan, karena keduanya mudah terpeleset menjadi korban.

Kita memilih model *non systemic movement* karena gerakan ini memungkinkan untuk berjalan dalam sistem sambil menciptakan *conditions of possibilities* untuk membangun sistem yang sama sekali berbeda. Ini terkait erat dengan strategi gerakan multi-level dalam front yang berbeda.
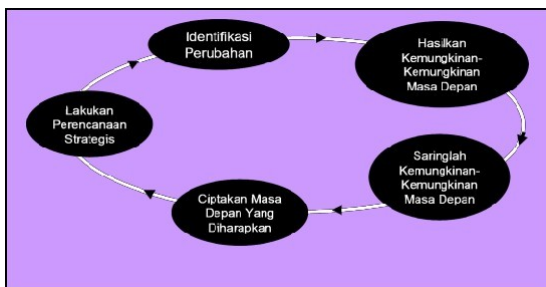
Dengan demikian, gerakan ini meniscayakan *multi centers* yang saling memahami posisi masing-masing, dalam tataran tertentu memang diperlukan *central-planner*.

Gerakan di tiga front tersebut secara terpusat memerlukan kelenturan yang luar biasa, ini terkait dengan energi di ketiga front. Pada suatu ketika struktur global diperlukan untuk menghapuskan *local structural constraints* yang membahayakan gerakan. Demikian pula struktur lokal juga diperlukan untuk menghambat gerak maju struktur global tersebut. Di luar keduanya front dalam gerakan (*internal-movement*) menempati posisi yang paling penting dalam kontinuitas gerakan membangun sistem, karena front ini adalah *home-base* bagi kedua yang lain. Justru energi yang diperoleh dari perebutan di front lokal dan global tersebut harus dipertaruhkan untuk memperkuat front ini. Di sinilah hidup mati gerakan.

Di tingkat operasional paradigma ini dapat dimulai dengan hal-hal yang sangat sederhana. Untuk front global dapat dimulai dengan membangun sebuah pusat kajian untuk pasar bebas, pusat kajian geopolitik, pusat kajian Cina dan lain sebagainya.

Sementara untuk front lokal dapat dimulai dengan membangun kajian tentang kerja-sama antar pulau (*insular cooperation*) dan sebagainya untuk membuat jalur-jalur konvensional patah. Pada gilirannya front dalam gerakan menyediakan mekanisme kaderisasi yang secara terus menerus menyediakan para pemain untuk mendidtribusikan kader di semua front. Sebagai *home-base* maka front ini harus benar-benar aman secara total (*totally secured*), sehingga secara akumulatif-sirkular gerakan ini akan memperbesar ruang pengaruhnya (*sphere of influence*) untuk membangun tata peradaban baru di masa depan. Bagan di atas ialah gambaran sederhana logika-sirkular dari “pemikiran masa depan” PMII ini (**lihat bagan di atas).**

STUDI GENDER DAN KELEMBAGAAN KOPRI

A. Pengertian Gender sebagai Konstruksi Sosial

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris, dilihat dalam kamus tidak secara jelas membedakan antara pengertian kata seks dan gender. Istilah seks atau jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan istilah gender yang berarti seks atau jenis kelamin yang dikontruksi secara sosial dan cultural. Gender adalah pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Selama ini secara normative laki-laki selalu dituntut menjadi kepala keluarga dan perempuan menjadi ibu rumah tangga, dan dasar pembentukan norma pembagian kerja secara seksual ini dikaitkan dengan kodrat. Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dengan (alat) tanda-tanda tertentu pula, bersifat universal dan permanen, tidak dapat dipertukarkan, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau kodrat.

Pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep tersebut (konsep seks dan konsep gender) sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan. Istilah gender dikemukakan untuk menjernihkan pengertian masyarakat tentang kodrat tersebut.

Di bawah ini kita bisa melihat perbedaan gender dan seks:

Seks	Gender
Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan	Pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara

berikut fungsi reproduksinya.	perempuan dan laki-laki atas dasar konstruksi sosial di masyarakat.
Ciptaan tuhan bersifat kodrati, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman dan dimana saja.	Bentukan manusia, bersifat sosial dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kebutuhan kesepakatan, kesempatan dan kepatutan budaya.
Perempuan: rahim, ovum, ASI,menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Laki-laki: spermatozoa, membuahi.	Peran sosial: perempuan (bidang domestik): memasak, menyapu, mengatur rumah tangga, merawat anak, mengasuh/mendidik anak. Laki-laki(bidangpublic): mencari nafkah, pemimpin, pejabat, dll.

Namun kadangkala kaum perempuan mendapatkan ketidakadilan melalui diskriminasi. Hal ini bisa terjadi karena ketidak fahaman terkait peran antara laki-laki dan perempuan. Manifestasi dari diskriminasi gender menurut Mansour Fakih dapat dilihat dari berbagai bentuk:

1. *Stereotip*: peleburan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang selalu berkonotasi negative sehingga menimbulkan masalah. Contoh: perempuan selalu dinilai lemah, cerewet, dll. Sementara laki-laki dipandang kuat, rasional,dll.
2. *Subordinasi*: penempatan salah satu jenis kelamin lebih unggul dari jenis kelamin lainnya dari aspek status, peran dan relasi yang tidak setara (ketimpangan sosial).
3. *Marginalisasi*: proses peminggiran secara sistematik baik disengaja atau tidak terhadap jenis kelamin tertentu.
4. *Double burden*/ beban kerja berlipat dapat berupa pemaksaan atau pengabaian. Salah satu jenis kelamin untuk menanggung beban aktifitas berlebihan, disebabkan pembakuan peran secara dikotomis produktif-reproduktif

untuk laki-laki dan perempuan, sehingga berdampak pada pola pembagian kerja yang tidak fleksible.

5. Kekerasan (violence) berbasis gender adalah kekerasan yang dilakukan oleh jenis kelamin berbeda yang disebabkan pandangan bias gender dimana menampakkan salah satu jenis kelamin lebih superior dan yang lain dianggap inferior.

Perkara gender bukan perkara perempuan tetapi perkara relasi sosial yang melibatkan laki-laki dan perempuan secara bersamaan, perkara gender bukan perkara individu, namun perkara sosial budaya, yang tidak mungkin dislesaikan secara personal. Kesetaraan gender bukanlah kemenangan atas laki-laki tetapi kemenangan keadilan atas penindasan yang mendiskriminasikan perempuan.

B. Apa itu KOPRI?

KOPRI merupakan singkatan dari Korp PMII Puteri yang lahir 25 November 1967, merupakan wadah kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Prinsip kesetaraan KOPRI yang merupakan salah satu bagian prinsip kesetaraan dalam Al-Qur"an sebagai khalifatullah fil ardl dan keberadaannya menjadi rahmat bagi segenap alam.

Dalam konteks kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan keberadaan KOPRI diharapkan mampu menjadi salah satu kelompok efektif yang aktif dalam memberikan tawaran-tawaran gerakan untuk mengurai persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat misalnya persoalan HAM, demokrasi, globalisasi, hokum, politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kebudayaan, keberagamaan dan pluralism, lingkungan dan yang paling khusus adalah persoalan gender.

Untuk itu, KOPRI akan selalu melakukan pembacaan kritis dan memiliki sensitifitas gender dalam mensikapi produk-produk kebijakan pemerintahan dengan memberikan alternative-alternatif berdasarkan tawaran gagasan yang lebih mengakar dan relevan dengan kepentingan masyarakat khususnya perempuan. Dan pembacaan yang kritis adalah pembacaan yang bersifat multidimensi dan berkelanjutan,

sehingga KOPRI membutuhkan dukugan moral, politik, sekaliigus intelektual khussunya dari PMII sebagai induk gerakan agar setiap pilihan gerakan yang diambil KOPRI nantinya akan saling menguatkan dan sinergis dengan grand design yang telah dirancang PMII dalam melihat persoalan masyarakat, negara dan dunia.

KOPRI merupakan badan semi otonom PMII, dengan kata lain KOPRI pun turut bagaimana memastikan proses kaderisasi kader putri di PMII berjalan dengan baik. Dengan landasan Al-Qur"an surat Ali Imran ayat 104 yaitu:

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma"ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung,"

KOPRI sebagai alat perjuangan kader putri di PMII harus mampu menjadi pelopor dalam perjuangan pergerakan pembebasan kaum mustad"afin dari penindasan. Dengan bersatu terhadap semua sector menjadikan semangat untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi guna mampu menciptakan kader KOPRI yang objektif dan ilmiah dan tidak didasari sisi subjektif, konsolidasi pengetahuan dan konsolidasi gerakan terus kami upayakan.

Kelembangaan KOPRI yaitu sama seperti PMII. Dimana ada PB KOPRI, PKC KOPRI, PC KOPRI, PK KOPRI sampai
dengan PR KOPRI di tingkatan kepengurusan yang paling bawah.

KOPRI Cirebon harus mengawal dan menjadi penggerak di setiap lini dan garda terdepan dalam terciptanya pemimpin-pemimpin perempuan yang ideologis. Namun hal ini harus melalui proses yag penjang, ada tiga proses yang menjadi barometer yaitu mambaca, diskusi, dan menulis, inilah dinamika yang harus dilakukan. Selanjutnya untuk melakukan komunikasi kepada alumni selalu dilakukan sebagai silatul harokah dan spirit gerakan bagi kami untuk menumbuhkan motivasi. Aswaja salah satu metode berfikir yang masih penting dan relevan dalam membaca setiap persoalan. Sehingga

terwujudnya *Nahdlatul Nisa* atau dengan kata lain Kebangkitan Kaum Perempuan.

BAB II
BELAJAR DAN MEMAHAMI
KE-MAHASISWA-AN

MAHASISWA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

"Sejarah dunia adalah sejarah orang muda, apabila angkatan muda mati rasa, maka matilah sejarah sebuah bangsa," -Pramoedya Ananta Toer-

A. Sejarah Pergerakan Mahasiswa di Indonesia

Apa yang dikatakan Pram –sapaan akrab Pramoedya Ananta Toer- di atas merupakan apresiasi terhadap pemuda khususnya mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengubah sejarah kebangsaan dan perjalanan demokrasi. Kita bisa melihat bagaimana peranan mahasiswa mampu merubah wajah perpolitikan dengan gerakan reformasinya. Jauh kebelakang kita mengenal angkatan gerakan kemahasiswaan dengan segala momentum sejarah kebangsaan di tanah air.

Sejarah telah mencatat, dari mulai munculnya Kebangkitan Nasional hingga tragedi 1998, mahasiswa selalu menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Sebut saja gerakan mahasisa pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa pemberontakan PKI, masa Orde Lama, hingga masa Orde Baru dengan gerakan reformasinya, peran mahasiswa tidak pernah absen dalam catatan peristiwa penting tersebut.

Dalam hal ini Gus Dur pernah menyatakan bahwa dibandingkan dengan institusi lain seperti DPR, eksekutif dan yudiklatif, gerakan mahasiswa yang menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah yang paling memiliki dasar konstitusi, terutama yang dituangkan dalam Pembukaan (Preambule) UUD 45. Gerakan-gerakan mahasiswa memiliki landasan hukum yang jelas. Meski tidak harus semua gerakan mahasiswa dalam bentuk demonstrasi dan aksi. Seperti kita mengenal sosok H. Mahbub Djunaidi si Pendekar Pena -sekaligus pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)- karena tulisan-tulisannya yang kritis, menukik dan tajam.

Ada baiknya penulis sedikit menjelaskan sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia dari jaman kemerdekaan

hingga gerakan reformasi 1998 bahkan hingga gerakan mahasiswa hari ini.

1. Gerakan Mahasiswa Tahun 1928 – 1945

Diawali dengan kembalinya mahasiswa ke tanah air yang bergabung dalam Indonesische Vereeninging (Perhimpunan Indonesia) yang kecewa dengan perkembangan kekuatan-kekuatan perjuangan di Indonesia. Mereka membentuk kelompok studi yang berpengaruh, karena keaktifannya dalam diskursus kebangsaan saat itu. Pertama, adalah Kelompok Studi Indonesia (Indonesische Studie-club) yang dibentuk di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1924 oleh Soetomo. Kedua, Kelompok Studi Umum (Algemeene Studie-club) direalisasikan oleh para nasionalis dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang dimotori oleh Soekarno pada tanggal 11 Juli 1925. Dengan munculnya gerakan tersebut tercetuslah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Konggres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta.

Gerakan mahasiswa tahun 1945, dikenal dengan istilah angkatan muda 45 yang bersejarah. Gerakan ini membentuk kelompok bawah tanah yang antara lain dipimpin oleh Chairul Saleh dan Soekarni saat itu, yang terpaksa menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan, peristiwa ini dikenal kemudian dengan peristiwa Rengasdengklok.

2. Gerakan Mahasiswa Tahun 1966

Gerakan ini dikenal dengan istilah angkatan 66, diawali dengan kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional, dimana sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Borneo, dst. Angkatan 66 ini mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten Negara. Dan berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Eksekutif pun beralih dan berpihak

kepada rakyat. Peralihan ini menandai berakhirnya Orde Lama berpindah ke Orde Baru.

Meski ada sebagian yang mengatakan bahwa gerakan 66 yang anti Soekarno –yang saat itu mengakomodir PKI- merupakan kegagalan mahasiswa pada saat itu karena ditunggangi kepentingan Soeharto. Namun terlepas dari kepentingan tersebut gerakan ini merupakan gerakan yang merubah sejarah bangsa Indonesia.

3. Gerakan Mahasiswa Tahun 1972

Gerakan ini dikenal dengan terjadinya peristiwa MALARI (Malapetaka Lima Belas Januari). Tahun angkatan gerakan ini menolak produk Jepang dan sinisme terhadap warga keturunan. Tokoh mahasiswa yang mencuat pada gerakan mahasiswa ini seperti Hariman Siregar, sedangkan mahasiswa yang gugur dari peristiwa ini adalah Arif Rahman Hakim.

4. Gerakan Mahasiswa Tahun 1980

Gerakan pada era ini tidak popular, karena lebih terfokus pada perguruan tinggi besar saja. Puncaknya tahun 1985 ketika Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Saat itu Rudini berkunjung ke ITB. Kedatangan Mendagri disambut dengan Demo Mahasiswa dan terjadi peristiwa pelemparan terhadap Mendagri. Buntutnya Pelaku pelemparan yaitu Jumhur Hidayat terkena sanksi DO (Droup Out) oleh pihak ITB.

5. Gerakan Mahasiswa Tahun 1990

Isu yang diangkat pada gerakan era ini sudah mengerucut, yaitu penolakan diberlakukannya terhadap NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus / Badan Kordinasi Kampus) yang membekukan Dewan Mahasiswa (DEMA/DM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Pemberlakuan NKK/BKK mengubah format organisasi kemahsiswaan dengan melarang Mahasiswa terjun ke dalam politik praktis, yaitu dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, dimana Organisasi Kemahasiswaan pada

tingkat Perguruan Tinggi bernama SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi).

Organisasi kemahasiswaan seperti ini menjadikan aktivis mahasiswa dalam posisi mandul, karena pihak rektorat yang notabane perpanjangan pemerintah (penguasa) lebih leluasa dan dilegalkan untuk mencekal aktivis mahasiswa yang berbuat "over", bahkan tidak segan-segan untuk men-DO-kan. Mahasiswa hanya dituntut kuliah dan kuliah saja. Di kampus intel-intel berkeliaran, pergerakan mahasiswa dimata-matai. Maka tidak heran jika misalnya hari ini menyusun strategi demo, besoknya aparat sudah siap siaga. Karena banyak intel berkedok mahasiswa.

Pemerintah Orde Baru pun menggaungkan opini adanya pergerakan sekelompok orang yang berkeliaran di masyarakat dan mahasiswa dengan sebutan OTB (organisasi tanpa bentuk). Masyarakat pun termakan dengan opini ini karena OTB ini identik dengan gerakan komunis.

Sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah tidak berhenti pada diberlakukannya NKK/BKK, jalur perjuangan lain ditempuh oleh para aktivis mahasiswa dengan memakai kendaraan lain untuk menghindari sikap refresif Pemerintah, yaitu dengan meleburkan diri dan aktif di Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indoenesia), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atau yang lebih dikenal dengan kelompok Cipayung.

6. Gerakan Mahasiswa Tahun 1998

Gerakan mahasiswa era sembilan puluhan mencuat dengan tumbangnya Orde Baru dengan ditandai lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, tepatnya pada tanggal 12 Mei 1998.

Gerakan mahasiswa tahun sembilan puluhan mencapai klimaksnya pada tahun 1998, diawali dengan terjadi krisis moneter di pertengahan tahun 1997. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Mahasiswa pun mulai gerah dengan penguasa ORBA, tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda Reformasinya mendapat simpati dan dukungan yang luar biasa dari rakyat. Mahasiswa menjadi tumpuan rakyat dalam mengubah kondisi yang ada, kondisi dimana rakyat sudah bosan dengan pemerintahan yang terlalu lama 32 tahun. Politisi diluar kekuasaan pun menjadi tumpul karena terlalu kuatnya lingkar kekuasaan, dan dikenal dengan sebutan jalur ABG (ABRI, Birokrat, dan Golkar).

Simbol Rumah Rakyat yaitu Gedung DPR/MPR menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia, seluruh komponen mahasiswa dengan berbagai atribut almamater dan kelompok semuanya tumpah ruah di Gedung Dewan ini, tercatat FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta), FORBES (Forum Bersama), dan FORKOT (Forum Kota). Sungguh aneh dan luar biasa, elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu dengan satu tujuan: Turunkan Soeharto.

Memang lengsernya Soeharto seolah menjadi tujuan utama pada gerakan mahasiswa sehingga ketika pemerintahan berganti, isu utama kembali kepada kedaerahan masing-masing.

Reformasi terus bergulir, perjuangan mahasiswa tidak akan pernah berhenti sampai disini. Perjuangan dari masa ke masa akan tumbuh jika penguasa tidak berpihak kepada rakyat.

B. Nilai Penting Organisasi Pergerakan Mahasiswa

Dari peristiwa-peristiwa gerakan mahasiwa di atas dapat kita simpulkan bahwa Mahasiswa memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat

Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan segala bentuk ergerakan, perjuangan, bahkan perlawanan.

Untuk itu ada baiknya kita merenung bersama akan peran mahasiswa sebagai *Iron Stock*, *Guardian of Value*, dan *Agent of Change*. Karena ketiga peran tersebut sangat memungkinkan dilakukan melalui organisasi pergerakan mahasiswa. Mahasiswa dapat menjadi *Iron Stock*, yaitu mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Intinya mahasiswa itu merupakan aset, cadangan, harapan bangsa untuk masa depan. Mahasiswa sebagai *Guardian of Value* berarti mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai di masyarakat. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, "Nilai seperti apa yang harus dijaga?". Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus melihat mahasiswa sebagai insan akademis yang selalu berpikir ilmiah dalam mencari kebenaran. Kita harus memulainya dari hal tersebut karena bila kita renungkan kembali sifat nilai yang harus dijaga tersebut haruslah mutlak kebenarannya sehingga mahasiswa diwajibkan menjaganya. Dan terakhir Mahasiswa sebagai *Agent of Change*. Artinya adalah mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan. Lalu kini masalah kembali muncul, "Kenapa harus ada perubahan???". Untuk menjawab pertanyaan itu mari kita pandang kondisi bangsa saat ini. Menurut penulis kondisi bangsa saat ini jauh sekali dari kondisi ideal, dimana banyak sekali penyakit-penyakit masyarakat yang menghinggapi hati bangsa ini, mulai dari pejabat-pejabat atas hingga bawah, dan tentunya tertular pula kepada banyak rakyatnya. Sperti korupsi yang tidak pernah ada hentinya. Selanjutnya mengapa kita harus melakukan perubahan adalah karena perubahan itu sendiri merupakan harga mutlak dan pasti akan terjadi walaupun kita diam.

Pada akhirnya, segala impian yang sudah diperjuangkan perjuangan dengan pergerakan mahasiswa bolehlah tetap ada tetapi jangan sampai kita terus terbuai olehnya. Tetap beraksi, fokus, dan mengedepankan intelektualitas sebagai kekuatan

satu-satunya kita. Mahasiswa tidak bertindak dengan senjata. Bagi kita, senjata adalah kata-kata yang keluar dari kemurnian hati dan kejujuran dalam bertutur.

C. Mahasiswa dan Tanggung Jawab Sosial

Sebagai mahasiswa kita mempunyai peran double, pertama sebagai kaum terpelajar yang kedua sebagi anggota dari masyarakat. Oleh karena itu dengan sendirinya tanggung jawabnya juga menjadi lebih besar karena memainkan dua peran sekaligus. Mahasiswa mempunyai kekuatan dalam daya nalar dan keilmuannnya dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Namun, unsur penting dari ilmu dan daya pikir itu adalah entitas nilai moral yang harus dijunjung tinggi. Seperti yang disampaikan oleh KH. Idham Cholid, bahwa ilmu bukan untuk ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan.

Perguruan tinggi adalah sebuah institusi yang tidak sekedar untuk kuliah, mencatat pelajaran, pulang dan tidur. Tapi harus dipahami bahwa perguruan tinggi adalah tempat untuk penggemblengan mahasiswa dalam melakukan kontempelasi dan penggambaran intelektual agar mempunyai idealisme dan komitmen perjuangan sekaligus tuntutan perubahan.

Penggagasan terhadap terminologi perguruan tinggi tidak akan bisa dilepaskan dari suplemen utama, yaitu mahasiswa. Stigma yang muncul dalam diskursus perguruan tinggi selama ini cenderung berpusat pada kehidupan mahasiswa. Hal ini sebagai konsekuensi logis agresitivitas mereka dalam merespon gejala sosial ketimbang kelompok lain dari sebuah sistem civitas akademika.

Akan tetapi fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa derap modernisasi di Indonesia dengan pembangunan sebagai ideologinya telah memenjarakan mahasiswa dalam sekat institusionalisasi, transpolitisasi dan depolitisasi dalam kampus. Keberhasilan upaya dengan dukungan penerapan konsep NKK/BKK itu, pada sisi lain mahasiswa dikungkung dunia isolasi hingga tercerabut dari realitas sosial yang melingkupinya. Akibatnya, mahasiswa mengalami kegamangan

atas dirinya maupun peran-peran kemasyrakatan yang semestinya diambil. Mahasiswapun tidak lagi memiliki kesadaran kritis dan bahkan sebaliknya bersikap apolitis.

Melihat realitas seperti itu maka perlu ditumbuhkan kesadaran kritis mahasiwa dalam merespon gejala sosial yang dihadapinya, karena di samping belum tersentuh kepentingan praktis, mahasiswa lebih relatif tercerahkan (well informed) dan potensi sebagai kelompok dinamis yang diharapkan mampu mempengaruhi atau menjadi penyuluh pada basis mayarakat baik dalam lingkup kecil maupun secara luas. Dengan tataran ideal seperti itu, semestinya mahasiswa dapat mengambil peran kemasyrakatan yang lebih bermakna bagi kehidupan kampus dan mayarakat.

ANTROPOLOGI KAMPUS

Universitas adalah tempat untuk memahirkan diri kita, bukan saja di lapangan technical and managerial know how, tetapi juga di lapangan mental, di lapangan cita-cita, di lapangan ideologi, di lapangan pikiran. Jangan sekali-kali universitas menjadi tempat perpecahan.
(Ir. Soekarno, 1958)

A. Pengertian Antropologi

Kata dasar dari Antropologi berasal dari Yunani yaitu anthros yang berarti manusia dan logos berarti ilmu. Sederhanya, Antropologi merupakan Ilmu yang mempelajari tetang manusia. Para ahli Antropolog mendefinikan antropologi sebagai berikut:

1. William A. Haviland (seorang antropolog Amerika), "Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia "
2. David Hunter, "Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia ".
3. Koentjaraningrat (bapak antropolog Indonesia), "Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

Dari ketiga definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa Antrologi merupakan Ilmu/bidang studi yang mempelajari tentang segala sesuatu/apa-apa yang berkaitan dengan manusia baik berupa fisik maupun budaya sehingga dapat disimpulkan kecenderungan manusia sebagai makhluk sosial.

B. Pengertian Kampus

Istilah kampus sudah sangat familier sekali tentunya di kalangan civitas akademika. Kampus merupakan deretan gedung yang ada di perguruan tinggi sebagai sarana tempat kuliah bagi mahasiswa. Tetapi pengertian gedung diatas apabila disandingkan dengan kampus untuk era modern ini sepertinya

sudah tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan Ilmu komunikasi. Alasannya adalah kuliah jarak jauh (model/sistem perkulihan yang sejenis) sekarang sudah tidak asing lagi. Dengan memanfaatkan kecanggihan dunia maya maupun internet ternyata bermanfaat sekali untuk berbagai macam aktifitas, mulai dari dunia politik, ekonomi bisnis, hankam dan tentunya dunia pendidikan. Jadi hemat penulis adalah kampus merupakan tempat (wujud maupun ghaib).

Di dalamnya ada politik dan budaya yang bermacam-macam. Kampus tidak dapat difahami hanya sebagai gelanggang akademis dan ilmu pengetahuan, karena nyatanya memang tidak demikian. Kampus terlibat dalam proyek dan pembangunan melalui pemberian legitimasi „ilmiah". Sehingga bagi aktifis kampus merupakan miniature Negara. Dari kampus lah kita belajar bagaimana melihat dan memahami Negara.

C. Pengertian Antropologi Kampus

Antropologi sebenarnya kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita apabila di sematkan dengan kata antropologi budaya, antropologi politik, antropologi agama dan lain sebagainya. Namun begitu asing ketika kata antrologi itu sendiri disandingkan dengan kata kampus. Karena memang belum ada suatu cabang yang secara terstruktur dan pembahasan yang tuntas mengenai antropologi kampus.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai organisasi gerakan mahasiswa menganggap bahwa kader-kadermya seharusnya dapat memahami bahkan membaca kampus mereka sendiri. Hal ini penting sebagai pijakan mereka berproses si bangku perkuliahan.

Secara garis besar sudah dipaparkan bahwa antrologi adalah bidang Ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dalam studi kajian antropologi (manusia) mencakup tentang sejarah, perilaku, bentuk fisik masyarakat, tradisi-tradisi, nilai-nilai dan interaksi antar manusia sampai budaya baru yang dihasilkan karena interaksi tersebut. Kampus sudah diutarakan diatas bahwa tempat sebagai sarana maupun prasarana wahana untuk belajar mahasiswa.

Jadi secara garis besar antropologi kampus adalah kajian ilmu yang mempelajari tetang kebudayaan, perilaku, tradisi, nilai-nilai, interaksi dan lain sebagainya yang dianggap penting dalam dinamika dunia kampus ataupun lingkungan sekitar yang berhubunagn kampus.

Sejarah telah mencatat bahwa perjalanan panjang bangsa Indonesia tidak lepas dari peran serta mahasiswa. Kampus boleh dikatakan miniatur negara. Di dalamnya ada politik dan budaya yang bermacam-macam. Bahkan mahasiswanya pun memiliki tipologi yang beragam, dari mahasiswa apatis, pragmatis, hedonis, agamis, *study oriented,* Idolisasi, aktifis dan idealis. Sebagai sebuah gelanggang semi terbuka, kampus merupakan tempat potensial bagi anggota/kader PMII untuk mengasah mental dan pengalaman kepemimpinan melalui pengenalan mendalam terhadap kehidupan nyata kampus.

Faktanya memang situasi tersebut tidak bersifat monolitik dan homogen, mahasiswa tidak dapat dipandang sebagai hedonis atau apatis seluruhnya. Maka tidak ada cara lain bagi PMII kecuali menerima kenyataan tersebut sebagai arena yang harus disiasati dalam rekruitmen dan pengkaderan.

D. Tipologi Mahasiswa Kontemporer

Dalam dunia kampus pasti tidak akan pernah lepas dari kata mahasiswa. Mahasiswa merupakan komponen utama, karena disitulah para mahasiswa itu berproses mengembangkan dirinya. Selain itu, mahasiswa merupakan unsur terbanyak diluar civitas akademika yang ada. Mahasiswa yang banyak itu, pastinya juga membawa karakter dan budaya yang berbeda-beda karena datang dari berbagai penjuru daerah.

Sebagai anggota PMII yang juga merupakan mahasiswa perlu memahami tipe-tipe dari mahasiswa, sehingga mampu menempatkan dirinya dalam tipe yang seperti apa. Dalam pengklasifikasian ini sifatnya tidak bisa dibilang paten, karena setiap diri kita bisa membuat tipologi sesuai dengan yang kita lihat dan rasakan. Yang paling penting dari pengklasifikasian mahasiswa ini adalah, kita mampu memetakan jenis-jenis

mahasiswa sehingga mampu “bermain” dalam
lingkungan tersebut.

Situasi	Keterangan
Apatis	Acuh tak acuh terhadap keadaan sosial dan politik
Pragmatis	Memperhitungkan keuntungan dan manfaat pribadi dan sesaat Memilih organisasi yang secara langsung mendukung perkuliahan dan menjamin masa depan
Hedonis	Gemar bersenang-senang
Agamis	Mengutamakan religiusitas formal-simbolis
Study Oriented	Bersegera dalam kuliah, IPK tinggi, lulus dan bekerja
Idolisasi	Mencari panutan/tauladan, tokoh untuk diikuti atau ditiru baik dalam hal intelektualitas, religiusitas, akademik dan aktivitas sosial.
Citra Mahasiswa Aktivis	Aktivis nilainya anjlok, lulus lambat, IPK rendah, masa depan monolitik (politik dan sosial).
Idealis	Menggebu-gebu dalam mensikapi keadaan sekeliling (sosial, ekonomi, politik, agama) dan berpandangan biner (*ini yang benar dan itu salah*)

E. Mahasiswa dan Organisasi

Seakan dua kata tersebut tidak dapat dipisahkan, karena dengan organisasi inilah mahasiswa dapat mengembangkan diri dalam wawasan, dan potesi yang dimilkinya. Tapi hal itu tidak disadari oleh setiap mahasiswa, sebagian lain –justru
dalam golongan yang lebih besar- organisasi dijadikan “momok” atau penghambat dalam akademiknya. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa dengan ikut berorganisasi akan menjadikan nilai *anjlok,* prestasi buruk, juga menyita banyak waktu, biaya dan tenaga. Tetapui sedikit sekali yang berfikir

tentang dampak positif yang nantinya menjadi bekal kelak kembali ke masyarakat.

Di Cirebon terdapat banyak perguruan tinggi dengan berbagai macam klasifikasi ilmu yang terdiri dari berbagai fakultas dan jurusan. Yang lebih menonjol adalah perguruan tinggi Islam/Agama dan Umum. Tentunya dengan ciri dan karakter yang berebeda ternyata sangat berpengaruh pada cara berpikir mahasiswa dalam menilai suatu masalah.

Di dalam kampus organisasai bisa dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi intra kampus (Organ Intra) dan organisasi ekstra kampus (Organ Ekstra). Organisasi intra kampus adalah organisasi yang secara administrative dan struktural berhubungan dengan kampus, sedangkan organisasi ekstra kampus adalah organisasi independen yang baik struktur dan administrasinya lepas dari manapun serta mempunyai aturan–aturan secara mandiri, dan lepas dari pengawasan manapun. Sehingga organ ini lebih berani menyuarakan aspirasi secara lantang.

Organisasi intra kampus (Intra Kampus) bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah Organisasi dibawah naungan Republik Mahasiswa, seperti SEMA/DPM, DEMA/BEM, SEMA/DPM-F, DEMA/BEM-F, dan HMJ.
Organisasi ini menyerupai miniatur Negara. SEMA/DPM sebagai Legislative dan DEMA/BEM sebagai Eksekutif. Yang kedua adalah UKM, organisasi yang bertujuan sebagai wadah pengembangan kegiatan, minat, bakat, dan ketrampilan mahasiswa.

Organisasi ekstra kampus (Organ Ekstra) secara umum mempunyai tujuan memberikan wadah bagi mahasiswa untuk bersikap dan bertindak dalam menanggapi masalah-masalah yang bersifat sosial kemasyarakatan baik dalam lingkup regional maupun nasional dan tidak terikat dengan organ-organ lain baik bersifat sosial politik maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak struktural kampus. Di Cirebon sendiri ada beberapa organisasi ekstra kampus yang mewarnainya. Diantaranya adalah PMII, HMI, IMM, KAMMI, GMNI, Basis, dll.

F. PMII Harus ke Kampus

PMII merupakan organisasi ekstra terbesar di Cirebon. Namun hal ini menjadi suatu ironi melihat banyaknya kader yang berada pada zona nyaman dan tak mampu bersikap kritis lagi. Seharusnya sudah tugas PMII mencerdaskan kehidupan mahasiswa di Cirebon, sehingga mampu berpikir kritis terhadap realita sosial yang ada.

Melihat kondisi dunia mahasiswa hari ini, PMII harus lebih matang dalam mengembangkan visi dan misinya. PMII harus bisa menjadi organisasi "gaul" yang sesuai dengan tuntutan jaman, tentunya tanpa meninggalkan budaya-budaya PMII yang ada. PMII dituntut tetap menarik ditengah ababilnya mahasiswa-mahasiswa di Cirebon.

Diakui atau tidak, banyak kader PMII yang menjadi pemimpin pada organisasi intra kampus, dan ada beberapa yang menjadi pemimpin dalam UKM. Ini berarti tugas dari sahabat-sahabat PMII bisa dikatakan berat, karena selain harus menjalankan roda organisasi di PMII juga di intranya. Namun harus diingat, bahwa kita terjun dalam perpolitikan intra bukan semata-mata hanya mencari materi ataupun eksistensi saja. Lewat intralah pintu awal kaderisasi kita, lewat intralah kita mampu mengasah kepekaan kita terhadap realitas yang ada, mengkritisi langsung kebijakan kampus, dan masih banyak hal-hal lainnya.

Oleh karena itu anggota/kader PMII harus mampu mempersiapkan diri sebaik mungkin baik dari segi kapasitas keilmuan maupun kecakapan managerial dalam organisasi. Sehingga nantinya ketika masuk dunia organisasi intra sudah matang dan siap tempur, hal ini wajib dipenuhi karena hal tersebut adalah tanggung jawab sebagai anggota/kader PMII.

Hal lain yang perlu dicermati oleh anggota dan kader PMII adalah, anggota dan kader PMII yang berada di tataran intra kampus harus mampu dan bisa mengcounter setiap kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh akademik yang itu tidak berpihak kepada kepentingan akademik mahasiswa. Sesunggungnya banyak sekali kebijakan-kebijakan kampus

yang tidak berpihak kepada kepentingan secara akademis mahasiswa, contohkanlah pembangunan infrstruktur kampus secara berlebihan tanpa diimbangi kualitas akademik, dikekangnya mahasiswa untuk tidak ikut organisasi dan masih banyak lagi. Bila hegemoni sistem ini terus kita biarkan, bukan tidak mungkin peran-peran mahasiswa yang ada di kampus akan semakin redup dan lambat laun akan mati. Ironis memang ditengah budaya demokrasi yang di agung-agungkan mahasiswa malah ciut. Ini yang harus segera kita benahi bersama. Salam Pergerakan!.

BAB III
BELAJAR DAN MEMAHAMI KE-ISLAM-AN

AHLUSSUNNAH WAL-JAMA'AH SEBAGAI MANHAJ AL-FIKR

A. Pengantar

Ahlussunnah wal-Jama"ah (Aswaja) merupakan bagian integral dari sistem keorganisasian PMII. Dalam Nilai Dasar Pergerakan (NDP) disebutkan bahwa Aswaja merupakan metode pemahaman dan pengamalan keyakinan Tauhid. Lebih dari itu, disadari atau tidak Aswaja merupakan bagian kehidupan sehari-hari setiap anggota/kader organisasi kita. Akarnya tertanam dalam pada pemahaman dan perilaku penghayatan kita masing-masing dalam menjalankan Islam.

Selama ini proses reformulasi *Ahlussunnah wal-Jama"ah* telah berjalan, bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Tahun 1994, dimotori oleh KH Said Agil Siraj muncul gugatan terhadap Aswaja yang sampai saat itu diperlakukan sebagai sebuah madzhab. Padahal di dalam Aswaja terdapat berbagai madzhab, khususnya dalam bidang fiqh. Selain itu, gugatan muncul melihat perkembangan zaman yang sangat cepat dan membutuhkan respon yang kontekstual dan cepat pula. Dari latar belakang dan penelusuran terhadap bangunan isi Aswaja sebagaimana selama ini digunakan, lahirlah gagasan *Ahlussunnah wal-Jama"ah* sebagai *manhaj al-fikr* (metode berpikir).

PMII melihat bahwa gagasan tersebut sangat relevan dengan perkembangan zaman, karena muatan doktrinal Aswaja selama ini yang terkesan terlalu mengikat. Sebagai *manhaj*, Aswaja menjadi lebih fleksibel dan memungkinkan bagi pengamalnya untuk menciptakan ruang kreatifitas dan menelurkan ikhtiar-ikhtiar baru untuk menjawab perkembangan zaman.

Bagi PMII, Aswaja juga menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna bagi setiap tempat dan zaman. Islam tidak diturunkan untuk sebuah masa dan tempat tertentu. Kehadirannya dibutuhkan sepanjang masa dan akan selalu relevan. Namun relevansi dan makna tersebut sangat tergantung kepada kita, pemeluk dan penganutnya, memperlakukan dan mengamalkan Islam. Di sini, PMII sekali lagi melihat bahwa Aswaja merupakan pilihan paling tepat di

tengah kenyataan masyarakat kepulauan Indonesia yang beragam dalam etnis, budaya dan agama.

B. Sketsa Sejarah

Ahlussunnah wal-Jama"ah (Aswaja) lahir dari pergulatan intens antara doktrin dengan sejarah. Di wilayah doktrin, debat meliputi soal kalam mengenai status al-Qur"an apakah ia makhluk atau bukan, kemudian debat antara Sifat-Sifat Allah antara ulama *Salafiyyun* dengan golongan *Mu"tazilah,* dan seterusnya.

Di wilayah sejarah, proses pembentukan Aswaja terentang hingga zaman *al-khulafa" al-rasyidun*, yakni dimulai sejak terjadi Perang Shiffin yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a dengan Muawiyah. Bersama kekalahan Khalifah keempat tersebut, setelah dikelabui melalui taktik arbitrase *(tahkim)* oleh kubu Muawiyah, ummat Islam makin terpecah ke dalam berbagai golongan. Diantara mereka terdapat *Syi"ah* yang secara umum dinisbatkan kepada pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib, golongan *Khawarij* yakni pendukung Ali yang membelot karena tidak setuju dengan *tahkim,* dan ada pula kelompok *Jabariyah* yang melegitimasi kepemimpinan Muawiyah.

1. Perkembangan Islam Pasca Wafatnya Rasulullah

Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 02 Rabi"ul Awwal 11 H atau 08 Juni 632M. Di hari wafatnya sekelompok Kaum Anshar (sahabat Nabi yang berasal dari Madinah) dibawah pimpinan Sa"ad bin Ubadah dari suku Khazraj berkumpul di sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Sa"idah untuk mencari Khalifah, pemimpin pengganti Nabi.Mendengar hal ini Kaum Muhajirin (sahabat Nabi yang berasal dari Makkah dan pindah ke Madinah) datang ke Saqifah dibawah pimpinan Abu Bakar as-Shiddiq .

Setelah terjadi perdebatan yang cukup sengit dimana Kaum Anshar mencalonkan Sa"ad bin Ubaidah sebagai calon Khalifah dan Kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar atau Umar bin Khattab sebagai calon Khalifah, akhirnya semua sepakat untuk mengangkat sahabat yang paling utama yaitu

Sayidina Abu Bakar as-Shiddiq sebagai Khalifah pengganti Nabi.

Dalam rapat itu tidak ada seorangpun yang mengemukakan Sayidina Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Faham Syi"ah belum ada ketika itu, yang ada hanya Kaum Anshar dan Muhajirin, tetapi perselisihan tersebut tidak menimbulkan firqah dalam Ushuluddin karena perselisihan tersebut telah selesai dengan diangkatnya Sayidina Abu Bakar sebagai Khalifah secara aklamasi.

2. Munculnya Aliran-Aliran dalam Islam

Pada tahun 30 H timbul **Faham Syi'ah** yang disulut oleh Abdullah bin Saba" yang beroposisi terhadap Khalifah Utsman bin Affan.

Setelah terjadi Perang Siffin, perang saudara sesama Islam antara tentara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan tentara Mu"awiyah bin Abu Sufyan (Gubernur Syria) pada tahun 37 H timbul pula Faham Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari Sayidina Ali dan Mu"awiyah.

Pada awal abad kedua Hijriah timbul pula **Faham Mu'tazilah** yaitu yang dipimpin oleh Washil bin „Atha" (80-113 H) dan Umar bin Ubaid (wafat 145 H). Kaum Mu"tazilah ini mengeluarkan pendapat adanya "manzilah bainal manzilatain" yaitu ada tempat di antara dua tempat neraka
dan surga, bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, Al-Quran adalah makhluk, mi"raj Nabi hanya dengan ruh saja, bahwa pertimbangan akal lebih didahulukan dari hadits Nabi, bahwa surga dan neraka akan lenyap dsb.

Kemudian timbul **Faham Qadariyah** yang mengatakan bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri, tidak bersangkut paut dengan Tuhan. Hak mencipta telah diberikan Tuhan kepada manusia sehingga Tuhan tidak tahu dan tidak peduli lagi akan apa yang diperbuat oleh manusia.

Kemudian timbul pula **Faham Jabariyah** yang mengatakan bahwa sekalian yang terjadi adalah dari Tuhan, manusia tidak memiliki daya apa-apa, tidak ada usaha dan tidak ada ikhtiar.

Selanjutnya timbul **Faham Mujassimah**, yaitu faham yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, punya tangan dan kaki, duduk di atas kursi, turun tangga seperti manusia, Tuhan adalah cahaya seperti lampu dan sebagainya.

Dan timbul pula faham-faham yang keliru tentang tawassul dan washilah, tentang ziarah dan istighatsah dari Ibnu Taimiyah yang semuanya mengacaukan dunia Islam dan kaum muslimin.

Selain golongan tersebut masih ada *Murji"ah* dan *Qadariyah*, faham bahwa segala sesuatu yang terjadi karena perbuatan manusia dan Allah tidak turut campur *(af"al al-ibad min al-ibad)* -berlawanan dengan faham *Jabariyah*.

Diantara kelompok-kelompok itu, adalah sebuah komunitas yang dipelopori oleh Imam Abu Sa"id Hasan ibn Hasan Yasar al-Bashri (21-110 H/639-728 M), lebih dikenal dengan nama Imam Hasan al-Bashri, yang cenderung mengembangkan aktivitas keagamaan yang bersifat kultural *(tsaqafiyah)*, ilmiah dan berusaha mencari jalan kebenaran secara jernih. Komunitas ini menghindari pertikaian politik antara berbagai faksi politik *(firqah)* yang berkembang ketika itu. Sebaliknya mereka mengembangkan sistem keberagamaan dan pemikiran yang sejuk, moderat dan tidak ekstrim. Dengan sistem keberagamaan semacam itu, mereka tidak mudah untuk mengkafirkan golongan atau kelompok lain yang terlibat dalam pertikaian politik ketika itu.

Seirama waktu, sikap dan pandangan tersebut diteruskan ke generasi-generasi ulama setelah beliau, di antaranya Imam Abu Hanifah al-Nu"man (w. 150 H), Imam Malik Ibn Anas (w. 179 H), Imam Syafi"i (w. 204 H), Ibn Kullab (w. 204 H), Ahmad Ibn Hanbal (w. 241 H), hingg tibaa pada generasi Abu Hasan al-Asy"ari (w 324 H) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H). Kepada dua ulama terakhir inilah permulaan faham Aswaja sering dinisbatkan; meskipun bila ditelusuri secara teliti benih-benihnya telah tumbuh sejak dua abad sebelumnya.

Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan jumlah penganut faham *Ahlussunnah wal-Jama"ah* terbesar di

dunia. Mayoritas pemeluk Islam di kepulauan ini adalah penganut madzhab Syafi"i, dan sebagian terbesarnya tergabung -baik tergabung secara sadar maupun tidak- dalam jam"iyyah Nahdlatul Ulama, yang sejak awal berdiri menegaskan sebagai pengamal Islam ala *Ahlussunnah wal-Jama"ah*.

C. Pengertian

Secara semantik arti *Ahlussunnah wal-Jama"ah* adalah sebagai berikut. *Ahl* berarti *pemeluk*, jika dikaitkan dengan aliran atau madzhab maka artinya adalah *penganut aliran* atau *penganut madzhab* (ashab al-madzhab).

Al-Sunnah mempunyai arti „jalan", disamping memiliki arti *al-Hadist*. Disambungkan dengan *ahl* keduanya bermakna pengikut jalan Nabi, para Shahabat dan tabi"in. *Al-Jamaah* berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Bila dimaknai secara kebahasaan, *Ahlusunnah wal-Jama"ah* berarti segolongan orang yang mengikuti jalan Nabi, Para Shahabat dan tabi"in.

Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam pertama di Indonesia yang menegaskan diri berfaham Aswaja. Dalam *Qanun Asasi* (konstitusi dasar) yang dirumuskan oleh *Hadratussyaikh* K.H. Hasyim Asy"ari juga tidak disebutkan definisi Aswaja. Namun tertulis di dalam *Qanun* tersebut bahwa Aswaja merupakan sebuah faham keagamaan dimana dalam bidang akidah menganut pendapat Abu Hasan al-Asy"ari dan al-Maturidi, dalam bidang fiqh menganut pendapat dari salah satu madzhab empat *(madzahibul arba"ah* –Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi"i dan Imam Hanbali), dan dalam bidang tasawuf/akhlak menganut Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali.

Selama kurun waktu berdirinya (1926) hingga sekitar tahun 1994, pengertian Aswaja tersebut bertahan di tubuh Nahdlatul Ulama. Baru pada sekitar pertengahan dekade 1990 tersebut, muncul gugatan yang mempertanyakan, tepatkah Aswaja dianut sebagai madzhab, atau lebih tepat dipergunakan dengan cara lain?

Aswaja sebagai madzhab artinya seluruh penganut *Ahlussunnah wal-Jama"ah* menggunakan produk hukum atau pandangan para ulama dimaksud. Pengertian ini dipandang sudah tidak lagi relevan lagi dengan perkembangan zaman mengingat perkembangan situasi yang berjalan dengan sangat cepat dan membutuhkan inovasi baru untuk menghadapinya. Selain itu, pertanyaan epistimologis terhadap pengertian itu adalah, bagaimana mungkin terdapat madzhab di dalam madzhab?

Dua gugatan tersebut dan banyak lagi yang lain, baik dari tinjauan sejarah, doktrin maupun metodologi, yang menghasilkan kesimpulan bahwa Aswaja tidak lagi dapat diikuti sebagai madzhab. Lebih dari itu, Aswaja harus diperlakukan sebagai *manhaj al-fikr* atau metode berpikir.

D. Aswaja Sebagai *Manhaj Al-Fikr*

Kurang lebih sejak 1995/1997, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia meletakkan Aswaja sebagai *manhaj al-fikr*. Tahun 1997 diterbitkan sebuah buku saku tulisan Sahabat Chatibul Umam Wiranu berjudul *Membaca Ulang Aswaja* (PB PMII, 1997). Buku tersebut merupakan rangkuman hasil Simposium Aswaja di Tulungagung. Konsep dasar yang dibawa dalam Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* tidak dapat dilepas dari gagasan KH Said Agil Siraj yang mengundang kontroversi, mengenai perlunya Aswaja ditafsir ulang dengan memberikan kebebasan lebih bagi para intelektual dan ulama untuk merujuk langsung kepada ulama dan pemikir utama yang tersebut dalam pengertian Aswaja. Secara sempurna definisi Aswaja menurutnya adalah : **"Manhaj Al Fikr Al Diny Al Syml'ala Syu'un AlHayat Wa Mu'tadlayatiha Al Khaim Ala Asas Al Tawasuth Wal Tawazzun Wal Al I'tidal Wa Al Tasamuh"** (*berpikir keagamaan yang mencakup segala aspek kehidupan dan berdiri diatas prinsip keseimbangan, balancing, jalan tengah dan netral dalam aqidah penengah dalam permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan serta keadilan dan toleransi dalam politik*).

PMII memandang bahwa *Ahlussunnah wal-Jama"ah adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup*

semua aspek kehidupan dengan berlandaskan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleran. Aswaja bukan sebuah madzhab melainkan sebuah metode dan prinsip berpikir dalam menghadapi persoalan-persoalan agama sekaligus urusan sosial-kemasyarakatan; inilah makna Aswaja sebagai *manhaj al-fikr*.

Sebagai *manhaj al-fikr*, PMII berpegang pada prinsip-prinsip *tawasuth* (moderat), *tawazun* (netral), *ta"adul* (keseimbangan), dan *tasamuh* (toleran). Moderat tercermin dalam pengambilan hukum *(istinbath)* yaitu memperhatikan posisi akal di samping memperhatikan *nash*. Aswaja memberi titik porsi yang seimbang antara rujukan *nash* (Al-Qur"an dan Al-Hadist) dengan penggunaan akal. Prinsip ini merujuk pada debat awal-awal Masehi antara golongan yang sangat menekankan akal *(mu"tazilah)* dan golongan fatalis.

Sikap netral *(tawazun)* berkaitan sikap dalam politik. Aswaja memandang kehidupan sosial-politik atau kepemerintahan dari kriteria dan pra-syarat yang dapat dipenuhi oleh sebuah rezim. Oleh sebab itu, dalam sikap *tawazun*, pandangan Aswaja tidak terkotak dalam pandangan mendukung atau menolak sebuah rezim. Dengan Aswaja, PMII tidak membenarkan kelompok ekstrim yang hendak merongrong kewibawaan sebuah pemerintahan yang disepakati bersama, namun tidak juga berarti mendukung sebuah pemerintahan. Apa yang dikandung dalam sikap *tawazun* tersebut adalah memperhatikan bagaimana keterpenuhan kaiadah dalam perjalanan sistem kehidupan sosial-politik.

Keseimbangan *(ta"adul)* dan toleran *(tasamuh)* terefleksikan dalam kehidupan sosial, cara bergaul dalam kondisi sosial budaya mereka. Keseimbangan dan toleransi mengacu pada cara bergaul PMII sebagai Muslim dengan golongan Muslim atau pemeluk agama yang lain. Realitas masyarakat Indonesia yang plural, dalam budaya, etnis, ideologi politik dan agama, PMII pandang bukan semata-mata realitas sosiologis, melainkan juga realitas teologis. Artinya bahwa Allah SWT memang dengan sengaja menciptakan manusia berbeda-beda dalam berbagai sisinya. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan sikap yang lebih tepat kecuali *ta"adul* dan *tasamuh*.

E. Prinsip Aswaja Sebagai *Manhaj*

Berikut ini adalah prinsip-prinsip Aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Aqidah, pengambilan hukum, tasawuf/akhlak dan bidang sosial-politik.

1. Aqidah

Dalam bidang Aqidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga aqidah *Ahlussunnah wal-Jama"ah* diantaranya yang pertama adalah aqidah *Uluhiyyah* (ketuhanan), berkait dengan ikhwal eksistensi Allah SWT.

Pada tiga abad pertama Hijriyah, terjadi banyak perdebatan mengenai Esksitensi sifat dan asma Allah SWT. Dimana terjadi diskursus terkait masalah apakah Asma Allah tergolong dzat atau bukan. Abu Hasan al-Asy"ari (w. 324 H) secara filosofis berpendapat bahwa nama (*ism*) bukanlan yang dinamai *(musamma)*, Sifat bukanlah yang disifati (*mausuf*), sifat bukanlah *dzat*. Sifat-sifat Allah adalah nama-nama (*Asma"*)-Nya. Tetapi nama-nama itu bukanlah Allah dan bukan pula selain-Nya.

Aswaja menekankan bahwa pilar utama ke-Imanan manusia adalah Tauhid; sebuah keyakinan yang teguh dan murni yang ada dalam hati setiap Muslim bahwa Allah-lah yang Menciptakan, Memelihara dan Mematikan kehidupan semesta alam. Ia Esa, tidak terbilang dan tidak memiliki sekutu.

Pilar yang kedua adalah *Nubuwwat*, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan Rosul sebagai utusannya. Sebuah wahyu yang dijadikan sebagai petunjuk dan juga acuan ummat manusia dalam menjalani kehidupan menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam doktrin *Nubuwwat* ini, ummat manusia harus meyakini dengan sepebuhnya bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, yang membawa *risalah* (wahyu) untuk umat manusia. Dia adalah Rasul terakhir, yang harus diikuti oleh setiap manusia.

Pilar yang ketiga adalah *al-Ma"ad*, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dan setiap manusia akan mendapat imbalan sesuai amal dan perbuatannya (*yaumul jaza"*). Dan mereka semua akan dihitung (*hisab*) seluruh amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mereka yang banyak beramal baik akan masuk surga dan mereka yang banyak beramal buruk akan masuk neraka.

2. Bidang sosial politik

Berbeda dengan golongan *Syi"ah* yang memiliki sebuah konsep negara dan mewajibkan berdirinya negara *(imamah)*, *Ahlussunnah wal-Jama"ah* dan golongan sunni umumnya memandang negara sebagai kewajiban fakultatif *(fardhu kifayah)*. Pandangan *Syi"ah* tersebut juga berbeda dengan golongan *Khawarij* yang membolehkan komunitas berdiri tanpa *imamah* apabila dia telah mampu mengatur dirinya sendiri. Bagi *Ahlussunnah wal-Jama"ah*, negara merupakan alat untuk mengayomi kehidupan manusia untuk menciptakan dan menjaga kemashlahatan bersama *(mashlahah musytarakah)*.

Ahlussunnah wal-Jama"ah tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku. Sebuah negara boleh berdiri atas dasar teokrasi, aristokrasi (kerajaan) atau negara-modern/demokrasi, asal mampu memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah otoritas (wewenang) pemimpin negara tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

a. Prinsip *syura* (musyawarah)

Negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dan setiap keputusan, kebijakan dan peraturan. Salah satu ayat yang menegaskan musyawarah adalah:

"(36). Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. (37). Dan (bagi)

orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. (38). Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (39). Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri." (Q.S. Al-Syura; 42:36-39)

b. Prinsip *al-'adl (keadilan)*

Keadilan adalah salah satu Perintah yang paling banyak ditemukan dalam Al-Qur"an. Prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh sebuah pemerintahan, apapun bentuk pemerintahan itu. Berikut ini adalah salah satu ayat Al-Qur"an yang memerintahkan keadilan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS An-Nisa; 4:58)

c. Prinsip *al-hurriyyah (kebebasan)*

Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi warganya. Kebebasan tersebut wajib hukumnya karena merupakan kodrat asasi setiap manusia. Prinsip kebebasan manusia dalam Syari"ah dikenal dengan A*l-Ushulul Khams* (prinsip yang lima), yaitu:

- *Hifzhu al-Nafs* (menjaga jiwa); adalah kewajiban setiap kepemimpinan (negara) untuk menjamin kehidupan setiap warga negara; bahwa setiap warga negara berhak dan bebas untuk hidup dan berkembang dalam wilayahnya.
- *Hifzhu al-Din* (menjaga agama); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin kebebasan setiap orang memeluk, meyakini dan menjalankan Agama dan Kepercayaannya. Negara tidak berhak

memaksakan atau melarang sebuah agama atau kepercayaan kepada warga negara.

- *Hifzhu al-Mal* (menjaga harta benda); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin keamanan harta benda yang dimiliki oleh warga negaranya. Negara wajib memberikan jaminan keamanan dan menjamin rakyatnya hidup sesuai dengan martabat rakyat sebagai manusia.
- *Hifzhu al-Nasl*; bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara. Negara harus menjaga kekayaan budaya (etnis), tidak boleh mangunggulkan dan memprioritaskan sebuah etnis tertentu. *Hifzhu al-Nasl* berarti negara harus memperlakukan sama setiap etnis yang hidup di wilayah negaranya.
- *Hifzh al-„Irdh;* jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan atau pun kedudukan setiap warga negara. Negara tidak boleh merendahkan warga negaranya karena profesi dan pekerjaannya. Negara justru harus menjunjung tinggi dan memberikan tempat yang layak bagi setiap warga negara.

Al-Ushulul Khams identik dengan konsep Hak Asasi Manusia yang lebih dikenal dalam dunia modern. Lima pokok atau prinsip diatas menjadi ukuran bagi legitimasi sebuah kepemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin di kemudian hari.

d. Prinsip *al-musawah (kesetaraan derajat)*

Bahwa manusia diciptakan sama oleh Allah SWT. Antara satu manusia dengan mausia lain, bangsa dengan bangsa yang lain tidak ada pembeda yang menjadikan satu manusia atau bangsa lebih tinggi dari yang lain. Manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk mengenal antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak dibenarkan satu manusia dan sebuah bangsa menindas manusia dan bangsa yang lain. Dalam Al-Qur"an disebutkan:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. Al-Hujuraat, 49:13)

Perbedaan bukanlah semata-mata fakta sosiologis, yakni fakta yang timbul akibat dari relasi dan proses sosial. Perbedaan merupakan keniscayaan teologis yang Dikehendaki oleh Allah SWT. Demikian disebutkan dalam Al-Qur"an:

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu." (Q.S. Al-Maidah; 5:48)

Dalam sebuah negara kedudukan warga negara adalah sama. Orang-orang yang menjabat di tubuh pemerintahan memiliki kewajiban yang sama sebagai warga negara. Mereka memiliki jabatan semata-mata adalah untuk mengayomi, melayani dan menjamin kemashlahatan bersama, dan tidak ada *privilege* (keistimewaan) khususnya di mata hukum. Negara justru harus mampu mewujudkan kesetaraan derajat antar manusia di dalam wilayahnya, yang biasanya terlanggar oleh perbedaan status sosial, kelas ekonomi dan jabatan politik.

Dengan prinsip-prinsip di atas, maka tidak ada doktrin Negara Islam, Formalisasi Syari"at Islam dan

Khilafah Islamiyah bagi *Ahlussunnah wal-Jama"ah.* Sebagaimana pun tidak didapati perintah dalam Al-Qur"an, Sunnah, Ijma" dan Qiyas untuk mendirikan salah satu di antara ketiganya. Islam hanya diharuskan untuk menjamin agar sebuah pemerintahan -baik negara maupun kerajaan- harus mampu memenuhi 4 (empat) kriteria di atas.

3. Bidang *istinbath al-hukm (pengambilan hukum syari'ah)*

Hampir seluruh golongan Sunni menggunakan empat sumber hukum yaitu:

a. Al-Qur"an
b. As-Sunnah
c. Ijma"
d. Qiyas

Al-Qur"an sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum *(istinbath al-hukm)* tidak dibantah oleh semua madzhab fiqh. Sebagai sumber hukum *naqli* posisinya tidak diragukan. Al-Qur"an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam.

Sementara As-Sunnah meliputi Al-Hadist dan segala tindak dan perilaku Rasul SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh para Shabat dan Tabi"in. Penempatannya ialah setelah proses *istinbath al-hukm* tidak ditemukan dalam Al-Qur"an, atau digunakan sebagai komplemen (pelengkap) dari apa yang telah dinyatakan dalam Al-Qur"an.

As-Sunnah sendiri mempunyai tingkat kekuatan yang bervariasi. Ada yang terus-menerus *(mutawatir),* terkenal *(masyhur)* ataupun terisolir *(ahad).* Penentuan tingkat As-Sunnah tersebut dilakukan oleh *Ijma" Shahabah*.

Menurut Abu Hasan Ali Ibn Ali Ibn Muhammad Al Amidi, *Ijma"* adalah *Kesepakatan kelompok legislatif (ahl al-halli wa al-aqdi) dan ummat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus. Atau kesepakatan orang-orang mukallaf dari ummat Muhammada pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus.* Dalam Al-Qur"an, dasar Ijma" disebutkan:

“Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (Q.S. An-Nisa‟, 4:115)

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan[95] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Q.S. Al Baqarah, 2:143)

Qiyas, sebagai sumber hukum Islam, merupakan salah satu hasil ijtihad para ulama. Qiyas yaitu mempertemukan sesuatu yang tak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *„illat* hukum. Qiyas sangat dianjurkan untuk digunakan oleh Imam Syafi‟i.

4. Tasawuf

Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi menjelaskan "Tasawuf artinya Allah mematikan dirimu dari dirimu, dan menghidupkan dirimu dengan-Nya; Tasawuf adalah engkau berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apa pun."

Imam Abu Hamid Al-Tusi Al-Ghazali menjelaskan “Tasawuf adalah menyucikan hati dari apa saja selain Allah… Aku simpulkan bahwa kaum sufi adalah para pencari di Jalan Allah, dan perilaku mereka adalah perilaku yang terbaik, jalan mereka adalah jalan yang terbaik, dan

pola hidup mereka adalah pola hidup yang paling tersucikan. Mereka telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah dan menjadikannya sebagai saluran

tempat mengalirnya sungai-sungai yang membawa ilmu-ilmu dari Allah."

"berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apapun" kata Imam Al-Junaid, lalu *"menyucikan hati dari apa saja selain Allah Mereka (kaum Sufi) telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah..,"* kata Imam Al-Ghazali.

Seorang sufi adalah mereka yang mampu membersihkan hatinya dari keterikatan selain kepada-Nya. Ketidakterikatan kepada apapun selain Allah SWT adalah proses batin dan perilaku yang harus dilatih bersama keterlibatan kita di dalam urusan sehari-hari yang bersifat duniawi. *Zuhud* harus dimaknai sebagai ikhtiar batin untuk melepaskan diri dari keterikatan selain kepada-Nya tanpa meninggalkan urusan duniawi. Mengapa? karena justru di tengah-tengah kenyataan duniawi posisi manusia sebagai Hamba dan fungsinya sebagai Khalifah harus diwujudkan.

Banyak contoh sufi atau ahli tasawuf yang telah zuhud namun juga sukses dalam ukuran duniawi. Kita lihat saja Imam Al-Junaid adalah adalah pengusaha botol yang sukses, Al-Hallaj sukses sebagai pengusaha tenun, Umar Ibn Abd Aziz adalah seorang sufi yang sukses sebagai pemimpin negara, Abu Sa"id Al-Kharraj sukses sebagai pengusaha konveksi, Abu Hasan al-Syadzily sukses sebagai petani, dan Fariduddin al-Atthar sukses sebagai pengusaha parfum. Mereka adalah sufi yang pada maqomnya tidak lagi terikat dengan urusan duniawi tanpa meninggalkan urusan duniawi.

Urusan duniawi yang mendasar bagi manusia adalah seperti mencari nafkah (pekerjaan), kemudian berbuntut pada urusan lain seperti politik. Dari urusan-urusan itu kita lantas bersinggungan dengan soal-soal ekonomi, politik-kekuasaan, hukum, persoalan sosial dan budaya. Dalam Tasawuf urusan-urusan tersebut tidak harus ditinggalkan untuk mencapai zuhud, justru kita mesti menekuni kenyataan duniawi secara total sementara hati/batin kita dilatih untuk tidak terikat dengan urusan-urusan itu. Di situlah zuhud kita maknai, yakni zuhud di dalam batin

sementara aktivitas sehari-hari kita tetap diarahkan untuk mendarmabaktikan segenap potensi manusia bagi terwujudnya masyarakat yang baik.

F. Penutup

Ahlussunnah wal-Jama"ah sebagai *manhaj al-fikr* bersifat dinamis dan sangat terbuka bagi pembaruan-pembaruan. Sebagai sebuah metode pemahaman dan penghayatan, dalam makna tertentu ia tidak dapat disamakan dengan metode akademis yang bersifat ilmiah. Dalam metode akademik, sisi teknikalitas pendekatan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi prosedur yang teliti dan nyaris pasti. Namunpun demikian dalam ruang akademis pembaharuan atau perubahan sangat mungkin terjadi.

Sebagai metode berpikir, boleh jadi pada saatnya nanti Aswaja akan memiliki kadar teknikalitas sama tinggi dengan metode ilmiah. Namun dalam pandangan kami upaya pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap Aswaja perlu kita upayakan bersama-sama terlebih dahulu. Khususnya terhadap apa yang telah kami sajikan di sini, yang sangat butuh banyak masukan. Sebuah kebutuhan lanjut, semacam jabaran teknis untuk memandu langkah per langkah tindakan dan pandangan gerakan, akan muncul kemudian apabila kenyataan lapangan sungguh-sungguh menuntut dan membutuhkannya. Akan tetapi sepanjang kebutuhan primer kolektif kita masih terletak pada *memahami*, hal semacam itu kami pandang belum menjadi kebutuhan objektif.

GENEOLOGI NAHDLATUL ULAMA (NU)

Pengantar

Nahdlatul Ulama‟ (Ar.: *Nahdlah Al „Ulama‟ = Kebangkitan „Ulama*). Salah satu organisasi social dan organisasi masyarakat keagamaan di Indonesia. Organisasi ini berkedudukan di ibu kota Negara, tempat pengurus besarnya berada, NU berakidah Islam menurut paham Ahlusunnah Waljama‟ah dan menganut imam madzhab 4 (Empat) : Hanafi, Maliki, Syafi‟I, dan Hambali. Asasnya adalah Pancasila. Tujuan didrikannya adalah untuk memperjuangkan berlakunya Ajaran Islam yang berhaluan Ahlusunnah Waljama‟ah dan menganut Madzhab Empat di tengah-tengah kehidupan di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila (dalam Ensiklopedia Islam Jilid 5: Van Hoeve).

1. Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama

Berdirinya jam‟iyah Nahdlatul Ulama‟ didahului oleh beberapa peristiwa yang merupakan prolog dari pendirian organisasi tersebut. Kejadian itu adalah berdirinya organisasi-organisasi yang menjadi cikal bakal NU diantaranya :

a. Berdirinya lembaga keuangan yang bernama Syirkatul Inan li Murabathi al-Tujjar yang dirintis KH. Hasyim Asy‟ari untuk menggalang kekuatan ekonomi. Melalui lembaga ini Kiai Hasyim melancarkan fatwa-fatwa agar umat Islam menabung untuk pemberdayaan ekonomi dan modal berjuang untuk kemerdekaan. Kemudian Kiai Hasyim mendirikan *jam‟iyyah Nahdlatul Tujjar* dengan menggandeng dua murid kesayangannya yaitu KH. A. Wahab Hasbullah dan KH. Bisri Syamsuri untuk bertekad membentuk jam‟iyyah yang diharapkan mampu membangkitkan kesadaran umat atas keterjajahan, keterbelakangan, dan kemunduran.

b. Berdirinya Grup Diskusi di Surabaya tahun 1914 dengan nama "Taswirul Afkar" dipimpin oleh KH. Wahab

Hasbullah dan KH. Mas Mansyur dan juga ada “Islam Studie Club” untuk diskusi masalah agama.

c. Berdirinya “Nahdlatul Wathon” (Kebangkitan Tanah Air) Tahun 1916, yang banyak mengelola madrasah dengan nama madrasah “Nahdlatul Wathon” yang mendapat badan hukum dengan pengurus KH. Khohar sebagai Direktur, KH. Wahab Hasbullah sebagai Pimpinan Guru, KH. Mas Mansyur sebagai Kepala Sekolah yang dibantu KH. Ridlwan Abdullah.
d. Dalam perkembangannya “Nahdlatul Wathon” berubah menjadi ”Subbanul Wathon” tahun 1925 yang bermarkas di jalan Onderling Blang Surabaya. Yang merupakan cikal bakal gerakan Pemuda Anshor.

Sesungguhnya yang melatar belakangi lahirnya NU adalah ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan KH. Ahmad Dahlan, maupun PSII di bahwah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam *Mu'tamar 'Alam Islami* (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebsan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan *Komite Hejaz*, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan *ad hoc*, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama *Nahdlatul Ulama* (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagi Rais Akbar. Yang hadiri pada saat didirikannya NU di Surabaya adalah;

1) Hadratus Syekh KH. Muhammad Hasyim Asy"ari (Tebu Ireng)
2) KH. Wahab Hasbullah
3) KH. Bisyri Syamsuri (Denanyar Jombang)
4) KH. R. Asnawi (Kudus)
5) KH. Ma"shum (Lasem)
6) KH. Ridlwan (Semarang)
7) KH. Nawawi (Malang)
8) KH. Ridlwan (Surabaya)
9) KH. Abdul Halim (Leuwimunding Majalengka)
10) KH. Doro Muntoha (Menantu KH.Cholil Bangkalan madura)
11) KH. Alwi Abdul Aziz (Surabaya)
12) KH. Dahlan Abdul Qohar (Kertosono)
13) KH. Abdullah Faqih (Gresik)

Dalam pertemuan itu diambil keputusan - keputusan sebagai berikut :

Pertama: Meresmikan berdirinya "Komite Hijaz" untuk mengirimkan delegasi untuk berjumpa muka dengan Raja Ibnu Su‟ud di Mekkah.

Kedua: Membentuk suatu Jam‟iyah untuk wadah persatuan para Ulama‟ dalam tugas memimpin Islam menuju terciptanya Izzul Islam Wal Muslimin (Kejayaan Islam dan Ummatnya).

Ketiga: Membatasi masa kerja Komite Hijaz hingga pulangnya delegasi dari menjalankan tugasnya ke Mekkah.

Keanggotaan Komite Hijaz pada awal mulanya terdiri atas KH. Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Ghona‟eim Al-Amir Al-Misri, seorang ulama‟ terkenal berasal dari Mesir yang menetap di Jawa Timur. Komite ini ditetapkan berangkat Bulan Februari 1926 tetapi tidak terlaksana karena kesulitan masalah keberangkatan yang berdekatan dengan musim haji sedangkan kapal haji sudah berangkat dan baru berangkat lagi tahun 1927.

Dari sinilah Jam‟iyah NU (Nahdlatul Ulama‟) dilahirkan di Surabaya pada Musyawarah Alim Ulama‟ tanggal 31 Januari 1926 pada saat itu juga.

Pemberian Nama NU (Nahdlatul Ulama')

Pelopor atau pencipta nama perkumpulan ini dengan nama Nahdlatul Ulama‟ adalah KH. Mas Alwi Abdul Aziz yang saat itu Kepala Sekolah Nahdlatul Wathon. Setelah diajukan pada rapat disetujui oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy‟ari dan hadirin.

Sebenarnya ada dua orang pengusul nama NU Yaitu :

1. KH. Mas Alwi Abdul Aziz dengan nama Nahdlatul Ulama‟ (Kebangkitan Ulama‟).
2. KH. Abdul Hamid, sedayu Gersik dengan nama Nuhudul Ulama‟ (Akan Kebangkitan Ulama‟)

Sedangkan yang diterima Forum adalah usulan KH. Mas Alwi Abdul Aziz. Mengenai lambang NU diciptakan oleh KH. Ridlwan Hasbullah dari Surabaya yang diajukan dalam Muktamar NU Ke II 12 Robi‟ul Tsani 1347 H

(28 September 1928) dan disetujui Muktamar sebagai lambing jam"iyah Nahdlatul Ulama".

2. Fase-Fase Perjalanan NU

Secara historis, Greg Barton dan Greg Fealy (1996) membagi periodesasi NU dalam tiga babak. Babak pertama, 1926-1955 sebagai organisasi sosial keagamaan. Babak kedua, NU telah mentransformasikan diri sebagai ormas Islam dalam bidang sosial politik dengan menjadi parpol dari 1955 hingga 1984. Babak ketiga, dimulai sejak NU menyatakan diri khitah 1926. NU kembali menjadi ormas sosial-keagamaan hingga sekarang.

a. NU sebagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan (1926-1955)

Setelah kaum tradisionalis terorganisir, maka orientasi-orientasi yang menjadi acuan mereka tampak lebih jelas, terlebih terhadap kaum imperialis baik Belanda maupun Jepang. Hal ini dapat disimpulkan dari hasil-hasil muktamar yang diadakan pada masa pendudukan Belanda dan Jepang. Dengan rasa patriotisme tinggi mereka mengambil langkah-langkah yang akomodatif namun tegas terhadap imperialism. Adapun terhadap kaum pembaharu, kaum tradisionalis berhasil mengadakan rekonsiliasi untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap campur tangan dan tekanan yang dilakukan oleh kaum penjajah (dalam Martin van Bruinessen, *NU Tradisi ,Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*).

Dibawah ini merupakan sebagian dinamika NU pada masa tahun 1926-1955:

1) Mempelopori perjuangan kebebasan bermadzhab di Mekah, sehingga umat Islam sedunia bisa menjalankan ibadah sesuai dengan madzhab masing-masing.
2) Menghidupkan kembali gerakan pribumisasi Islam, sebagaimana diwariskan oleh para walisongo dan pendahulunya. Adapun tradisi yang sangat melekat

dalam ajaran NU seperti yang diajarkan oleh ulama-ulama NU secara turun temurun dari kitab-kitab kuning sebagai rujukannya, antara lain: talafuz bin niyat (mengucapkan niat) ketika akan solat, wiridan (membaca rangkaian tahlil, tahmid dan takbir selepas solat secara bersamaan dengan suara yang dikeraskan), Marhabanan (membacakan kitab Barzanji – perjalanan sejarah Rasullahl SAW dan pujian-pujian kepadanya), ziarah kubur, tahlilan (mendoakan orang yang sudah meninggal) dan membaca solawat nabi.

3) Mempelopori berdirinya Majlis Islami A'la Indonesia (MIAI) tahun 1937, yang kemudian ikut memperjuangkan tuntutan Indonesia berparlemen.
4) Pada masa pendudukan kedua kaum imperialis Inggris, pada pasca kemerdekaan, kaum tradisional mendapatkan ruang yang agak longgar baik dalam kancah sosial maupun politik. Bahkan beberapa ketetapan penting negara dari pihak pemerintah banyak yang meminta saran dari para tokoh NU sehingga secara makro NU ikut berperan aktif dalam sikap-sikap politik negara. Terlebih, bahwa orang nomor satu di Indonesia saat itu, Soekarno, memiliki hubungan yang erat dengan tokoh-tokoh NU. Dan tentunya, dalam dimensi sosial peran NU lebih longgar untuk lebih giat menggalakkan misi-misi keagamaannya. Hal ini seperti memobilisasi perlawanan fisik terhadap kekuatan imperialis melalui Resolusi Jihad NU yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945.

b. NU menjadi Partai Politik (1955 - 1984)

Awal perjalan politik praktis NU diawali pada tahun 1945, ketika bersama-sama organisasi Islam lainnya membentuk partai yang disebut Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) yang diumumkan berdiri tanggal 7 November 1945. NU menjadi anggota istimewa dan mendapat jatah kursi di Majlis Syuro.

Dalam anggaran rumah tangga Masyumi, peranan Majlis Syuro disebutkan antara lain:

1. Majlis Syuro berhak mengusulkan hal-hal yang bersangkut paut dengan politik kepada pimpinan partai
2. Dalam soal politik yang bersangkut paut dengan masalah hukum agama maka pimpinan partai meminta fatwa dari Majlis Syuro
3. Keputusan Majlis Syuro mengenai hukum agama bersifat mengikat pimpinan partai
4. Jika Muktamar/Dewan Partai berpendapat lain daripada keputusan Majlis Syuro, maka pimpinan partai dapat mengirimkan utusn untuk berunding dengan Majlis Syuro dan hasil perundingan itu merupakan keputusan tertinggi

Dengan melihat anggaran rumah tangga tersebut, NU menganggap posisi Majlis Syuro cukup strategis. Agaknya hal ini yang membuat NU cukup puas dengan komposisi kepengurusan yang ada meskipun tak satu anggota NU yang duduk di kursi eksekutif partai.

Munculnya Partai Masyumi sebagai satu-satunya wadah aspirasi politik Islam memang mampu menyatukan kelompok-kelopom Islam yang berbeda paham. Tercata hanya Perti (Persatuan Tarbiyah Indonesia) yang tidak bersedia bergabung ke dalam Masyumi. Tetapi persatuan itu sebenarnya tidak berhasil melebur perbedaan visi kegamaan yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi perpecahan. Keadaan ini diperparah dengan tidak meratanya distribusi kekuasaan antar kelompok, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Pada tahun 1947 beberap tokoh SI seperti Arudji Kartawinata dan Wondoamiseno keluar dari Masyumi dan mendirikan PSII (Partai Serikat Islam Indonesia). Dan dengan keluarnya PSII hancurlah mitos, Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam.

Dalam Muktamar Palembang tahun 1952 diputuskan bahwa NU keluar dari Masyumi. Hal ini

disebabkan oleh sikap eksekutif partai yang tidak lagi menganggap Majlis Syuro sebagai dewan tertinggi. Meskipun secara formal Anggaran Rumah Tangga masih seperti semula tetapi pada praktiknya Majlis Syuro hanya dijadikan sebagai dewan penasehat yang keputusannya tidak mengikat, hal mana mengakibatkan kekecewaan NU dalam Masyumi. Kekecewaan itu juga dipicu oleh persoalan distribusi kekuasaan. Selama tiga kali pembagian kursi kabinet, NU selalu mendapat satu jatah, yaitu kursi menteri agama. Hal itu dapat dimaklumi karena NU memang miskin tenaga ahli yang terampil untuk memimpin suatu kementerian. Dan hanya menteri agama yang kiranya dapat diandalkan, karena NU merasa mempunyai tenaga untuk itu, karena itu dalam kabinet Wilopo tahun 1952 NU menghendaki agar kursi menteri agama tetap menjadi bagiannya.

Tetapi sebagian besar anggota Masyumi tidak menyetujui hak itu, karena NU sudah tiga kali berturut-turut memegang jabatan menteri agama. Akhirnya melalui keputusan rapat keinginan NU ditolak dan inilah yang memicu keluarnya NU dari Masyumi.

Setelah keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik yang berdiri sendiri pada tahun 1952, NU segera disibukkan dengan persiapan pemilihan umum pertama tahun 1955. Waktu yang dimiliki NU untuk bertarung dalam Pemilu 1955 relatif pendek jika dbandingkan dengan partai-partai besar lainnya. Namun demikian NU berhasil meraih 18,4 persen suara (45 kursi) di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mendapatkan 22,3 persen suara (57 kursi) dan Masyumi yang memperoleh 20,9 suara (57 kursi).

Dalam Majlis Konstituante hasil Pemilu 1955, NU dan partai Islam lainnya mempunyai keinginan yang sama yaitu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Namun dari perolehan suara yang ada dapat diduga bahwa koalisi partai-partai Islam tidak akan mudah mengegolkan cita-cita politiknya. Kekuatan partai Islam

bila dijimpun hanya memperoleh 45,2 persen dan koalisi kelompok nasionalis dan komunis memperoleh 42,8 persen. Berarti baik kelompok Islam maupun koalisi kelompok lain tidak ada yang memperoleh 2/3 suara yang dibutuhkan untuk memenangkan pemungutan suara. Perdebatan mengenai dasar negara akhirnya menemui jalan buntu dan diselesaikan dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 yang memutuskan:

1. Pembubaran konstituante
2. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan tidak berlakunya undang-undang sementara 1950
3. Pembentukan Majlis Permusyawarata Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dalam dekrit tersebut disebutkan bahwa Piagama Jakarta yang lebih berpihak kepada kelompok Islam, menjiwai Undang Undang Dasar 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Sebelumnya, ketika terlihat tanda-tanda akan di berlakukannya UUD 45, NU mengadakan Sidang Dewan Partai di Cipanas Bogor pada tanggal 26-28 Maret 1958 dan berhasi merumuskan keputusan sebagai berikut. Dapat menerima UUD 45 sebagai UUD RI dengan pengertian: a) Piagama Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD tersebut pada keseluruhannya dan merupakan sumber hukum. b) Islam tetap menjadi perjuangan partai NU. c) Hasil-hasil Konstituante tetap berlaku.

Setelah melalui perundingan intensif, empat partai Islam yaitu NU Parmusi, PSII dan Perti sepakat melakukan fusi yang dituangkan dalam deklarasi tanggal 5 Januari 1973. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa keempat partai Islam telah seia sekata untuk memfusikan diri politiknya dalam suatu partai politik yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Segala kegiatan non politik tetap dikerjakan dan

dilaksanakan oraganisasi masing-masing sebagaimana sedia kala.

Fusi parta-pratai Islam pada awalnya menguntungkan NU, karena fusi itu dilakukan tatkala NU berhasil memperoleh suara yang jauh di atas partai-partai lain. Pada pemilu 1971 NU memperoleh 18,4 persen, Parusi 6,3 pesen, PSII 2,3 persen dan Perti 0,7 persen. Dengan perimbangan suara seperti ini, NU mendapat 58 kursi atau 61,7 persen dari keseluruhan kursi partai Islam sebanyak 94 kursi. Meskipun NU memperoleh suara mayoritas namun jabatan ketua umum Dewan Pimpinan pUsat dipegang orang non NU yaitu HMS Mintaredja dari Parmusi. Sedang NU hanya mendapat jatah jabatan yang bersifat prestisius belaka.

Selam berfusi dalam PPP, tercatat NU mengeluarkan pernyataan keras terhadap pemerintah. Pertama, ketika KH Bisyri Syansuri menolak Rancangan Undang Undang Perkawinan 1973. Kedua, ketika NU dalam PPP melakukan *walk out* ketika sidang hendak memutuskan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dan masuknya Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kalangan PPP, khususnya NU, khawatir menjadi syirik. Sikap ini dipelopori oleh KH Bisyri Syansuri

Pada tahun 1975 Dewan Partai PPP mengadakan sidang dengan mengambil keputusan yang dikenal dengan "konsensus 1975". Dalam konsensus 1975 disepakati distribusi kekuatan antar unsur partai sesuai dengan perimbangan yang dihasilkan dalam pemilu 1971. Tetapi ketika PPP dalam pemilu 1977 mendapat tambahan 5 kursi justru jatah NU dikurangi dua. Sementara Parmusi mendapat tambahan 1 kursi, SI 4 kursi dan Perti 2 Kursi. Dan perimbangan suara PPP setelah Pemilu 1977 adalah NU 56, Parmusi 25, SI 14 dan Perti 4 kursi.

Menjelang Pemilu 1982 Parmusi menuntut perubahan perimbangan suara dengan mengurangi dominasi NU di PPP. Parmusi menghendaki perimbangan itu menjadi NU 49, parmusi 30, SI 15 dan Perti 5. Dengan asumsi hasil Pemilu sama dengan sebelumnya, 49 suara tidak akan mencapai 50 persen. Tuntutan ini tentu saja tidak dapat diterima NU. akhirnya terjadi konflik antara NU dan unsur-unsur lain, terutama Parmusi. Dengan dukungan pejabat pemerintah, Parmusi berhasil mengurangi kekuatan NU. pada Pemilu 1982 kurang lebih 29 tokoh NU tergusur dari nominasi calon terpilih mewakili PPP. Peristiwa ini tentu mengecewakan NU dan kemudian memunculkan gagasan untuk meninjau kembali status dan eksistensi NU di PPP yang sebenarnya sudah lama dipertimbangkan oleh beberapa kalangan dalam NU.

c. Khittoh NU (1984 - sekarang)

Gagasan untuk mengembalikan NU sebagai organisasi sosial kegamaan telah muncul sejak Muktamar ke-23 tahun 1962 di Solo. Ada dua alternatif yang ditawarkan pada waktu itu untuk mengembalikan NU sebagai organisasi soaial keagamaan. Pertama, mengembalikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan menyerahkan kepada politisi NU untuk membentuk wadah baru sebagai partai politik yang menggantikan kedudukan NU. kedua, membentuk semacam biro politik dalam NU. Biro ini berada dalam struktur NU yang mengurusi soal-soal politik. Sedang NU sendiri sebagai organisasi sosial keagamaan bukan sebagai partai politik. Namun gagasan ini tidak mendapat tanggapan peserta Muktamar.

Dalam Muktamar 1971 di Surabaya gagasan itu kembali muncul dan kembali terkubur oleh ketegangan pemilihan ketua Umum yang terasa sangat ketat antara KH Idham Chalid dan HM. Subhan ZE. Bahkan Muktamar akhirnya memutuskan:

1. Mempertahankan eksistensi dan struktur partai NU seperti adanya sekarang ini
2. Mempertimbangkan gagasan wadah baru yang non politik untuk menampung dan membimbing aspirasi Islam *Ahlussunnah wal Jama"ah* di kalangan ummat, yang oleh karena pekerjaannya atau faktor lain harus meninggalkan ikatan-ikatan politiknya dengan partai politik

Baru pada tahun 1984 sebagai tonggak sejarah baru NU dalam berkhidmat kepada bangsa dan negara. Kembalinya NU pada tujuan awal berdirinya yaitu sebagai aktivitas sosial keagamaan, atau lebih dikenal dengan kembali ke khittah 1926. Peristiwa ini dihasilkan pada Muktamar 1984 di Situbondo. Ide kembali ke khittah ini, dicetuskan oleh tokoh muda NU yakni, KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan KH. Ahmad Sidiq. Sejak kembali khittah, banyak bermunculan gagasan-gagasan segar dalam pembaruan hukum Islam (baca: fiqih) di kalangan NU. Menurut Clifford Geertz, Fikih bukanlah lembaga permanen yang bersifat sakral, tetapi fikih merupakan suatu produk peradaban (civilization product). Dengan begitu pemikiran fikih tidak lagi terkukung dengan rujukan teks (qauli) tetapi diimbangi dengan pembongkaran (dekonstruksi) dan kontekstual.

d. NU pada Masa Reformasi (1999 - sekarang)

Setelah berkuasa lebih dari 30 tahun, Soeharto akhirnya turun dari kursi kepresidenan. Deregulasi undang-undang politik dilakukan. NU membentuk PKB. Sulit rasanya memisahkan garis demarkasi Islam dengan kegiatan politik secara tepat. Hal ini yang menjadi salah satu sebab mengapa NU mengalami tiga kali metamorfosis antara ormas sosial-keagamaan dan orsospol. Padahal kalau mau melihat latar belakang pendiriannya, basis epistimologis keagamaan NU lebih memfokus pada model Islam sufisme. Islam yang menekankan pada aspek Islam etik. Islam sebagai

kekuatan sosio-kultural dalam mengontrol jalannya lembaga kenegaraan. Jadi, Islam tidak menjadi bagian dari kekuatan politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan, kedudukan tetapi justru sebagai kekuatan oposisi (Munir Mulkhan, 2001).

NU kembali menjadi ormas sosial-keagamaan, ke jati dirinya yang asli melalui keputusan Muktamar Situbondo sampai sekarang. Gus Dur terpilih menjadi presiden pada tahun 1999 saat runtuhnya Orde Baru menuju Reformasi. Dari sini NU mulai semakin intens terlibat dalam politik praktis kenegaraan. Mobilisasi massa NU terjadi secara besar-besaran dalam momentum istighotsah maupun demonstrasi. Diakui atau tidak, sosialisasi khitah belumlah maksimal dipahami oleh warga nahdliyin. Masih ada kecintaan, pembelaan yang berlebihan terhadap partai tententu daripada kepada NU sebagai jamiyyah agamanya. Sebab lain, ulah oknum yang mempolitisasi warga untuk mempertahankan dukungan kepada partai dengan menjual agama. Di sisi lain, khitah NU telah banyak mengubah kesan dari organisasi tradisional, ortodok, konservatif, feodal menjadi organisasi yang lebih modern, dinamis, dan demokratis. Wacana pembaharuan bidang sosio-kultural, agama telah tersemai dengan baik di kalangan anak-anak muda NU melalui kelompok-kelompok studi. Tumbuh pengakuan bahwa wacana di tingkat anak-anak muda NU tak kalah progresif, berani dalam merespons isu-isu aktual sosial kemasyarakatan. Hasil yang melegakan itu jangan sampai berhenti di tengah tarikan kekuatan politik praktis kontemporer saat ini. NU harus tetap konsisten menterjemahkan makna khitah secara komprehensif dan holistik kepada masyarakat. Ke depan harus ditegaskan tugas berat NU lebih menitikberatkan bidang pendidikan, dakwah, advokasi, pemberdayaan sosial ekonomi warga menuju masyarakat sipil. Sejauh mungkin NU harus mengambil jarak dengan kekuasaan.

Menjaga jarak dengan kekuasaan bukan berarti antikekuasaan. NU justru harus ikut membangun pilar kekuasaan demokratis melalui proses pencerdasan spiritual, intelektual, dan emosional kader-kadernya pada lembaga pendidikan formal, informal agar lahir negara yang kuat dan adil. Saat kader NU menduduki kekuasaan, harus dipelihara sejauh mungkin peran kritis-organisatoris NU terhadap kekuasaan dalam kerangka membangun *clean goverment*. NU mesti menjadi bagian penting diskursus moral, kultural, intelektual dalam pencerahan warga bangsa bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya. Dengan meretas generasi baru yang memiliki bekal ilmu, pengetahuan, wawasan dan rasa nasionalisme ke-Indonesiaa-an. NU juga harus menjadi daya suluh demokrasi, hak asasi, kesetaraan jender, dalam kerangka kepentingan yang universal, lintas agama, etnis, budaya, bangsa tanpa terjebak dalam jerat politik praktis. Untuk merealisasi tujuan ideal itu, harus melakukan langkah dan strategi sebagai berikut. Pertama, harus mampu menjaga independensinya dengan partai politik. Kedua, kasus rangkap jabatan kader di NU dan partai politik harus dihindari tanpa kecuali, karena hanya akan mempersulit kinerja NU sebagai organisasi. Ketiga, NU harus menjadi orang tua yang bijak, mampu mengayomi dan menyantuni semua kadernya di berbagai partai politik.

NU harus mampu menjadi payung bagi semua tanpa melihat partainya. Toh, NU sudah sepakat dengan motto "NU tidak ke mana-mana tetapi ada di mana-mana". Dan yang paling fundamental, misi khitah akan terlaksana dengan baik dengan misi NU yaitu mewujudkan masyarakat sipil berkeadilan dan demokratis.

BAB IV
BELAJAR DAN MEMAHAMI KE-INDONESIA-AN

SEJARAH NEGARA BANGSA INDONESIA

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar Negara RI sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan Negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari- hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi pancasila yang berupa nilai- nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Proses perumusan Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya di sahkan secara Yuridis sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia.

Sejarah perjuangan dan berdirinya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya berjalan sejak sekian abad yang lalu, dengan pelbagai cara dan bertahap. dengan itu sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempunyai hubungannya dengan sejarah lahirnya Pancasila. Karena sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu itu panjang sekali, maka perlulah ditetapkan tonggak-tonggak sejarah tersebut, yakni peristiwa- peristiwa yang menonjol, terutama dalam hubungannya dengan Pancasila.

B. Proses Perjuangan Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan kemudian sekitar seabad seterusnya didirikan pula kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Baik Sriwijaya, maupun Majapahit pada zamannya itu telah merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh nusantara ini.

1. Masa Kerajaan Sriwijaya

Dalam sejarah Indonesia terdapat dua kerajaan kuno yang besar dan megah yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Para ahli masih berbeda pendapat letak yang pasti kerajaan Sriwijaya. Tetapi peristiwa Sidhayarta yang dilakukan oleh Dapuntah yang menguatkan kesimpulan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya terletak di Jambi. Pendapat ini diperkuat pula dengan ditemukannya prasasti Muara Takus. Namun dari keterangan prasasti Kota Kapu di Talang To, yang menyebut-nyebut kata "Sriwijaya", dapat ditarik kesimpulan lain, yaitu pusat ibu kota Sriwijaya adalah di Palembang. Prasasti lain yang menunjukkan adanya kekuasaan Sriwijaya adalah Bukit Siguntang dan Karang Brahi. Dalam pertumbuhannya, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar.

Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor:

a) Letak Sriwijaya yang strategis yaitu berda dijalur lalu lintas hubungan dagang India dengan Cina serta pelabuhannya yang tenang karena terlindung oleh Pulau Bangka dari terjangan ombak besar.
b) Runtuhnya kerajan Fuhan sebagai kerajaan maritim menguntungkan kerajaan Sriwijaya karena ia bisa berkembang dalam perdangan di Asia Tenggara.
c) Majunya pelayaran dan perdagangan India dan Cina memberi Sriwijaya kesempatan untuk berkembang dalam perdangan di Asia Tenggara.
d) Memiliki armada laut yang kuat untuk mengamankan lalulintas pelayaran, perdagangan serta daerah kekuasaaan.

Disisi lain perkembangan agama Budha, Sriwijaya berperan penting sebagai pusat perkembangan agama ini di Asia Tenggara dan sebagai pusat perkembangan bahasa Sansekerta, sehingga para biksu dari negeri Cina harus belajar Sansekerta di Sriwijaya terlebih dahulu, sebelum belajar agama Budha di India. Diantara Dharmapala ada seorang murid bernama Sakiyakirti yang kemudian menjadi guru besar di Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Nalanda, Balaputra Dewa adalah keturunan Raja Jawa yang

mengadakan hubungan baik dengan kerajaan Benggala yang diperintah oleh Dewapala Dewa yang pernah menghadiahkan sebidang tanah untuk mendirikan asrama bagi pelajar dari Sriwijaya. Prasasti itu juga menjelaskan bahwa Balaputra Dewa keturunan dari Raja Samaratungga dan Putri Tara dari Sriwijaya kemudian menjadi raja besar. Namun hubungan Sriwijaya dengan India retak (1023-1024
M) karena adanya pertikaian mengenai penguasaan jalur lalu-lintas perdangan di Selat Malaka. Setelah Bala Putra Dewa meninggal, Sriwijaya mengalami kemunduran.

Faktor faktor penyebabnya adalah:

a) Pengganti Balaputra Dewa tidak sekuat Balaputra Dewa dalam hal pemerintahan dan kurang bijaksana dalam menghadapi para pembantunya.
b) Adanya serangan Pamalayu dari Singosari dibawah pemerintahan Kartanegara.
c) Daerah-daerah yang berada dibawah pengaruh Sriwijaya berusaha melepaskan diri seperti Thai, Ligor serta daerah lain di semenanjung Malaka.
d) Adanya serangan Majapahit dalam usaha persatuan Nusantara dibawah panji Majapahit.

2. Masa Kerajaan Majapahit

Sriwijaya dan Majapahit merupakan dua kerajaan yang memiliki karisma tersendiri serta menduduki tempat yang cukup mengesankan serta disegani oleh banyak Negara asing. Dalam pertumbuhannya, Majapahit banyak menerima unsur politik, kebudayaan, social, ekonomi dari Singosari sebagai kerajaan yang mendahuluinya. Pendirinya adalah Raden Wijaya yang berhasil menduduki tahta berkat bantuan dari Atya Wiraraja, Bupati Madura, yang menghadiahkan daerah Tarik kepada Raden Wijaya sebagai daerah kekuasaan. Pada tahun 1293 M Raden Wijaya naik tahta dan bergelar Sri Kertajarasa Jaya Wardhana. Yang memerintah dari tahun 1293 M sampai wafatnya pada tahun 1309 M dan dimakamkan sebagai Jena Budha Wisnu dan Siwadi Chandi camping dan candi Budha di Antaphura, kota Majapahit.

Sepeninggalnya Kertarajasa, putranya Kalagemit yang bergelar Srijaya Negara mengisi tahta kerajaan. Namun pemerintahannya lemah dan selalu dirongrong oleh pemberontakan, misalnya pemberontakan Ranggalawe, Lembu Sora, Juru Demong, Gajah Biru, Nambi, Lasem, dan Semi. Yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti dengan peristiwa Badandernya yang hampir meruntuhkan Majapahit sehingga Jaya Negara mengungsi dengan diikuti oleh pasukan Bhayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada.

Selanjutnya Jaya Negara meninggal tahun 1250 Saka (1328 M), karena dibunuh oleh Tanca, seorang tabib kerajaan yang kemudian dibunuh oleh Gajah Mada. Karena Jaya Negara tidak mempunyai keturunan, maka tahta kerajaan digantikan oleh adik perempuannya, Tribuana Tunggadewi. Sementara itu Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih. Pada tahun 1350 M, Tribuana meninggal dan Hayam Wuruk memimpin pemerintahan sehingga dia berjaya mencapai puncak kejayaan. Menurut Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca, daerah yang dikuasai Hayam Wuruk pada masa pemerintahannya sangat luas, yaitu hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia sekarang.

Majapahit melakukan Mitreka Setata (persahabatan yang kekal sederajat) dengan Negara-negara di Asia Tenggara, sementara itu Gajah Mada melakukan peluasan kekuasaaan ke luar Jawa. Untuk mencapai cita-citanya, ia menyatakan Sumpah Palapa dan dengan dibantu oleh Mpu Nala dan Adityawarman, ia menaklukkan satu persatu daerah di luar Jawa, pada masa ini kemakmuran rakyat Majapahit Nampak terangkat dan kegiatan ekonomi mahupun budaya sangat diperhatikan.

Peristiwa Bubat yang terjadi pada tahun 1279 Saka (1357 M) ditandai Hayam Wuruk bermaksud menjadikan Putri Sunda sebgai permaisurinya. Saat Putri Sunda dan ayahnya Sri Baduga Maharadja beserta para pembesar Sunda berada di Bubat, Gajah Mada melakukan kesalahan berupa kesalah fahaman. Dia tidak ingin pernikahan berlaku begitu saja, dia menghendaki Putri Sunda dipersembahkan kepada

Majapahit. Alhasil, terjadi perselisihan paham dan akhirnya terjadi perang Bubat. Banyak korban di kedua belah pihak gugur sedangkan putri Sunda yang dikenal dengan nama Dyah Ayu Pitaloka Citraresmi bunuh diri –budaya kerajaan Sunda saat itu mengharuskan bunuh diri bagi perempuan manakala kalah dalam perang untuk menjaga kehormatan-. Setelah Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 M, Raja Hayam Wuruk megundang Dewan Sapta Prabu untuk merundingkan masalah pengganti Gajah Mada. Keputusannya adalah Mahapatih Hamengkubumi Gajah Mada tidak bisa diganti, dan untuk mengisi kekosongan pemerintahan Mpu Tandi diangkat sebagai Widharmantri, Mpu Nala diangkat sebagai Patih Amenca Negara, dan Patih Dhani diangkat menjadi Yuwamantri. Menurut cerita Pararaton, setelah tiga tahun tanpa Patih Hamengkubumi, Gajah Engon diangkat untuk mengisi posisi tersebut. Setelah Raja Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 M, terjadilah perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana (menantu Hayam Wuruk) dengan Bri Wira Bhumi (Putri Hayam Wuruk dari salah seorang selirnya) yang di sebut perang Paregreg.

Wikrawhardhana meninggal tahun 1429 M, dan berturut turut digantikan oleh Kertawijaya, Raja Wardhana, Purwawisesa, Brawijaya V yang tidak pernah luput dari perebutan kekuasaan. Majapahit runtuh karena perang saudara dan proses kehancuran ini juga dipercepat oleh perkembangan agama Islam di Demak.

C. Penjajahan Negara Barat di Indonesia

Kesuburan Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah terutama rempah-rempahnya yang dibutuhkan oleh negara-negara di luar Indonesia menyebabkan bangsa asing berduyun-duyun masuk ke Indonesia. Muncullah bangsa-bangsa barat yakni Portugis, Spanyol, Inggris dan akhirnya Belanda di bumi Indonesia.

Penjajahan barat yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia itu tidak dibiarkan begitu saja oleh segenap bangsa

Indonesia. Sejak semula imprealisme itu menjejakkan kakinya di Indonesia. Dimana-mana bangsa Indonesia melawannya dengan semangat patriotik Perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh pahlawan Sultan Agung (Mataram 1645), Sultan Ageng Tirta Yasa dan Ki Tapa (Banten) pada tahun 1650, Hassanuddin (Makassar) pada tahun 1660, Iskandar Muda (Acheh tahun 1635) Untung Surapati dan Trunojoyo (Jawa Timur tahun 1670), Ibnu Iskandar di Minangkabau 1680. Pada kurun XIX penjajah Belanda mengubah sistem kolonialismenya yang semula berbentuk perseroan dagang partikelir V.O.C, pada abad itu berubah menjadi badan pemerintahan resmi yaitu Pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian meletus lagi perlawanan bangsa Indonesia dengan Belanda yang dipimpin oleh Pattimura (Maluku 1817), Imam Bonjol (Minangkabau 1822- 1837), Diponegoro (Mataram 1825-1830), Badaruddin (Palembang 1817), Pangeran (Kalimantan 1860), Jelantik(Bali 1850), Anak Agung Made (Lombok 1895), Teuku Umar, Teuku Cik di tiro, Cut Nya"Din (Acheh 1873- 1904), Singamangaraja (Batak 1900).

D. Penjajahan Jepang dan Lahirnya Pancasila

Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 April 1945 (2605, tahun Showa 20) yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka. BPUPKI semula beranggotakan 70 orang (62 orang Indonesia dan 8 orang anggota istimewa bangsa Jepang yang tidak berhak berbicara, hanya mengamati/ "observer"), kemudian ditambah dengan 6 orang Indonesia pada sidang kedua.

Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama empat hari bersidang ada tiga puluh tiga

pembicara. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa Soekarno adalah "Penggali/Perumus Pancasila". Selain Soekarno, yang disebut Tim Sembilan, yang menyumbangkan pikirannya tentang Dasar Negara antara lain adalah Mohamad Hatta, Muhammad Yamin, Soepomo, A.A. Maramis, Abikusno Tcokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, H. Wahid Hasyim, Achmad Subardjo, dan H. Agus Salim. "Klaim" Muhammad Yamin bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 dia mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu "kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat." oleh "Panitia Lima" (Bung Hatta cs) diragukan kebenarannya. Arsip A.G Pringgodigdo dan arsip A.K.Pringgodigdo yang telah ditemukan kembali menunjukkan bahwa Klaim Yamin tidak dapat diterima. Pada hari keempat, Soekarno mengusulkan 5 asas yaitu "kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa", yang oleh Soekarno dinamakan "Pancasila", Pidato Soekarno diterima dengan gegap gempita oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya pancasila.

Pada tanggal 28 Mei 1945 itu Badan Penyelidik mengadakan sidangnya yang pertama. Peristiwa ini kita jadikan tonggak sejarah karena pada saat itulah Mr M. Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik, lima asas dasar untuk Negara Indonesia Merdeka yang diidamkan itu, yakni :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato, di atas asas yang lima tadi, beliau menyampaikan usul tertulis mengenai Rancangan UUD Republik Indonesia didalam rancangan UUD itu tercantum perumusan lima asas dasar Negara yang berbunyi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ir. Soekarno mengucapkan pada pidatonya dihadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik diusulkan juga lima hal untuk menjadi dasar dasar Negara Merdeka:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat-atau Demokrat
4. Kesejahtraan social
5. Ketuhanan dan kebudayaan

Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Sembilan tokoh nasional ialah Ir. Soekarno, Mohamad Hatta, Muhammad Yamin, Soepomo, A.A. Maramis, Abikusno Tcokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, H. Wahid Hasyim, Achmad Subardjo, dan H. Agus Salim mengadakan pembahasan dan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar Negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik. Setelah mengadakan pembahasan maka disusun sebuah piagam yang kemudian terkenal dengan nama Piagam Jakarta. Kemudian pada 14 Juli 1945 Piagam Jakarta dapat penerimaan oleh Badan Penyelidik yang berlangsung pada sidangnya yang kedua pada tanggal 14 - 15 Juli 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia Bagian Timur. Berberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut: Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi; Hamidhan, wakil dari Kalimantan; I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara; Latuharhary, wakil dari Maluku. Mereka semua berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya". Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

NASKAH BAI'AT ANGGOTA BARU
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Bismillaahirrahmaanirahiim,
Asyhadu alla Ilaaha Illa Allah, Wa Asyhadu anna Muhammadarrasulullah
Radhiitubillahirabba, wabil islaamidiina, wabim muhammadinnabiyya wa rasuula, wabil qur''aani imaama
Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berikrar :
Bahwa saya :

1) ***Menyerahkan diri menjadi KADER MU'TAKID Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.***
2) ***Sebagai KADER MU'TAKID Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai- nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa***
3) ***Sebagai KADER MU'TAKID Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun***
4) ***Sebagai KADER MU'TAKID Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi, adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT***

Astaghfirullaah al adhiim, Astaghfirullah al adhiim, Astaghfirullaah al adhiim
Khasbunallah wa ni''mal wakiil, ni''mal maulaa wa ni''man nashiir Laa haula walaa quwwata illa billah….

………,…………………………………..2018

Kalimat dan Istilah yang menjadi Ciri Khas PMII

1. Sahabat/Sahabati (Panggilan sesama anggota atau kader PMII)
2. Dzikir, Fikir dan Amal Shaleh
3. Taqwa, Intelektual, dan Profesional
4. Salam Pergerakan!
5. *Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamitthoriiq* (Kalimat penutup sebelum mengucapkan kalimat salam)
6. Tangan Terkepal dan Maju ke Muka
7. Harlah (Hari Lahir)
8. Islam Rahmatan Lil „Aalamiin
9. Kaum Mustad‟afiin
10. Kritis Transformatif
11. Nilai Dasar Pergerakan
12. *Al-Muhaafadzotu „Alaa Al-Qodimi As-Sholih Wa Al Akhdu Bi Jadiidi Al-Ashlah*
13. *Dar‟u Al Mafasid Muqqadamun Ala Jalbi Al Mashalikh*
14. *Tashariful Imam Ala Al Ra‟iyah Manuthun Bil Mashlahah* (semua kebijakan pimpinan harus didasari pertimbangan kemashlahatan umat)
15. Tawasuth (Moderasi), Tawaazun (Keseimbangan), Tasamuh (Toleransi), dan I‟tidal (Keadilan).
16. Al-Harokah Barokah

MAJELIS PEMBINA CABANG (MABINCAB) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) CIREBON – JAWA BARAT

Ketua	: Dr. Ilman Nafi‟a, M.Ag
Sekretaris	: Dr. Ijah Bahijah, M. Ag
Anggota	: Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M. A
	Dr. (HC) K.H. Miftah Faqih, M. A
	Dr. K.H Sobirin, M. A
	Drs. K.H. Nukbatul Mankhub, M. H
	K.H. Wawan Arwani Amin
	K.H. Solihin
	Yayat Rahmat Hidayat, SP, M. Agr
	Ahmad Khaelani, M. Pd
	Wahyono Annajih, M. Pd
	Aji Halim Rahman, SH, MH
	Anggara Disuma, S.H

SUSUNAN KEPENGURUSAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
CIREBON – JAWA BARAT
MASA KHIDMAT 2019-2020

Ketua umum : Rahmat Al Bayan
Ketua 1 : Muhammad Nurul Falah
Ketua 2 : Muhammad Imam Muslim
Ketua 3 : Anton Widodo

Sekretaris umum : Moh. Malik Abdul Aziz
Sekretaris 1 : M. Jalal Assayuty
Sekretaris 2 : Lukman Hakim
Sekretaris 3 : Muhammad Yahya

Bendahara Umum : Ahmad Tazul Arifin
Bendahara 1 : Muhammad Khanif

Departemen-departemen:
Bidang 1:

- Kaderisasi dan Sumber Daya Anggota
  Kordinator : Lutfi Adila Rizki
  Anggota : Mohammad Arif Wijaksana
  : Muhammad Subkhan
  : Tantri Rahmawati Ningrum
- Kajian, Pengembangan Intelektual, dan Eksplorasi Teknologi
  Kordinator : Syahid
  Anggota : Pujiati
- Pendayagunaan Potensi dan Kelembagaan Organisasi
  Kordinator : Ahmad
  Khumaeni Anggota : Abdurrozak
  : Romadhon
  : Muhammad Naji
- Pemberdayaan Ekonomi dan Kelompok
  Profesional Kordinator : Khavid Khalwani
  Anggota : Sri Handayani
  : Firly

- Hubungan dan Komunikasi Pemerintahan dan Kebijakan Publik
  Kordinator : Fahmi Ahmad Hudayana
  Anggota : Ansor Waladih
  : Ikhwanuddin

Bidang 2:

- Hubungan Dan Komunikasi Organ Gerakan Kepemudaan dan Perguruan Tinggi
  Kordinator : Mahfudin
  Anggota : Tubagus Saef Nurullah
  : Irham Asnawi
- Pengembangan Media dan Informasi
  Kordinator : Hubeb Isaf
  Anggota : Koimah
- Hubungan dan Kerjasama LSM
  Kordinator : Imam Bukhori
  Anggota : Maulana Abdul Aziz
- Hubungan Advokasi, HAM, dan Lingkungan Hidup
  Kordinator : Lutfi Adam Zakaria
  Anggota : M. Aif Syaifuddin

Bidang 3:

- Dakwah dan Kajian Islam
  Kordinator : Mahathir Akbar
  Anggota : Farihin
- Komunikasi dan Hubungan Pesantren
  Kordinator : Imam Muammar
  Anggota : Rasiman
- Hubungan Komunikasi Lintas
  Agama Kordinator : Noupal Irsyad
  Anggota : Iis Rahmawati

SUSUNAN KEPENGURUSAN KOMISARIAT IAIN SYEKH NURJATI CIREBON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) MASA KHIDMAT 2019-2020

Ketua Umum : Aziz Nurramdhani
Wakil Ketua I : Aksan
Wakil Ketua II : Dicky Sulaeman
Wakil Ketua III : Abdul Rozak

Sekretaris Umum : Muhammad Sahal Assaidi
Wakil Sekretaris I : Nur Khasanah
Wakil Sekretaris II : Titin Supriatin
Wakil Sekretaris III : Nurhasanah

Bendahara Umum : Riza Amaliah

Biro-Biro
Kaderisasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Anggota
Koordinator : Wigi Julianto
Anggota : Ghofur Fadil
: Tomas Amirin
: Abdul Ghoni

Biro Hubungan Komunikasi Organ Gerakan dalam Kampus
Koordinator : Akbar Setiawan
Anggota : Nurlaela Lesmanawati
: Rifdah Zulfiyah
: Muhammad Ahya

Dakwah dan Kajian Islam
Koordinator : Abdul Hafidh
Anggota : Iimam Syafi'i
Fiqih Hidayatur Rahman

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KOPRI CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(PMII) CIREBON-JAWA BARAT
MASA KHIDMAT 2019-2020**

Ketua : Oktavia Rinisa
Sekretaris : Intan
Bendahara : Ulfah

Bidang-Bidang

Kaderisasi dan Kajian
Wakil Ketua : Mahmud
Sekretaris : Kokom
Anggota : Devi

Media dan Informasi
Wakil Ketua : Mae
Sekretaris : Laeli
Anggota : Fildza

Kreativitas dan Perkembangan Ekonomi
Wakil Ketua : Widi
Sekretaris : Siska
Anggota : Sofi

Hubungan Jaringan dan Advokasi
Wakil Ketua : Shara Maharni
Sekretaris : Ainun
Anggota : Dewi

SUSUNAN PENGURUS
IKATAN KELUARGA ALUMNI PMII (IKA PMII)
CABANG CIREBON

KETUA : H. SUTEJA, DR. M.Ag.
SEKRETARIS : ILMAN NAFI'A, DR. M.A.
ANGGOTA :

1. H.A. SAYUTI HASAN (INDRAMAYU)
2. H. AMIN KARTUBI, DRS. (KOTA CIREBON)
3. H. FAQIH IBRAHIM, DRS. (CIREBON)
4. H. ABDUL GHOFFAR, DRS., M.M. (KOTA CIREBON)
5. H. A. FACHRURROZI, DRS. (CIREBON)
6. ANANG JAUHARUDIN, DRS., M.Pd. (SUBANG)
7. H. HISYAM AZHARI, MAg. (CIREBON)
8. SODIQ LUTFI, DRS. H. (BREBES)
9. H. SLAMET FIRDAUS, DR. MA
10. AZAM ZUBAEDI, DRS. (CIANJUR)
11. WAWAN WAHYUDIN, DRS., M.Ag. (SERANG BANTEN)
12. TAKDIR CHUMAEDI, DRS. (CIREBON)
13. ZAENI A. KARIM, DRS. (BREBES)
14. H. WAWAN ARWANI, DRS. ,M.A. (CIREBON)
15. NURROHMAN KOSASIH, DRS., M.PD (JAKARTA)
16. SHOLAHUDIN KAFRAWI, MA, Ph.D
17. H. MASRUR AINUN NAJIH, DRS., M.A. (TANGGERANG)
18. SYARIF HIDAYATULLAH, M.Ag. (DIY)
19. MUHAIMIN SLAMET, DRS. (TEGAL)
20. ZAENI A. KARIM, DRS. (BREBES)
21. RODIAH ALFAROZI, DRS. (CIREBON)
22. H. Rosyidin Hasaan, DRS., MA. (LAMPUNG)
23. H. SOLEKUL HADI, DRS. (SUBANG)
24. Hj. LIMNAH, DRA. (CIREBON)
25. Hj. IIP HANIFAH, DRA. (CIREBON)

26. Hj. KURNIA SUMPENA, DRA. (CIREBON)
27. Hj. TSANA'UL 'ATHIYAH, DRA. (CIREBON)
28. Hj. DEDEH SUSILAWATI (KUNINGAN)
29. AMINAH, DRA. (CIREBON)
30. HAMIDAH ZAENUDDIN, DRA. (BREBES)
31. Hj. UMAMATUL KHAERIYAH, DRA., MA
32. Hj. ELAH NURLAELAH, DRA
33. ULIFAH, DRS., MA
34. YUNI LATIFAH, DRA. (TEGAL)
35. Hj. NURHAYATI ANAS, DRA. (INDRAMAYU)
36. NELIWATI, DRA, M.Ag. (MEDAN)

KETUA UMUM
IKATAN KETUA ALUMNI (IKA)
PMII STAIMA CIREBON

1. **Ahmad Zaelani** (Karawang)
2. **Hasan Bisri** (Indramayu)
3. **Ajat Sudrajat** (Kuningan)
4. **Saeful Amri** (Tegal)
5. **Musliman** (Lampung)
6. **Ach Syaikhu Azmy** (Cirebon)
7. **Absori Azka** (Cirebon)
8. **Nurrohman** (Cirebon)
9. **Very Firmansyah** (Kuningan)
10. **Shofiyullah** (Indramayu)
11. **Muhammad Jalal Assayuty** (Karawang)
12. **Nurhayat Amal Hasan** (Majalengka)

Pendiri PMII Cirebon

1. **Maksudi Yusuf** (Plered Cirebon)
2. **Suaeb Sumpeno** (Cirebon)
3. **Umar Labib Irfan** (Klayan Cirebon)
4. **Ahmad Sayuti Hasan** (Kebon Baru Cirebon)
5. **Ibrahim Rozy** (Plered Cirebon)
6. **Ahmad Syahari Muksin** (Kebon Baru Cirebon)
7. **Kistiharno** (KS Tubun Cirebon)

PMII DARI MASA KE MASA

No	Tahun Periode	Ketua Umum	Sekertaris Umum
1	1960 - 1961	H. Umar Labib Irfan, BA	-
2	1966 - 1967	A. Sahari Muchsin, BA	Marida AY
3	1974 - 1975	H. Amin Kartubi	Ghofur Almani
4	1975 - 1976	H. Faqih Ibrahim	Dodo Nahdudi
5	1976 - 1977	H. Hisyam Azhari	Muhyiddin Achwi
6	1978 - 1979	Fahrur Rozie	Dodo Suwanda
7	1979 - 1980	Shodik Lutfi	Farid Abdul Manaf
8	1980 - 1981	Muhyidin Achwi	Farid AM, BA
9	1981 - 1982	Azam Zubaedi AR	Muh. Jerman
10	1982 - 1983	Azam Zubaedi AR	Wawan Wahyuddin
11	1983 - 1984	Wawan Wahyuddin	Masrur Ainun Najih
12	1984 - 1985	Takdir Chumaedi	Affandi Muchtar
13	1985 - 1986	Affandi Muchtar	Muh. Jerman
14	1986 - 1987	Affandi Muchtar	Sutejo Ibnu Pakar
15	1987 - 1988	Zaeni Abdul Karim	Himatul Hidayatullah
16	1988 - 1990	Wawan Arwani	Rodia Alfaroszie
17	1990 - 1991	Ibnu Sina Aziz	Shalahuddin Kafrawi
18	1991 - 1992	Shalahuddin	Slamet Sugiarto
19	1994 - 1995	Shobirin Tajam	Syarif Hidayatullah
20	1995 - 1996	Ilman Nafi"an	Andriyanto Muin
21	1996 - 1997	Sulhan	Andriyanto Muin
22	1997 - 1998	Andriyanto Muin	Acep Purnawan
23	1998 - 1999	Acep Purnawan	Tohir

24	1999 - 2000	Bintang Irianto	Bahruddin
25	2000 - 2001	Abdul Hamid	
26	2001 - 2002	Mahmudin	
27	2002 - 2003	Mas‟ud Suhaemi	
28	2003 - 2004	Imron Rosyadi	Saefuddin Zuhri
29	2004 - 2005	Mujahid	Jamalludin
30	2005 - 2006	M. Dodi Cahyadi	Alifatul Arifiati
31	2006 - 2007	H.M. Ibnu Baliran	Suhartono
32	2008 - 2009	Aan Anwaruddin	
33	2009 - 2010	Muhammad Ali	Yahya
34	2010 - 2011	Ahmad Fauzi	Ahyadi
35	2011 - 2012	Muzayyin Harits	Alif Alfian
36	2013 - 2014	Ibnu Hasanuddin	Sulhan Hasan
37	2014 - 2015	M. Yazidul Ulum	Asep Rizky Padhilah
38	2015 - 2016	Aji Halim Rahman	Diki Agustinah
39	2017-2018	M. Zaki Mubarok	Agus Mauludin

JADWAL KAJIAN PASCA MAPABA

Jadwal kajian wajib di bawah ini diselenggarakan oleh Pengurus Rayon:

No.	Bulan	Minggu	Hari/ Tanggal	Materi	Narasumber
1	Kesatu	I		Sejarah PMII dan Sejarah Gerakan Mahasiswa	
		II		Sejarah PMII Cirebon	
		III		NDP dan Citra Diri Ulul Albab	
		IV		Sejarah Cirebon: Membangun nilai-nilai dan tradisi-tradisi Cirebon	
2	Kedua	I		Konsep-konsep Paradigma Keteraturan, Konflik, Pluralis dan Kritis	
		II		Paradigma PMII: Membangun gerakan lewat *Multy Level Strategy*	
		III		Manajemen Organisasi: Definisi dan bentuk-bentuk Organisasi. Planning, Organizing, Actualing dan Controlling	
		IV		Character	

				Building PMII	
3	Ketiga	I		Perkembangan Islam pasca wafatnya Rasulullah dan Munculnya aliran-aliran dalam Islam	
		II		Aswaja sebagai *Manhaj Al Fikr* (Metodologi Berfikir)	
		III		Aswaja Persfektif Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya	
		IV		Islam: Aswaja dan Teologi Pembebasan	
4	Keempat	I		Embrio dan Latar Belakang berdirinya NU	
		II		NU: Masa Kolonial, Perjuangan Kemerdekaan, Orde Lama (NU sebagai partai Politik), Orde Baru (marjinalisasi, kembali ke khittoh dan penerimaan asas tunggal)	
		III		NU dan PMII:	

				Problematika, Tantangan dan Rumusan gerakan masa reformasi	
		IV		Gender sebagai Konstruksi Sosial perspektif Islam	
5	Kelima	I		Paradigma Gender Perspektif PMII: Menuju Gerakan Nahdlatun Nisa	
		II		Bedah AD/ART PMII	
		III		Bedah Pedoman Penyelenggaraan Administrasi PMII	
		IV		Pengantar Filsafat (Definisi dan Sejarah): Ontologi, Epistemology dan Aksiologi	
6	Keenam	I		Teknik Persidangan	
		II		Teknik Moderator, diskusi dan rapat	
		III		Teknik Membuat Proposal dan TOR	
		IV		Antropologi kampus dan strategi masuk organ intra	

				kampus	
7	Ketujuh	I		Diskusi fakultatif (disesuaikan dengan rayon)	
		II		Evaluasi Kaderisasi	Ketua Rayon dan Kabid. Kaderisasi
		III		Uji Kompetensi	PR
		IV		PMII Award	PR dan PK

LAGU-LAGU PMII

HYMNE PMII

Bersemilah, bersemilah tunas PMII
Tumbuh subur, tumbuh subur kader PMII
Masa depan di tanganmu untuk meneruskan
perjuangan Bersemilah, bersemilah kau harapan bangsa

Bersemilah, bersemilah tunas PMII
Tumbuh subur, tumbuh subur kader PMII
Masa depan di tanganmu untuk meneruskan
perjuangan Bersemilah, bersemilah kau harapan bangsa

BERJUANGLAH PMII

Berjuanglah PMII berjuang
Marilah kita bina persatuan
Berjuanglah PMII berjuang
Marilah kita bina persatuan

Hancur leburkanlah angkara murka
Perkokohlah barisan kita
Siap
Sinar api Islam kini menyala
Tekad bulat jihad kita membara

MARS PMII

Inilah kami wahai Indonesia
Satu barisan dan satu cita
Pembela bangsa penegak agama
Tangan terkepal dan maju

kemuka Habislah sudah masa yang
suram Selesai sudah derita yang lama
Bangsa yang jaya Islam yang benar
Bangun tersentak dari bumiku subur

Reff: Denganmu PMII Pergerakanku
Ilmu dan bakti kuberikan
Adil dan makmur kuperjuangkan
Untukmu satu tanah airku
Untukmu satu keyakinanku

Inilah kami wahai Indonesia

Satu angkatan dan satu jiwa
Putera bangsa bebas merdeka
Tangan terkepal dan maju
kemuka Sinar api Islam kini
menyala Tekad bulat jihad kita
membara Berjuanglah PMII
berjuang Menegakkan kalimat
Tuhan

17 APRIL

Akulah embun tetesan tradisi
Melawan matahari pecipta pelangi
Akulah puja tetesan sang wali
Melumat kata menumbuk duri

Engkau adalah mata air suci
Bertahan iring arus globalisasi
Engkau adalah bintang pemimpin negri
Bekerja tabuh genderang demokrasi

Wahai sejarah saksikan kami tegak berdiri
Damaikan samudra
Meluluhkan tirani
Khidmadku untuk rakyat dan illahi
Demi pertarungan yang kita perangi
Dan pertempuran yang belum kita jalani

DARAH JUANG

Disini Negri Kami
Tempat Padi Terhampar
Samuderanya Kaya Raya
Tanah Kami Subur Tuan

Dinegri Permai Ini
Berjuang Rakyat Bersimbangan Luka
Anak Kurus Tak Sekolah
Pemuda Desa Tak Kerja

Mereka Dirampas Haknya (#)
Tergusur dan Lapar
Bunda Relakan darah Juang Kami
Tuk membebaskan Rakyat

Kembali Ke #
(Padamu Kamii Berjanji)

PEMBEBASAN
Buruh, Tani, Mahasiwa
Kaum Miskin Kota
Bersatu Pada Rebut Demokrasi
Gegap Gempita Dalam Satu Suara
Demi Tugas Suci Yang Mulia
Hari-Hari esok Adalah Milik Kita
Terbebasnya Masarakat Pekerja
Terciptanya Tatanan Masayarakat
Indonesia baru tanpa orba
Reff:
Marilah kawamn
Mari kita kabarkan
Ditanggan kita, tergenggam arah bangsa
Marilah kawan
Mari kita nyanyikan sebuah lagu
Tentang pembebasaan
Dibawah kuasa Tirani
Kususuri garis jalan ini
Berjuta kali turun aksi
Bagiku satu langkah pasti

REVOLUSI SAMPAI MATI
Bergerak dan Bersatu
Menuju Indonesia Baru
Singkirkanlah benalu
Singkirkan semu musuh-musuh
Rakyat Pasti Pasti Menang
Merebut Kedaulatan
Rakyat Kita Pasti akan
Menang Revolusi-revolusi
Revolusi sampai menang
Demokrasi-demokrasi
Demokrasi atau mati

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.